

**Pembentukan Ruang Publik Serta Respon Warga dengan Pemerintah
Dalam Implementasi Kebijakan Penggusuran dan Pembangunan Ruang
Terbuka Hijau di Wilayah Eks-Lokalisasi Kota Kediri**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi Pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Konsentrasi Sosiologi Pembangunan

Oleh :

Eldira Fitri Ayu Damayanti

NIM. 145120100111029



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2018

Biodata Peneliti

Data Pribadi

Nama : Eldira Fitri Ayu Damayanti
 Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 14 Mei 1996
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Telepon : 087865502478
 Email : eldirafitri@gmail.com
 Alamat : Perum Green Park Cluster 3 R-18,
 Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo



Pendidikan Formal

Tahun 2002 – 2008 Sekolah Dasar Negeri Burengan 3 Kota Kediri
 Tahun 2008 – 2011 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Kediri
 Tahun 2011 – 2014 Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sidoarjo
 Tahun 2014 – 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Pengalaman

Tahun 2014 Anggota praktikum mata kuliah terintegrasi Perubahan Sosial, Statistik Sosial, Struktur dan Pranata Sosial di Desa Krebet Senggrong Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang
 Tahun 2015 Anggota praktikum mata kuliah terintegrasi Metode Penelitian Sosial dan Sosiologi Desa Kota di Desa Borojambangan Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang
 Tahun 2015 Anggota praktikum mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif di Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang
 Tahun 2016 Anggota praktikum mata kuliah terintegrasi Desentralisasi/Otonomi Daerah dan Metode Penelitian Kualitatif di Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang
 Tahun 2016 Anggota praktikum mata kuliah terintegrasi Social Impact Assesment dan Social Planning serta Manajemen Riset Terapan di Desa Plumbangan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
 Tahun 2017 Magang kerja di PT. Agro Fauna Kamadjaja Mojosari sebagai pelaksana CSR (*Corporate Social Responsibility*)

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	21
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 :Peta wilayah Kecamatan Kediri Kota	57
Gambar2 :Persediaan bambu runcing dan bom molotov yang disediakan warga.....	65
Gambar 3 : Kondisi lahan pasca pengusuran	66
Gambar 4 : Pra Design ruang terbuka hijau di wilayah eks lokasi.....	67
Gambar 5 : Surat Peringatan pembongkaran bangunan.....	72
Gambar 6: Kondisi lahan eks lokasi pasca pengusuran	98
Gambar 7 : Proses diskusi warga RW 5	102

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Alur berfikir	42
Bagan 2 : Alur peraturan pembubaran lokasi	79
Bagan 3 : Bagan Penjelasan Respon Warga dalam Penolakan Kebijakan	114
Bagan 4 : Persamaan Pola Proposisi	12



HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

Pembentukan Ruang Publik Serta Respon Warga dengan Pemerintah Dalam
Implementasi Kebijakan Penggusuran dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di
Wilayah Eks-Lokalisasi Kota Kediri

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Eldira Fitri Ayu Damayanti

NIM : 145120100111029

Telah disetujui oleh dosen pembimbing :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ahmad Imron Rozuli, S.E., M.Si
NIP. 19740107 200601 1 001

Nike Kusumawanti S.Sos., M.A
NIP. 198301122015042001

Mengetahui :

Malang, 20 Juni 2018

Ketua Jurusan Sosiologi

Anif Fatma Chawa, M.Si., Ph.D

NIP. 19740308 200501 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Pembentukan Ruang Publik Serta Respon Warga dengan Pemerintah Dalam
Implementasi Kebijakan Penggusuran dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di
Wilayah Eks-Lokalisasi Kota Kediri

Disusun Oleh :

Eldira Fitri Ayu Damayanti

145120100111029

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Sarjana Pada Tanggal

24 Mei 2018

Tim Penguji :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ahmad Imron Rozuli, S.E., M.Si

NIP. 19740107 200601 1 001

Nike Kusumawanti S.Sos., M.A

NIP. 198301122015042001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Titi Fitrianita, S.Sos., M.A

NIK. 20130487 0527 2 001

Slamet Tohari, M.A

NIK. 200130481 1119 1 001

Malang, 21 Juni 2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak.

NIP. 19690814 199402 1 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eldira Fitri Ayu Damayanti

NIM : 145120100111029

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **Pembentukan Ruang Publik Serta Respon Warga Dengan Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Penggusuran dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Eks-Lokalisasi Kota Kediri** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

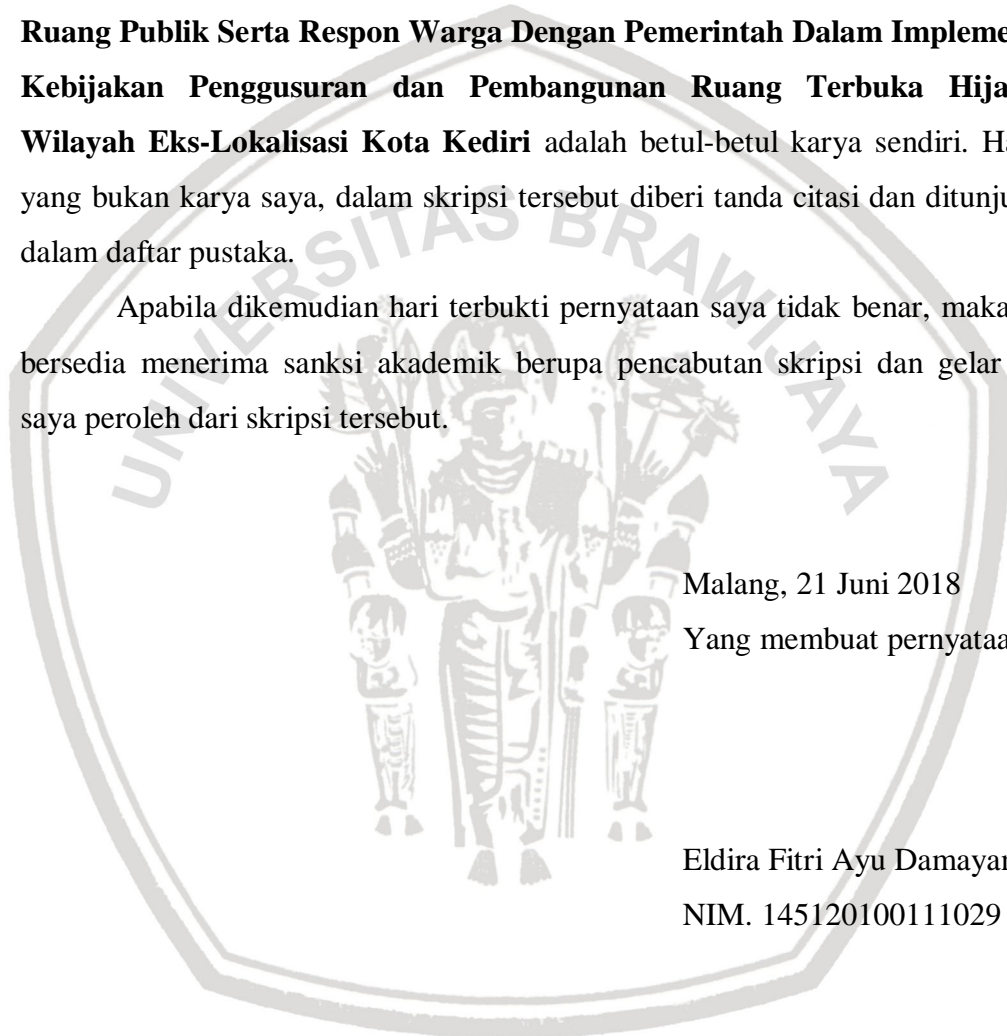
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 21 Juni 2018

Yang membuat pernyataan

Eldira Fitri Ayu Damayanti

NIM. 145120100111029



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **Pembentukan Ruang Publik Serta Respon Warga Dengan Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Penggusuran dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Eks-Lokalisasi**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan kelulusan studi sekaligus memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar atas bantuan, dukungan, bimbingan, serta pemikiran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua, saudara-saudara, serta keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan berupa materi maupun non materi
2. Bapak Ahmad Imron Rozuli, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi pertama serta Ibu Nike Kusumawanti, S.Sos, M.A selaku dosen pembimbing skripsi kedua yang telah memberikan bimbingan dan masukan serta telah meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi
3. Ibu Titi Fitrianita, S.Sos, M.A selaku dosen penguji skripsi pertama serta Bapak Slamet Tohari, S.Fil, M.A selaku dosen penguji skripsi kedua yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini
4. Seluruh dosen Jurusan Sosiologi atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan
5. Seluruh informan yang telah meluangkan waktunya kepada peneliti dan banyak membantu dalam penelitian skripsi ini
6. Para penulis buku, penulis artikel, serta peneliti yang penelitiannya penulis jadikan sebagai perbandingan dalam penelitian terdahulupada skripsi ini
7. Teman-teman Sosiologi Universitas Brawijaya angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan pembaca.

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Landasan Teori	24
2.2.1 Teori Diskursus Jorgen Habermas	24
2.3 Definisi Konseptual	35
2.3.1 Diskursus Kebijakan Pemerintah Kota Kediri	35
2.3.2 Resistensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah	40
2.4 Alur Pemikiran	42
METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Fokus Penelitian	48
3.3 Lokasi Penelitian	48
3.4 Jenis dan Sumber Data	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data	50
3.5.1. Observasi	50
3.5.2. Indepth Interview	51
3.5.3. Dokumentasi	51
3.6 Teknik Penentuan Informan	52
3.7 Teknik Analisis Data	53
3.8 Teknik Keabsahan Data	55
GAMBARAN UMUM	57
4.1 Kondisi Geografis dan Demografis	57
4.2 Awal Mula Kebijakan Penggusuran dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	63

4.3 Gambaran Informan	68
HASIL DAN PEMBAHASAN	77
5.1 Proses dan Tindakan Pemerintah Kota Kediri dalam menerapkan Kebijakan Penggusuran dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri.....	78
5.2 Respon Warga RW 5 Dengan Pemerintah Terhadap Kebijakan Penggusuran dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.....	92
5.2.1 Penolakan Kebijakan Penggusuran Warga RW 5 Sebagai Lebenswelt	92
5.2.2 Tindakan Komunikatif dan Diskursus Atas Kebijakan Penggusuran dan Pembangunan RTH.....	101
5.2.3 Strategi Baru Warga RW 5 Menanggapi Kebijakan Penggusuran	116
PENUTUP	125
6.1 Kesimpulan.....	125
6.2 Saran.....	127
6.2.1 Saran Akademis	127
6.2.1 Saran Praktis	128
DAFTAR PUSTAKA	vi

ABSTRACT

Eldira Fitri Ayu Damayanti (2018). Sociology Department, Faculty of Social and Political Science, Brawijaya University of Malang. Formation of Public Space And Response Citizens with Government In Eviction Policy Implementation and Green Open Space Development in Region Ex-localization of Kediri. Advisors : Ahmad Imron Rozuli and Nike Kusumawanti

This research explains the establishment of public spaces and the responses of RW5 and government residents to the policy of evictions and the development of green open spaces in the territories of ex-localization as a means of trying to defend their homes. The aim of this research is to analyze the establishment of public space as well as the response of the residents of RW 5 Kelurahan Semarang Kota Kediri with the government in maintaining their land related to the implementation of the policy of local area eviction and green open space development by building consensus

The focus of this research is in the establishment of public spaces as well as the response of the public and government constructed by building consensus, where consensus building is used as a form of resistance citizen to defend the land where he lived on the eviction policy implementation and development of green open space in the area of localization. In analyze process, the researcher used Jurgen Habermas's discourse theory. The method used in this research is qualitative with case study approach. In data collection techniques this research used observation, interview (indepth interview), and documentation

The results of this study indicate that RW 5 residents with their lebenswelt opposite to the government lebenswelt attempted to be united by conducting a discourse process with the government to get a mutual agreement in rejecting the eviction policy. However, the process of discourse between citizens and the government, especially the DPRD does not result in an agreement that can change the implementation of the policy. The agreement generated through the process of discourse is only a form of discussion alone without affecting the policy. This happens because the government with its proxy actually take strategic action to force the citizens to obey the policy. This is because the discourse of citizens does not involve the government as a party that has the power. The agreement that has been formed is not communicated to the government, so there is no public space related to the policy. The absence of this public space also reflects that the Government of Kediri City has not run a deliberative democracy. In addition, there is an issue of the eviction policy in RW 5 responded by the citizens by creating a new strategy by conducting a discourse process with the Government so that both parties can understand each other.

Keywords : *Policy, Discourse, Lebenswelt, Public Space, Localization*

ABSTRAK

Eldira Fitri Ayu Damayanti (2018). Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Pembentukan Ruang Publik Serta Respon Warga Dengan Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Penggusuran dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Eks-Lokalisasi Kota Kediri. Pembimbing : Ahmad Imron Rozuli dan Nike Kusumawanti

Penelitian ini menjelaskan mengenai pembentukan ruang publik serta respon warga RW 5 dan pemerintah atas kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah eks-lokalisasi sebagai bentuk upaya mempertahankan tempat tinggalnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pembentukan ruang publik serta respon warga RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri dengan pemerintah dalam mempertahankan lahan tempat tinggalnya terkait implementasi kebijakan penggusuran wilayah lokalisasi dan pembangunan ruang terbuka hijau dengan membangun konsensus.

Fokus penelitian ini terletak pada pembentukan ruang publik serta respon yang dibangun masyarakat dan pemerintah dengan membangun konsensus, yang mana konsensus yang terbangun ini dijadikan sebagai bentuk resistensi warga untuk mempertahankan lahan tempat tinggalnya atas implementasi kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokalisasi. Dalam proses analisis, peneliti menggunakan teori Diskursus milik Jurgen Habermas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara (*indepth interview*), dan dokumentasi

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa warga RW 5 dengan *lebenswelt*-nya yang bertolak belakang dengan *lebenswelt* pemerintah berupaya disatukan dengan melakukan proses diskursus dengan pihak pemerintah untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam melakukan penolakan kebijakan penggusuran tersebut. Namun proses diskursus antara warga dan pemerintah khususnya pihak DPRD tidak menghasilkan suatu kesepakatan yang dapat merubah implementasi kebijakan. Kesepakatan yang dihasilkan melalui proses diskursus ini hanya menjadi bentuk diskusi saja tanpa mempengaruhi kebijakan. Hal ini terjadi karena pemerintah dengan kuasanya justru melakukan tindakan strategis untuk memaksa warga agar mentaati kebijakan tersebut. Kesepakatan yang telah terbentuk tidak tersampaikan kepada pemerintah, sehingga tidak ada ruang publik terkait kebijakan tersebut. Tidak adanya ruang publik ini juga mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Kediri belum menjalankan demokrasi deliberatif. Selain itu adanya isu kebijakan penggusuran lanjutan di RW 5 ditanggapi warga dengan membuat strategi baru dengan melakukan proses diskursus dengan Pemerintah agar kedua pihak dapat saling memahami.

Kata kunci : Kebijakan, Diskursus, *Lebenswelt*, Ruang Publik, Lokalisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan prostitusi telah menjadi salah satu masalah sosial di Indonesia. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki suatu wilayah yang dijadikan sebagai tempat praktik prostitusi. Tindakan prostitusi ini sudah lama ada pada masyarakat Indonesia. Untuk menjalankan tindak prostitusi, biasanya terdapat suatu wilayah khusus yang dijadikan sebagai pusat kegiatan prostitusi dengan nama lain yaitu wilayah lokalisasi. Menurut Soedjono (Issabela dan Wiwin, 2010) mengartikan lokalisasi sebagai bentuk usaha untuk mengumpulkan segala macam kegiatan pelacuran dalam satu wadah.

Pemerintah daerah mulai memberi penegasan atas larangan adanya tindakan prostitusi, baik dengan menggunakan langkah represif maupun langkah preventif. Larangan atas tindak prostitusi ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296 yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Adanya tindakan tegas dari pemerintah ini juga dikarenakan ketidaksesuaian kegiatan prostitusi dengan kondisi nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat di Indonesia dan juga kegiatan prostitusi dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar khususnya pada anak yang masih dibawah usia.

Adapun tindakan – tindakan tegas dari pemerintah ini salah satunya yaitu dengan memunculkan suatu kebijakan terkait keberadaan lokalisasi di suatu daerah dengan melakukan penutupan atau bahkan hingga penggusuran daerah lokalisasi. Pada beberapa daerah dalam mengatasi keberadaan lokalisasi, pemerintah daerah banyak yang melakukan penutupan lokalisasi guna untuk menghilangkan adanya tindak prostitusi di daerahnya. Namun dalam penerapannya, penutupan lokalisasi ini tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada beberapa daerah yang menjadi sasaran penutupan lokalisasi justru melakukan tindak prostitusi secara diam-diam. Hal ini yang juga membuat kebijakan penutupan lokalisasi ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga hal ini membuat pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam membuat kebijakan terkait keberadaan lokalisasi, yaitu salah satunya dengan melakukan penggusuran wilayah lokalisasi yang juga harapannya dapat menghilangkan kegiatan ilegal tersebut.

Dalam implementasi kebijakan yang dibuat terkait keberadaan lokalisasi ini melibatkan dua aktor yaitu pihak pemerintah dan pihak warga. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu daerah, pemerintah berhak mengeluarkan suatu kebijakan yang dianggap pantas untuk proses pembangunan di daerahnya. Kebijakan ini pada akhirnya akan diperuntukkan bagi masyarakat, sehingga akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Adanya kebijakan dari pemerintah terkait keberadaan lokalisasi ini tidak lepas dari adanya pro dan kontra antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Masih banyak masyarakat khususnya warga eks lokalisasi yang menolak dengan kebijakan pemerintah untuk menghilangkan tempat prostitusi tersebut. Hal ini

dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah masih belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga. Seperti halnya dana kompensasi atau kegiatan pelatihan bagi para PSK yang dianggap tidak menarik dan tidak dapat mencukupi kebutuhan warga kedepannya, karena warga khususnya para PSK tidak memiliki keahlian di bidang lain. Seperti yang terjadi di lokalisasi Dolly-Jarak, dimana para PSK dan Mucikari ada yang menerima dan ada yang menolak pemberian dana kompensasi dan kegiatan pelatihan. Hal ini dikarenakan pemberian dana masih dianggap terlalu sedikit dan belum bisa mencukupi kebutuhannya kelak. Sedangkan warga yang menolak kegiatan pelatihan dikarenakan pelatihan yang diberikan hanya sebatas memberi pengetahuan saja tanpa ada tindak lanjut (Fantoko, 2016). Tidak hanya di Dolly, hal serupa juga terjadi di Puger Kulon Kabupaten Jember dimana juga terdapat kebijakan penutupan lokalisasi yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru seperti meningkatnya kriminalitas, menurunnya tingkat pendapatan, praktik prostitusi terselubung, dan lainnya (Fauzi, 2012).

Selain itu, kebijakan pemerintah untuk menghilangkan tempat prostitusi ini juga tidak dapat menyelesaikan berbagai masalah prostitusi. Seperti yang diberitakan oleh Kartika (2014) yang menyatakan bahwa penutupan prostitusi justru menimbulkan masalah baru yaitu dengan sulitnya mengontrol penyebaran virus HIV. Di sisi lain, adanya tempat prostitusi justru membuat pemantauan HIV lebih mudah karena bisa diketahui di lokasi itu juga. Kebijakan penutupan lokalisasi ini tidak dapat dikatakan berhasil untuk mengurangi tindakan prostitusi. Menurut Handayani (2016) Dengan adanya penutupan lokalisasi tidak akan mengurangi peminat jasa seks tersebut. Selain itu penutupan lokalisasi ini justru

membuat para penyedia layanan seks melakukan aksinya dengan cara yang terselubung atau bahkan melalui media online. Kebijakan itu bisa disebut sebagai ucapan selamat datang untuk prostitusi *online*.

Dari adanya berbagai masalah akibat penutupan lokalisasi ini menandakan bahwa kebijakan penutupan lokalisasi tidak bisa menyelesaikan inti permasalahan, justru kebijakan ini menimbulkan banyak masalah-masalah baru yang lebih kompleks, hal ini dikarenakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya tidak memahami kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Dalam membentuk suatu kebijakan yang juga menyangkut kesejahteraan masyarakat, pemerintah seharusnya menjalin suatu komunikasi yang cukup intensif dengan masyarakat agar pemerintah sendiri dapat memahami apa yang diinginkan masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat dapat bersifat merata. Namun ketika pemerintah membuat suatu kebijakan atas berdasarkan pemikirannya saja tanpa memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat, maka kebijakan yang dibentuk akan bersifat timpang karena tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat. Akibat implementasi kebijakan yang sepihak salah satunya yaitu dengan timbulnya masalah baru antara masyarakat dan pemerintah.

Sebagai negara demokrasi yang mana dalam pelaksanaannya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, seharusnya pemerintah daerah dalam membuat kebijakan juga melibatkan masyarakat, sehingga adanya kebijakan-kebijakan baru yang dibuat adalah hasil olah pikir antara pihak pemerintah dan juga masyarakat. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga akan ditujukan kepada masyarakat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat maka akan meminimalisir kemungkinan terbentuknya masalah-masalah baru dan juga

ketimpangan. Pihak pemerintah juga perlu untuk menyediakan suatu ruang dimana masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya ketika pemerintah berupaya untuk membuat suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diinginkan dan dapat bersifat adil serta merata.

Namun dalam pelaksanaannya sistem demokrasi ini tidak terjadi pada seluruh lapisan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di kawasan Kalijodo, dimana kawasan tersebut menjadi salah satu wilayah sasaran pemerintah dalam melakukan penertiban keberadaan lokalisasi dengan melakukan penggusuran, namun dalam pelaksanaannya pemerintah tidak membangun suatu komunikasi dengan masyarakat. Seperti yang diberitakan dalam Liputan 6 yang menyatakan bahwa Ahok tidak akan melakukan dialog atau kompromi atas penutupan kalijodo, hal ini dilakukan untuk mengalihfungsikan kawasan itu sebagai ruang terbuka hijau (Haryanto, 2016). Sama halnya dengan kawasan Kalijodo, Kota Kediri yang juga sebagai wilayah kesatuan Negara Indonesia, untuk menetapkan suatu kebijakan pemerintah seharusnya bisa menerapkan suatu komunikasi antara masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan musyawarah. Dengan adanya musyawarah ini yang menekankan konsensus dan kesepakatan bersama akan bersifat adil bagi seluruh warga dan kebijakan yang diterapkan tidak bersifat timpang dan mementingkan suatu kelompok saja.

Namun dalam pelaksanaannya tidak demikian, Pemerintah Kota Kediri membuat suatu kebijakan yaitu penggusuran wilayah lokalisasi yang juga akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. Sama halnya seperti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di daerah lainnya terkait keberadaan lokalisasi yaitu dengan melakukan penutupan lokalisasi, pemerintah Kota Kediri juga telah membuat

kebijakan penutupan lokalisasi ini, namun dalam pelaksanaannya kebijakan penutupan ini tidak dihiraukan oleh masyarakat dan kegiatan prostitusi pun masih berjalan secara tersembunyi. Sehingga hal ini membuat pemerintah Kota Kediri untuk memberikan tindakan tegas dengan membuat kebijakan penggusuran di wilayah lokalisasi. Kebijakan penggusuran wilayah lokalisasi oleh pemerintah ini bertujuan untuk menghilangkan citra buruk dari Kota Kediri. Terlebih Kota Kediri yang juga sering dikatakan sebagai salah satu kota santri seperti yang dituliskan oleh Rozikun (2017) bahwa Pondok Pesantren Lirboyo Kediri adalah pondok pesantren salaf terbesar di Jawa Timur, yang akan sangat tidak sesuai jika di Kota Kediri terdapat tempat kegiatan prostitusi. Selain itu, dibarengi dengan rencana Pemerintah Provinsi dan Dirjen Rebsos yang diberitakan dalam Republika.co.id (Rahajo, 2012) Pemprov dan Dirjen ingin menangani permasalahan prostitusi khususnya di daerah Jawa Timur. Dalam pembuatan kebijakan tersebut yang menyangkut kehidupan masyarakat, pemerintah justru tidak membangun suatu komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga kebijakan yang dijalankan justru dapat merugikan dan menyengsarakan masyarakat dan tidak terbentuknya suatu keadilan sosial.

Pada pelaksanaannya, kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau ini dilakukan di wilayah lokalisasi Kelurahan Semampir Kota Kediri khususnya di kawasan RW 5. Status tanah yang ada di lokasi ini adalah eugendom atau aset tanah pemerintah yang disewakan kepada warga dengan hak guna pakai dan adanya penarikan iuran sewa tanah. Namun ada beberapa warga di desa Jongbiru yang juga bersebelahan dengan RW 5 yang telah merubah status tanah negara tersebut menjadi hak milik. Hal ini yang menjadi dilema bagi warga

RW 5 terhadap kebijakan penggusuran tersebut sehingga mereka melakukan penolakan dengan melakukan aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi ini dilakukan untuk meminta pemerintah agar menunda penggusuran dan memohon untuk mengubah hak tanah eugendom¹ menjadi hak milik, dengan alasan ada warga lain yang bisa mendapatkan sertifikat hak milik dan mereka merasa telah menempati bangunan tersebut sejak lama. Banyak dari warga yang merasa cemas dan rugi karena mereka sudah membangun rumah dengan susah payah namun pemerintah dengan kebijakannya akan melakukan penggusuran. Namun aksi demonstrasi warga ini tidak membawa hasil secara langsung, dan bahkan pengajuan warga atas hak tanah pada sidang pengadilan juga dinyatakan kalah. Hingga pada akhirnya pemerintah Kota Kediri tetap melakukan penggusuran wilayah lokalisasi khususnya pusat kegiatan prostitusi di RW 5 yang juga akan dibangun ruang terbuka hijau.

Adanya kegiatan penggusuran ini pada dasarnya pemerintah memberikan uang kerohiman² bagi warga sebesar 7.5 juta per KK dan mengarahkan warga untuk tinggal di rusunawa Kota Kediri. Namun warga tetap menolak mengenai uang kerohiman tersebut yang dianggap masih kurang dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan warga, selain itu warga eks lokalisasi juga mendapat penolakan dari warga rusunawa karena takut mendapat stigma negatif dan pemerintah juga tidak pernah mensosialisasikan bahwa rusunawa akan digunakan tempat tinggal warga eks lokalisasi. Sehingga penggusuran ini juga memberikan dampak buruk bagi warga yang tergusur. Dampak yang muncul yaitu warga

¹ Tanah eugendom adalah istilah Belanda yang mengartikan tentang kepemilikan tanah yang mutlak, dimana tanah eugendom di RW 5 ini adalah tanah hak milik Pemerintah Kota Kediri

² Dana kerohiman merupakan dana yang diberikan pemerintah sebagai pemilik lahan kepada warga sebagai bentuk ganti rugi atas adanya kebijakan penggusuran

merasa kebingungan untuk mendapatkan tempat tinggal, pengangguran, kemiskinan, dan bahkan kesehatan yang terganggu.

Selain RT 29 dan RT 30, penggusuran ini akan dilaksanakan lagi pada RT 31 dan RT 32 sebagai bentuk perluasan ruang terbuka hijau namun untuk waktu eksekusi belum dipastikan secara tepat. Seperti yang dikatakan oleh Komisi A DPRD Kota Kediri dalam Masyhari (2016) Pemkot Kediri pada tahun anggaran ini memastikan akan memanfaatkan wilayah RW 5 Semampir untuk ruang terbuka hijau (RTH).

Sama halnya dengan kebijakan penggusuran yang terjadi di wilayah lokalisasi, adanya isu kebijakan penggusuran lanjutan yang akan dibangun sebagai ruang terbuka hijau juga tidak ada pemberitahuan dari pemerintah. Bahkan biaya sewa warga juga sudah diberhentikan secara sepihak sebagai bentuk peringatan dari pemerintah bahwa lahan tersebut sudah tidak disewakan lagi dan akan dijadikan ruang terbuka hijau. Pemerintah hanya menetapkan kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau tanpa adanya musyawarah atau pembicaraan lebih jauh dengan warga. Sehingga tidak ada kesepakatan mengenai hak tanah kedepannya atau kompensasi yang akan didapatkan warga. Dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang jelas antara warga dan pemerintah, hal ini membuat warga RW 5 melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang ingin menggusur wilayah eks lokalisasi dan dibangunnya ruang terbuka hijau. Pada saat ini masih belum ada tindakan dari pemerintah untuk pembangunan RTH, lahan eks lokalisasi yang telah digusur hanya ditanami pohon. Hal ini yang juga membuat warga merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah karena lahan bangunan yang sudah digusur masih belum ada tindakan apapun untuk

pembangunan RTH dan Pemerintah juga belum memberi kepastian kepada warga. Pada implementasi kebijakan penggusuran wilayah lokalisasi ini, warga RW 5 lah yang pada akhirnya dikalahkan. Hal ini dikarenakan warga RW 5 yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa menolak kebijakan penggusuran ini, seperti tidak adanya kepemilikan hak tanah yang sah. Sedangkan pemerintah yang memiliki kuasa cenderung untuk memaksa kepentingannya kepada masyarakat.

Dengan adanya penolakan atas kebijakan penggusuran dan pembangunan RTH yang dibuat oleh Pemkot Kediri, warga RW 5 kelurahan Semampir justru menciptakan satu pola pikir yang sama diantara mereka. Warga memiliki satu konsensus atau pandangan yang sama dalam upayanya menolak kebijakan pemerintah tersebut. Salah satu bentuk konsensus yang terbangun adalah adanya keinginan yang sama dari seluruh warga untuk mempertahankan lahan tempat tinggalnya dengan berbagai macam cara. Selain itu warga juga meminta tuntutan-tuntutan kepada pemerintah atas adanya kebijakan tersebut. Berdasarkan pemaparan salah satu warga, mereka akan tetap mempertahankan tempat tinggalnya apapun yang terjadi dan bagaimanapun caranya. Namun hal ini bertolak belakang dengan pola pikir pemerintah yang beranggapan bahwa wilayah lokalisasi harus dihilangkan karena kegiatan prostitusi tidak sesuai dengan nilai dan norma.

Seperti halnya kebijakan penggusuran yang telah dilaksanakan pada wilayah lokalisasi, dimana juga terdapat penolakan dari warga dengan melakukan berbagai cara seperti demonstrasi dan bahkan wargapun memiliki simbol atau tanda tersendiri untuk menggambarkan bahwa mereka menolak kebijakan penggusuran tersebut. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi warga RW 5

untuk melakukan hal yang serupa untuk mempertahankan lahan tempat tinggalnya. Rasa semangat dari warga untuk menolak kebijakan pemerintah ini menjadi salah satu bentuk konsensus yang terbangun pada warga RW 5.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengetahui respon warga dalam mempertahankan tempat tinggalnya atas adanya kebijakan pengrusakan wilayah lokalisasi dan pembangunan ruang terbuka hijau oleh Pemkot Kediri. Dengan terlihatnya respon yang terbangun pada warga RW 5 akan terlihat bagaimana arah dan tujuan dari tindakan warga. Teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini menggunakan teori diskursus Jurgen Habermas. Dalam teori diskursus ini juga menekankan pada konsensus dengan pengetahuan intersubjektif dalam sebuah komunikasi argumentatif sehingga kebenaran dapat diterima oleh semua pihak dan mendapatkan kebenaran yang sejati. Menurut Hardiman (2009) Habermas menganggap tindakan komunikatif yakni tindakan yang terarah pada konsensus-lebih fundamental daripada tindakan strategis untuk menghasilkan mekanisme koordinasi sosial.

1.1 Rumusan Masalah

Untuk mencapai sebuah sistem demokrasi yang menciptakan keadilan sosial diperlukan adanya komunikasi yang bersifat deliberatif baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dapat dilakukan pada pembuatan suatu kebijakan, dimana pemerintah juga harus berkomunikasi dengan masyarakat sebagai penerima kebijakan, sehingga kebijakan yang dijalankan tidak berat sebelah atau timpang pada salah satu pihak. Namun ketika suatu kebijakan tidak disampaikan dengan baik dan tidak dapat diterima oleh masyarakat, justru akan menimbulkan masalah baru seperti penolakan terhadap kebijakan. Seperti halnya warga RW 5 Kelurahan Semampir yang melakukan penolakan terhadap kebijakan

penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau yang dibuat oleh pemerintah sebagai upayanya dalam mempertahankan tempat tinggalnya. Dari pemaparan masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan ruang publik dalam implementasi kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah eks lokalisasi?
2. Bagaimana warga RW 5 dan pemerintah dalam merespon kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah eks lokalisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas kemudian akan diuraikan mengenai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Penelitian ini berusaha menganalisis pembentukan ruang publik serta respon warga RW 5 kelurahan Semampir Kota Kediri yang terkenal dengan lokalisasinya dalam mempertahankan lahan tempat tinggalnya dengan pihak pemerintah terkait adanya kebijakan penggusuran wilayah lokalisasi dan pembangunan ruang terbuka hijau.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat bagi ranah akademis maupun ranah praktis. Kemudian akan di jelaskan mengenai manfaat ini berdasar kategori manfaat akademis dan praktis, yaitu:

- 1.4.1 Manfaat Akademis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi ilmiah bagi kalangan akademisi mengenai kajian terkait pembentukan ruang publik serta respon warga dalam mempertahankan lahan tempat tinggalnya

dengan pemerintah terkait kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau. Selain itu juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pembentukan ruang publik serta respon yang dilakukan warga untuk mempertahankan lahan dengan pemerintah ditengah kebijakan penggusuran oleh pemerintah. Singkatnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi atau memberi sumbangan pemikiran bagi ranah akademis.

1.4.2 Manfaat Praktis : Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas tentang pembentukan ruang publik serta respon yang dilakukan oleh warga untuk mempertahankan lahan dengan pemerintah ditengah kebijakan penggusuran oleh pemerintah. Selain itu dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk kritik terhadap pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Sehingga dari penelitian ini bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat atau menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan Penelitian sangat diperlukan adanya penelitian terdahulu, yang mana peneliti terdahulu ini digunakan untuk menjadi bandingan dan rujukan bagi peneliti diketahui posisi penelitian peneliti kali ini. Dalam penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini lebih melihat pada kebijakan penutupan lokalisasi sehingga penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini dalam melihat kebijakan terkait keberadaan lokalisasi. Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Laela Destri Endri E dengan judul *Tindakan Ekonomi Masyarakat Pasca Kebijakan Penutupan Lokalisasi Moro Seneng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang*. Dalam penelitian ini, Laela menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori tindakan pilihan rasional James Coleman. Dalam menentukan informan, penelitian Laela menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian tersebut membahas mengenai tindakan ekonomi masyarakat khususnya pemilik wisma, para PSK, dan masyarakat yang bekerja di sekitar lokalisasi pasca kebijakan penutupan lokalisasi Moro Seneng. Hal ini juga dikarenakan penutupan lokalisasi juga memberikan dampak bagi masyarakat.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran bagaimana tindakan ekonomi masyarakat sekitar lokalisasi pasca kebijakan penutupan lokalisasi Moro Seneng. Selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implikasi atas kebijakan penutupan lokalisasi Moro Seneng dan pilihan alternatif tindakan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Hasil dari

penelitian ini yaitu teori pilihan rasional lebih menekankan pada aktor dan sumberdaya yang dimilikinya. Tindakan ekonomi yang dilakukan aktor dipengaruhi oleh sumberdaya yang dimilikinya. Seperti pemilik wisma yang memiliki sumberdaya lahan sehingga digunakan sebagai tempat karaoke dan juga masyarakat yang memiliki modal usaha toko atau warung sebagai sumberdaya yang akan dijualnya. Para aktor melakukan tindakan ekonomi dengan beralih menjadi kawasan karaoke dan cafe pasca penutupan lokalisasi, dan hal ini juga telah disepakati bersama dengan pihak pemerintah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengkaji bentuk kebijakan pemerintah terhadap keberadaan lokalisasi dan keadaan pasca pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih fokus pada tindakan ekonomi masyarakat sebagai bentuk pilihan rasionalnya untuk bertahan hidup pasca kebijakan penutupan lokalisasi dengan beralih menjadi usaha karaoke dan cafe. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada proses pembentukan ruang publik dan juga pada respon masyarakat dengan pemerintah atas kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokalisasi dalam membangun konsensus sebagai untuk mempertahankan lahan tempat tinggalnya.

Penelitian terdahulu selanjutnya juga membahas mengenai kebijakan pemerintah mengenai keberadaan lokalisasi oleh Ismiasih Wahyu Ulfiani dengan judul *Post Dolly (Studi Dinamika Peran, Respon, dan Proses Adaptasi Masyarakat Lokalisasi Setelah Kebijakan Penutupan di Surabaya)*. Dalam penelitian ini, Ismiasih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teori struktural fungsional oleh R. K. Merton sebagai alat

analisis. Penelitian ini membahas mengenai dinamika dan respon yang ada pada masyarakat lokasi Dolly-Jarak setelah adanya kebijakan penutupan lokasi yang juga menggambarkan pola adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran serta penjelasan terkait bentuk adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Dolly-Jarak sebagai respon atas adanya kebijakan penutupan lokasi dan menganalisis bentuk adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat tiga bentuk upaya yang dilakukan sebagai implikasi atas kebijakan penutupan lokasi dan menggambarkan bentuk adaptif masyarakat. Pertama *Conformity*, yaitu tindakan yang dianggap sesuai dengan aturan yang dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan solusi yang diberikan pemerintah berupa lapangan pekerjaan di lingkup pemerintahan serta pelatihan berwirausaha. Kedua *Inovasi*, masyarakat yang cenderung tidak peduli dengan kebijakan penutupan lokasi ini lebih memilih menggunakan caranya sendiri untuk mempertahankan kepentingan ekonominya. Ketiga *rebellion*, tindakan menyimpang dalam wujud pemberontakan ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan penutupan lokasi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengkaji mengenai kebijakan pemerintah terhadap keberadaan lokasi dan keadaan pasca pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu dengan alat analisisnya yang menggunakan teori struktural fungsional milik Merton lebih membahas mengenai bentuk adaptasi masyarakat atas kebijakan penutupan lokasi Dolly-Jarak. Sedangkan pada penelitian ini lebih melihat pembentukan ruang publik serta melihat respon

masyarakat dengan pemerintah atas kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokalisasi dalam membangun konsensus sebagai bentuk resistensi lahan tempat tinggalnya.

Penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan oleh Dian Ratnasari dengan judul *Tindakan Politik Basuki Tjahaja Purnama Dalam Membangun Good Governance Provinsi DKI Jakarta*. Pada penelitian ini menggunakan metode yaitu penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi pustaka, yang juga menggunakan teori Fungsional oleh T. Parsons sebagai alat analisis. Fokus dalam penelitian ini lebih kepada penjelasan mengenai tindak politik Ahok dalam membangun *Good Governance* yang dilakukan dengan salah satu caranya yaitu membuat kebijakan penggusuran lokalisasi kalijodo dan membangunnya menjadi ruang terbuka hijau.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat tindak politik yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat sebagai Gubernur dalam membangun *Good Governance* di DKI Jakarta yang salah satunya dengan melakukan penggusuran lokalisasi Kalijodo.

Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa tindakan politik yang dilakukan oleh Ahok dalam membangun *Good Governanace* yaitu dengan melakukan reformasi anggaran dengan mengajukan *e-budgeting* untuk memperbaiki penyusunan APBD Jakarta, lalu dengan membuat saluran air di Sungai Ciliwung untuk mengurangi tingkat banjir, dan yang terakhir yaitu dengan melakukan penggusuran di lokalisasi Kalijodo dan membangun ruang terbuka hijau. Mengacu pada teori fungsional Parsons, Ahok juga melakukan tindak politik berdasarkan konsep *Adaptation*, seperti ketika Ahok melihat bahwa terjadi

tindakan ilegal yang ada di kawasan lokalisasi Kalijodo sehingga pemerintah menciptakan kebijakan untuk melakukan penertiban dengan cara penggusuran serta mengubahnya menjadi ruang terbuka hijau. Sedangkan pada konsel *Goal Attainment*, tindak politik yang dilakukan oleh Ahok bertujuan untuk kebaikan masyarakat. Lalu konsep *Integration*, Ahok menjalankan tindak politiknya dibarengi dengan masyarakat serta aparat yang terkait agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada konsep yang terakhir *Laten Pattern Maintance* yaitu pemeliharaan tindak politik yang telah dilakukan Ahok dengan cara sistem kebudayaan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama – sama melihat kebijakan penggusuran lokalisasi menjadi sebuah objek kajian. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu lebih melihat tindak politik yang dilakukan oleh Ahok dalam menciptakan *Good Governance* dengan membuat beberapa kebijakan-kebijakan yang salah satunya dengan membuat kebijakan untuk menertibkan adanya lokalisasi di kawasan Kalijodo dengan melakukan penggusuran serta mengalihfungsikan kawasan tersebut menjadi salah satu ruang terbuka hijau.

Sedangkan penelitian ini berjudul *Diskursus Kebijakan Penggusuran dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Lokalisasi (Studi Resistensi Warga RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri)*. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang juga menggunakan teori Diskursus oleh Jurgen Habermas sebagai alat analisis. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive*. Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana respon masyarakat atas kebijakan

penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokalisasi dalam membangun konsensus sebagai bentuk resistensi lahan tempat tinggalnya. Posisi pada penelitian ini lebih mengarah pada pembahasan mengenai pembentukan ruang publik serta respon masyarakat dengan pemerintah atas kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokalisasi dalam membangun konsensus sebagai bentuk resistensi lahan tempat tinggalnya. Sehingga dalam penelitian ini akan terlihat bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan tidak selalu berjalan dengan baik, bahkan juga menimbulkan permasalahan baru, seperti adanya penolakan dari masyarakat.

Penolakan ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama atau konsensus dari warga melalui adanya suatu komunikasi yang terbentuk antar warga tidak dapat tersampaikan kepada pemerintah. Dengan adanya komunikasi yang terbangun, maka warga sepakat untuk memberikan tuntutan kepada pihak pemerintah atas kebijakan yang dibuat, seperti tuntutan warga yang meminta hak tanah menjadi hak milik pribadi selain itu warga juga menuntut pemerintah jika kebijakan tersebut dijalankan warga meminta kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan warga.

Dalam hal ini penggunaan teori diskursus milik Habermas digunakan untuk melihat bagaimana pembentukan ruang publik oleh warga dan pemerintah dalam merespon kebijakan pemerintah dan mempertahankan lahan tempat tinggalnya. Sehingga dari adanya tindakan komunikasi atau diskursus oleh warga dan pemerintah, dapat terlihat apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat dan kepentingan pemerintah atas adanya kebijakan penggusuran wilayah lokalisasi dan pembangunan ruang terbuka hijau ini, sehingga diharapkan dapat

terbentuk pula ruang publik sehingga dalam penerapan kebijakan tersebut dijalankan berdasarkan pandangan demokrasi yang deliberatif. Hal ini yang masih belum dijelaskan oleh penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian terdahulu hanya membahas mengenai tindakan ekonomi dan tindakan adaptif yang dilakukan oleh warga pasca kebijakan penutupan lokalisasi tanpa menjelaskan proses pembentukan ruang publik antara warga dan pemerintah dan respon atas kebijakan sehingga ruang publik dapat dijadikan sebagai cara warga dalam mengutarakan kebutuhannya, karena kebijakan ini selalu berkaitan dengan adanya pro dan kontra.

Penelitian ini bertujuan untuk menambahkan kebaruan bahasan mengenai adanya kebijakan pemerintah yang tidak hanya melakukan penutupan saja namun juga melakukan penggusuran wilayah lokalisasi, serta adanya pembentukan ruang publik antara masyarakat dan pemerintah dan respon atas kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah eks lokalisasi dengan melakukan proses diskursus yang tujuannya dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Hal ini dilihat melalui sudut pandang kritis dengan teori diskursus milik Jurgen Habermas yang juga berfokus pada proses diskursus yang dilakukan oleh warga dengan pemerintah sebagai bentuk responnya atas kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Komponen	Penulis			
	Laela Destri Endri E (2017)	Ismiasih Wahyu Ulfiani (2015)	Dian Ratnasari (2017)	Penulis (2017)
Judul Penelitian	Tindakan Ekonomi	Post Dolly (Studi	Tindakan Politik Basuki Tjahaja	Pembentukan Ruang publik

	Masyarakat Pasca Kebijakan Penutupan Lokalisasi Moro Seneng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang	Dinamika Peran, Respon, dan Proses Adaptasi Masyarakat Lokalisasi Setelah Kebijakan Penutupan di Surabaya).	Purnama Dalam Membangun <i>Good Governance</i> Provinsi DKI Jakarta	Serta Respon Warga dengan Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Penggusuran dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Eks-Lokalisasi Kota Kediri
Jenis Penelitian	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif (Studi Kasus)	Penelitian Pustaka (<i>library research</i>)	Kualitatif (Studi Kasus)
Fokus Penelitian	Tindakan ekonomi masyarakat khususnya pemilik wisma, para PSK, dan masyarakat yang bekerja di sekitar lokalisasi pasca kebijakan penutupan lokalisasi Moro Seneng	Dinamika dan respon yang ada pada masyarakat lokalisasi Dolly-Jarak setelah adanya kebijakan penutupan lokalisasi yang juga menggambarkan pola adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat	Tindak politik yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam membangun <i>Good Governance</i> di DKI Jakarta yang salah satunya dengan melakukan penggusuran lokalisasi Kalijodo	Pembentukan ruang publik serta respon masyarakat dan pemerintah terhadap implementasi kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau melalui proses diskursus warga sebagai bentuk resistensi lahan tempat tinggalnya
Teori	Teori Tindakan Pilihan Rasional (James Coleman)	Teori Struktural Fungsional (Robert K. Merton)	Teori Fungsionalis (T. Parsons)	Teori Diskursus (Jurgen Habermas)
Hasil	• Tindakan	Terdapat tiga	Tindak politik	Dalam

Penelitian	<p>ekonomi yang dilakukan aktor dipengaruhi oleh sumberdaya yang dimilikinya. Seperti pemilik wisma yang memiliki sumberdaya lahan sehingga digunakan sebagai tempat karaoke dan juga masyarakat yang memiliki modal usaha toko atau warung sebagai sumberdaya yang akan dijualnya</p>	<p>bentuk upaya yang dilakukan sebagai implikasi atas kebijakan penutupan lokalisasi dan menggambarkan bentuk adaptif masyarakat. Pertama Conformity, yang dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan solusi yang diberikan pemerintah berupa lapangan pekerjaan di lingkup pemerintahan serta pelatihan berwirausaha. Kedua Inovasi, dengan menggunakan caranya sendiri untuk mempertahankan kepentingan ekonominya tanpa peduli dengan kebijakan. Ketiga rebellion, tindakan menyimpang dalam wujud</p>	<p>Ahok dalam membangun Good Governance selama menjabat sebagai Gubernur DKI berdasar pada banyaknya tindakan atau kebijakan yang dilakukan, seperti salah satunya dengan melakukan penggusuran lokalisasi Kalijodo yang diubah menjadi Ruang Terbuka Hijau. Good Governance diciptakan untuk membentruk pemerintah yang bersih yang didalamnya terdiri dari prinsip partisipasi, supermasi hukum, transparansi, akuntabilitas</p>	<p>mempertahankan tempat tinggal, mayoritas warga RW 5 dengan latar belakang atau <i>lebenswelt</i> yang berbeda dengan pihak pemerintah berupaya melakukan proses diskursus guna menghasilkan konsensus atas adanya kebijakan penggusuran tersebut. Namun dalam proses diskursus yang dilaksanakan, tidak pula terbangun ruang publik karena tidak terbentuk kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu dalam menanggapi adanya kebijakan penggusuran lanjutan, warga RW 5 berupaya untuk membangun proses diskursus antara warga dengan Pemerintah sehingga ruang</p>
-------------------	--	---	--	---

		pemberontakan ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan penutupan lokalisasi.		publik dapat tercipta dan menghasilkan kesepakatan yang dirasa adil, serta tidak melakukan penolakan secara <i>ekstrim</i> .
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih fokus pada tindakan ekonomi masyarakat sebagai bentuk pilihan rasionalnya untuk bertahan hidup pasca kebijakan penutupan lokalisasi dengan beralih menjadi usaha karaoke dan cafe 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih membahas mengenai bentuk adaptasi masyarakat atas kebijakan penutupan lokalisasi Dolly-Jarak 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih melihat pada upaya Ahok dalam membangun Good Governance di DKI dengan membuat beberapa kebijakan yang salah satunya dengan melakukan pengusuran lokalisasi Kalijodo yang juga dalam penerapannya melibatkan masyarakat dan pihak terkait lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji proses pembentukan ruang publik dan melihat respon warga dengan pemerintah atas kebijakan pengusuran dan pembangunan Ruang terbuka hijau pada wilayah lokalisasi melalui diskursus yang dibangun sebagai bentuk resistensi lahan

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Diskursus Jurgen Habermas

Dalam penelitian ini menggunakan teori diskursus yang digagas oleh Jurgen Habermas sebagai alat analisis. Jurgen Habermas ialah salah satu tokoh generasi kedua Mazhab Frankfurt, dimana dalam generasi pertama teori kritis

mengalami kebuntuan. Hal ini dikarenakan pada Mazhab Frankfurt masyarakat modern menganggap bahwa kebenaran datang dari rasio (akal budi) sedangkan semakin seseorang mencari rasionalitas justru mereka akan terjebak pada irasionalitas (kesadaran palsu). Menurut Mc Charty kemunduran paradigma kesadaran ditanggapi Habermas dengan cara terang-terangan beralih pada paradigma bahasa-bahasa dan mengembangkan kerangka kerja kategoris dan sejumlah landasan normatif teori sosialnya dalam bentuk teori umum tindakan komunikatif (Habermas, 2006). Habermas melihat masyarakat ke depan yang dicirikan oleh kebebasan dan keterbukaan komunikasi (Wirawan, 2012). Habermas menjelaskan teorinya berdasarkan pada pandangan kritisnya mengenai bentuk komunikasi yang ada dalam masyarakat untuk mengarah pada pencapaian konsensus. Menurut Hardiman (2009:24) Habermas menyatakan bahwa teori diskursus sama sekali tidak menawarkan tujuan apapun yang harus dicapai oleh masyarakat, melainkan hanya cara atau prosedur untuk mencapai tujuan itu. Berdasarkan pernyataan tersebut, teori diskursus ini lebih melihat pada cara masyarakat dalam mencapai tujuannya, dimana cara atau prosedur yang dimaksudkan melalui bentuk komunikasi yang tepat sehingga tujuan dapat disepakati secara bersama.

Untuk menjelaskan teori diskursus, awal pemikiran Habermas bermula pada kritiknya terhadap filsafat barat yang lebih mengedepankan rasional. Namun Habermas melihat pandangan Mazhab Frankfurt ini masih mengedepankan rasional subjektif, dimana kebenaran datang dari pemikiran individu mengenai suatu pengetahuan. Dalam bukunya (Habermas, 12:2006) menyatakan bahwa istilah “rasional” diandaikan memiliki hubungan yang erat dengan pengetahuan,

namun pengetahuan dapat dikritik sebagai sesuatu yang tidak dapat diandalkan dan dipercayai. Hal ini yang menjadi bahan kritik dari Habermas dengan memunculkan teori diskursus. Menurut Hardiman (2009) Tolak ukur teori kritis Habermas yaitu berawal dari adanya filsafat kesadaran yang mana subjek yang mengenali dan menguasai objeknya secara monologal atau satu arah. Dalam bukunya (Hardiman, 2009:28)

Rasio praktis adalah kemampuan akal budi manusia untuk mengetahui baik buruknya suatu tindakan. Pengetahuan baik buruk suatu tindakan ini dilakukan oleh seseorang secara monologal dan tanpa adanya kesepakatan dengan subjek lainnya.

Namun bagi Habermas hal ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat modern saat ini. Sehingga Habermas berkontribusi untuk mengubah filsafat kesadaran menjadi paradigma teori komunikasi. Dengan paradigma teori komunikasi ini, Habermas berusaha memahami pengetahuan atau kebenaran yang didapat dari adanya konsensus sebagai proses komunikasi yang dibangun secara intersubjektif.

Habermas menganggap bahwa rasio praktis sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Habermas memunculkan rasio prosedural yang lebih menekankan pada cara atau prosedur komunikasi antar subjek yang disepakati secara intersubjektif untuk mencapai suatu tujuan (Hardiman, 2009:32). Sehingga rasio prosedural mendapatkan kebenaran melalui adanya pemahaman timbal balik antar subjek yang mana didalamnya seseorang mengeluarkan kebenaran tanpa adanya paksaan atau unsur kekuasaan, sehingga prosedur komunikasi ini dapat diterima secara intersubjektif. Dalam bukunya (Habermas, 1983:2006)

Rasio prosedural yang juga disebut dengan rasio komunikatif mengandung pengertian yang didasarkan pada pengalaman inti

yang bebas kendala, padu, dan menjembatani konsensus dimana berbagai partisipan yang terlibat melampaui pandangan subjektif mereka dan meyakinkan diri mereka akan kesatuan dunia objektif dan intersubjektif dunia-kehidupan mereka karena mereka telah memiliki keyakinan berdasarkan rasionalitas.

Menurut Hardiman (2009:36) Jika dalam mencapai suatu kebenaran terdapat unsur paksaan terhadap kehendak seseorang untuk mencapai suatu konsensus, hal ini disebut oleh Habermas sebagai tindakan strategis. Di sisi lain, Habermas mendambakan adanya masyarakat yang lebih bersifat rasional dengan caranya melakukan komunikasi yang didalamnya seseorang bebas menyatakan kebenarannya masing-masing dan juga berhak untuk menerima atau menolak suatu pernyataan, sehingga konsensus dapat dicapai. Melalui penjelasan tersebut, jika dikaitkan dengan permasalahan mengenai kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokasi Kota Kediri ini pemerintah lebih mengarah pada tindakan strategis. Hal ini terlihat bahwa pemerintah cenderung memaksa warga untuk mentaati kebijakan yang dibuat pemerintah dengan mengosongkan tempat tinggalnya agar penggusuran dapat berjalan, namun di sisi lain masyarakat tidak dapat menyatakan kepentingannya dan tidak ada konsensus yang tercapai antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu Habermas juga menjelaskan mengenai tindakan komunikatif (Habermas, 18-19:2006)

“Dalam konteks tindakan komunikatif hanya orang-orang yang bertanggung jawab, sebagai anggota komunitas komunikasi, yang dapat mengorientasikan tindakan mereka kepada klaim yang valid dan diakui secara intersubjektif. Selain itu seseorang dianggap rasional bukan hanya dia mampu mengemukakan suatu pernyataan, dan ketika dikritik mampu memberikan alasan dengan menunjukkan bukti-bukti yang memadai, namun juga karena dia

mengikuti suatu norma yang telah mapan dan ketika dikritik mampu menjelaskan suatu sudut pandang yang legitim.”

Dalam tindakan komunikatif ini juga terdapat cara-cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai suatu kesepahaman intersubjektif. Seperti yang dilakukan oleh warga RW 5 dimana mereka juga melakukan tindakan komunikatif dalam upayanya mempertahankan lahan tempat tinggalnya atas adanya penggusuran tersebut. Masyarakat saling berkomunikasi antar warga dan juga dengan pihak DPRD untuk mencapai suatu kesepakatan bersama mengenai adanya penggusuran yang salah satunya melalui proses musyawarah. Cara atau prosedur dalam tindakan komunikatif ini salah satunya yaitu disebut Habermas dengan *lebenswelt*. Menurut Habermas konsep *lebenswelt* diartikan sebagai dunia kehidupan.

Subjek yang bertindak komunikatif selalu sampai pada pemahaman dunia kehidupan, dimana latar belakang sosial ini berfungsi sebagai sumber definisi situasi dengan klaim validitasnya yang digunakan subjek dalam berakting (bertindak) secara komunikatif dalam mengatur konteks-konteks situasi yang juga memerlukan kesepakatan di dunia kehidupan mereka (Habermas, 89-90:2006) .

Lebenswelt membantu dalam pencapaian konsensus antar subjek, hal ini dikarenakan pengetahuan subjektif yang disatukan menjadi sebuah prosedur untuk mencapai konsensus. *Lebenswelt* yang dijadikan sebagai pengetahuan dasar subjek untuk mencapai kebenaran melalui tindakan komunikasi, maka subjek tersebut telah berupaya untuk menjadi subjek yang rasional dan melepaskan diri dari kolonisasi sistem atas *lebenswelt*. Karena pada dasarnya sistem dan *lebenswelt* pada masyarakat tradisional memiliki porsi yang setara, namun setelah berkembangnya sistem terjadilah kolonisasi sistem atas *lebenswelt*. Menurut

Hardiman (2009) *Lebenswelt* menciut karena didesak oleh sistem yang menjadi semakin rumit, sementara dalam proses perkembangan ini sistem justru memperoleh otonominya yang semakin besar. Menurut Arif (2016:158) kolonisasi negara atas masyarakat merupakan kolonisasi dalam ranah politik, yang menjadi bagian dari *kolonisasi sistem atas lebenswelt* secara umum. Sehingga dari sinilah Habermas menegaskan bahwa perpaduan antara sistem dan *lebenswelt* dapat seimbang melalui adanya tindakan komunikatif yang lebih bersifat rasional.

Jika dikaitkan dengan konteks penelitian, tindakan komunikatif ini juga dilakukan oleh warga RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri untuk membentuk suatu konsensus sebagai bentuk perlawanannya terhadap kebijakan pemerintah melalui berbagai cara seperti adanya musyawarah baik antar warga maupun dengan pihak pemerintah. Para warga memiliki pandangan yang sama sebagai bentuk dari *lebenswelt*, yaitu sama-sama ingin mempertahankan lahan tempat tinggalnya sehingga mereka akan melakukan suatu tindakan untuk mewujudkannya. Namun *lebenswelt* warga bertolak belakang dengan *lebenswelt* pemerintah, dimana pemerintah menginginkan Kota Kediri untuk bersih dari lokalisasi dengan melakukan penggusuran. Karena pemerintah lebih memiliki kuasa yang tinggi maka pemerintah cenderung memaksa masyarakat dengan *lebensweltnya* yang berbeda untuk memahami *lebenswelt* pemerintah. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kolonisasi sistem negara atas *lebenswelt* masyarakat.

Dalam menjelaskan tindakan komunikasi ini, dalam Hardiman (2009:43) Habermas membedakan dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi naif dan komunikasi reflektif.

Komunikasi naif merupakan bentuk komunikasi dimana subjek tidak berupaya mempertanyakan tentang suatu alasan, kejelasan atau pernyataan dan kebenaran terhadap pernyataan tersebut hanya diandaikan saja. Sedangkan komunikasi reflektif merupakan bentuk komunikasi yang didalamnya subjek berupaya mempertanyakan klaim kesahihan dan menuntut penjelasan dari suatu pernyataan agar dapat disepakati secara intersubjektif.

Seperti yang terjadi pada warga RW 5 dalam mempertahankan lahan tempat tinggalnya tidak semua warga melakukan komunikasi yang bersifat reflektif, namun juga ada beberapa warga yang lebih mengarah pada komunikatif naif. Warga yang melakukan tindak komunikatif naif ini cenderung menerima adanya kebijakan pengusuran tersebut.

Sehingga dalam komunikasi reflektif ini memunculkan tindakan komunikatif yang bersifat argumentatif antar subjek yang mana kebenarannya akan bersifat objektif dan ketepatannya diterima bersama secara intersubjektif serta akan minim akan kepentingan subjektif, hal ini yang disebut habermas dengan diskursus. Menurut Hardiman (2009:45) Diskursus ini menjadi lanjutan dari tindakan komunikatif, dengan caranya argumentatif dalam komunikasi yang menuntut penjelasan rasional dan akan menjadi kritis. Sedangkan menurut Simanungkalit (2014) menjelaskan bahwa dalam teori diskursus klaim-klaim kesahihan yang terbuka akan kritik direfleksikan secara lebih mendalam dengan menganalisis struktur argumentasi. Menurut Habermas (23:2006) menyatakan bahwa “kekuatan” argumen pada konteks tertentu diukur berdasarkan masuk akal nya alasan itu dapat dilihat diantaranya dalam kemampuan suatu argumen untuk meyakinkan partisipan dalam diskursus agar mereka mau menerima klaim validitas tersebut. Dalam teori diskursus menjelaskan bahwa dalam mencapai suatu kesepakatan atau konsensus dapat dilakukan melalui komunikasi yang tiap

individu dapat mempertanyakan suatu pernyataan, sehingga kebenaran atau kesahihan yang didapat tidak mengandung adanya paksaan. Dalam hal ini, Habermas mengemukakan teori diskursus bertujuan agar masyarakat modern tidak terjebak pada kebenaran yang berasal dari rasio seseorang dan cenderung menerimanya tanpa mempertanyakan. Dengan teori diskursus ini Habermas menginginkan masyarakat lebih bersifat kritis dalam menerima suatu kebenaran, sehingga kebenaran tersebut pada akhirnya dapat diterima bersama tanpa adanya paksaan.

Habermas membedakan diskursus menjadi dua, yaitu diskursus teoritis dan diskursus praktis.

Dalam diskursus teoritis orang lebih mempermasalahkan klaim kebenaran pernyataan-pernyataan teoritis-empiris, sedangkan dalam diskursus praktis lebih mempersoalkan klaim ketepatan pernyataan-pernyataan normatif. Sehingga dalam suatu pernyataan untuk mendapatkan kesahihannya harus memiliki kebenaran dan ketepatan yang telah disepakati secara intersubjektif (Hardiman, 2009:45).

Dalam diskursus teoritis, Habermas menjelaskan (24:2006) bahwa seseorang dapat dikatakan rasional ketika dia dapat menjustifikasi tindakan-tindakannya dengan mengacu kepada konteks-konteks normatif yang ada tanpa adanya kepentingan diri sendiri melainkan benar-benar ingin menilai pendapat berdasarkan sudut pandang moral dan menyelesaikannya dengan konsensus. Dalam hal ini, Habermas lebih fokus pada diskursus praktis, hal ini dikarenakan dalam diskursus praktis terdapat konsensus yang dibangun secara rasional, dimana seseorang akan mempersoalkan klaim kebenaran. Diskursus praktis disebut juga oleh Habermas (24:2006) sebagai bentuk argumentasi dimana klaim ketepatan

normatis ditematiskan. Dalam pelaksanaanya diskursus praktis ini akan sesuai dengan keadaan masyarakat modern seperti saat ini, dimana masyarakat mulai mempertanyakan terhadap suatu kebenaran. Dalam bukunya (Hardiman, 2009:46) Habermas menyatakan bahwa orang harus membuat norma-norma yang mengatur perilaku mereka menjadi rasional, tidak hanya dengan memberinya alasan-alasan rasional, melainkan juga melegitimasiannya secara intersubjektif.

Untuk melakukan proses diskursus ini, masyarakat membutuhkan suatu arena yang juga disebut sebagai ruang publik. Dalam hal ini ruang publik yang dimaksud adalah ruang yang bersifat sosial yang tidak harus bersifat geografis. Menurut Habermas dalam Hardiman (2009:133-135) menyatakan bahwa ruang publik ialah;

Tempat para warganegara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik dijadikan sebagai prosedur komunikasi yang memungkinkan warganegara menggunakan kekuatan argumen untuk menyatakan sikap mereka sehingga dapat menumbuhkan kekuatan solidaritas yang mengutuhkan sebuah masyarakat dalam perlawanannya terhadap sumber-sumber lain seperti pasar kapitalis atau birokrasi negara, agar tercapai keseimbangan.

Menurut Prasetyo (2012) Habermas memberikan pernyataan tentang pluralitas ruang publik, dimana adanya pluralitas ruang publik ini adalah hasil refleksi dari kondisi masyarakat modern yang semakin kompleks sehingga tiap komunitas atau kelompok dapat membangun ruang publiknya masing-masing. Selain itu ruang publik diartikan sebagai ruang diantara masyarakat sipil dan

negara, dimana diskusi publik kritis mengenai persoalan-persoalan kepentingan umum dilindungi secara institusional (Habermas, 2007).

Dengan adanya proses diskursus yang dilakukan dalam ruang publik inilah yang disebut Habermas sebagai prosedur untuk mencapai suatu demokrasi deliberatif. Menurut Hardiman (2009) Teori demokrasi deliberatif Habermas ini lebih melihat prosedur dalam menghasilkan aturan-aturan hingga melihat dalam kondisi apa aturan tersebut dibuat sehingga warga negara dapat mematuhi aturan tersebut tanpa adanya paksaan. Demokrasi deliberatif ini akan terwujud melalui prosedurnya yaitu dengan melakukan proses diskursus serta menimbang-nimbang dalam membuat suatu aturan atau kebijakan sehingga dapat menghasilkan suatu konsensus antara pemerintah dan masyarakat.

Pada teori diskursusnya, Habermas menekankan pada bentuk komunikasi yang dilakukan secara intersubjektif sehingga komunikasi tidak berjalan secara satu arah atau monologal. Dengan adanya komunikasi yang dilakukan secara intersubjektif hal ini akan mengarah pada pencapaian suatu konsensus atau kesepakatan bersama, sehingga kebenaran tidak bersifat subjektif tetapi kebenaran dapat diterima bersama. Dalam masyarakat komunikatif, Habermas lebih menekankan pada komunikatif yang terdapat sifat argumentatif didalamnya, hal ini yang disebut dengan diskursus. Sifat argumentatif ini digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu konsensus. Adanya argumentatif ini terjadi pada subjek yang berusaha untuk menyatukan *lebenswelt* atau pengetahuan latar belakang mereka masing-masing.

Dalam penelitian ini teori diskursus digunakan sebagai alat analisis dikarenakan peneliti berusaha menjelaskan bahwa masyarakat berupaya

membentuk suatu konsensus atau kesepakatan bersama berdasarkan hasil komunikasi satu sama lain sebagai bentuk penolakan kebijakan pemerintah yang dihasilkan dalam bentuk tuntutan-tuntutan warga terhadap pemerintah. Tidak hanya diskursus pada warga, namun juga upaya diskursus yang dibangun warga dengan pemerintah, serta diskursus pemerintah sendiri dalam penerapan kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau. Dalam komunikasi tersebut tiap anggota berhak mengutarakan kepentingannya masing-masing. Pembentukan konsensus juga dilandasi dengan *lebenswelt* dalam melakukan tindakan komunikatif untuk menyatukan pemikiran mereka bersama. Hingga pada akhirnya keputusan yang terbentuk tidak mengandung kepentingan subjektif saja, melainkan kepentingan bersama untuk menolak kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau. Dalam melakukan proses diskursus juga diperlukan adanya ruang publik sebagai sarana warga dengan pemerintah melakukan proses diskursus. Dalam penelitian ini lebih melihat ketersediaan ruang publik terkait kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau.

Upaya masyarakat dalam menolak kebijakan pemerintah ini dikarenakan adanya dominasi oleh pihak yang memiliki sumberdaya melalui komunikasi yang berkepentingan sepihak tanpa adanya kesepakatan. Adanya penolakan ini juga sebagai perlawanan warga yang berusaha untuk menjadi masyarakat rasional atas adanya kolonisasi *lebenswelt* dari pemerintah. Namun di sisi lain warga tidak memiliki sumberdaya yang cukup sebagai landasan mereka melakukan penolakan. Hal ini terlihat bahwa masyarakat tidak memiliki hak milik atas tanah yang menjadi tempat tinggal mereka, sehingga pemerintah akan lebih berhak untuk

melakukan penggusuran di wilayah tersebut. Hal ini yang membuat masyarakat di RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri melakukan penolakan dengan membangun suatu kesepakatan bersama atau konsensus terkait apa yang sebenarnya mereka inginkan sebagai warga negara dengan adanya kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau tersebut. Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh warga lebih bersifat argumentatif dalam mengutarakan pendapatnya masing-masing maka hal ini akan membentuk komunikasi diskursus.

2.3 Definisi Konseptual

2.3.1 Diskursus Kebijakan Pemerintah Kota Kediri

Menurut Purbani (2005) kata wacana sering pula disebut dengan diskursus mengandung beberapa pengertian yang kadang-kadang membingungkan, dan mempengaruhi pemahaman kita tentang analisis wacana. Konsep diskursus juga dijelaskan oleh beberapa tokoh teori postmodern seperti Jurgen Habermas dan Michel Foucault. Foucault menjelaskan konsep diskursus dengan memberikan beberapa unsur didalamnya seperti pengetahuan, kekuasaan, kegilaan, dan seksualitas. Bagi Foucault, diskursus berkaitan dengan bahasa maupun praktik dan mengacu pada produksi pengetahuan yang tertata melalui bahasa yang memberikan makna pada objek materi dan praktik sosial (Barker, 2004). Sedangkan menurut Purbani (2005) Diskursus dipercayai sebagai piranti-piranti yang digunakan lembaga-lembaga untuk mempraktekkan kuasa-kuasa mereka melalui proses-proses pendefinisian, pengisolasian, membenaran.

Berbeda dengan pandangan Foucault, bagi Habermas diskursus diartikan sebagai lanjutan tindakan komunikatif yang dilakukan dengan menggunakan sarana argumentatif didalamnya dengan pencapaian konsensus melalui

percakapan-percakapan (Hardiman, 2009). Diskursus diterapkan pada masyarakat modern, hal ini dikarenakan kondisi masyarakat saat ini dengan sifatnya yang semakin plural dan memiliki kepentingan masing-masing sehingga diskursus dijadikan sebagai jalan tengah untuk menyatukan kepentingan masyarakat yang bermacam-macam. Selain itu masyarakat modern lebih bersifat kritis dalam menerima suatu kebenaran sehingga diskursus menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan klaim kebenaran. Bagi Habermas, diskursus merupakan bentuk komunikasi yang bersifat kritis dan terbuka (Hardiman, 2009). Dalam penerapannya, diskursus ini diperlukan adanya partisipatif oleh masyarakat agar tujuan yang diinginkan bersama dapat dicapai.

Jika dikaitkan dengan konteks penelitian, konsep diskursus yang dipakai adalah konsep diskursus menurut pandangan Habermas. Dalam penelitian ini diskursus digunakan untuk melihat pembentukan konsensus oleh warga dan pemerintah yang juga membutuhkan partisipasi warga untuk berkomunikasi satu sama lain secara kritis untuk mencapai tujuan yang menjadi kesepakatan bersama. Dalam membentuk suatu diskursus oleh warga dan pemerintah juga diperlukan komunikasi yang bersifat argumentatif. Komunikasi argumentatif ini dilakukan warga untuk mengungkapkan kepentingannya atas adanya kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokalisasi melalui proses seperti musyawarah antarwarga maupun musyawarah dengan pihak pemerintah. Sehingga masyarakat tidak serta merta menerima kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, namun juga berupaya untuk mendapatkan jaminan yang dianggap sebagai suatu kebenaran yang nantinya dapat diterima oleh semua pihak.

Sedangkan Kebijakan menurut Federick dalam Taufiqurokhman (2014) diartikan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini, kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu daerah berhak membuat kebijakan yang ditujukan pada masyarakat. Pelaksana kebijakan tersebut adalah masyarakat, sehingga dalam perumusan kebijakan seharusnya pemerintah melakukan komunikasi kepada masyarakat agar kebijakan yang dibuat dapat diterima dan berjalan secara efektif. Kebijakan ini juga melibatkan berbagai tindakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam membuat kebijakan terdapat proses-proses yang dilakukan yaitu identifikasi masalah atau isu-isu, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan (Adisasmito, 2012).

Pada penelitian ini kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Kediri adalah kebijakan yang mengatur mengenai keberadaan lokalisasi. Lokalisasi sendiri menurut Siregar dalam Issabela wiwin (2010) adalah lingkungan masyarakat yang di dalamnya terdapat seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang dianut masyarakat dan yang selama ini diajarkan oleh keluarga. Lokalisasi lebih pada lokasi yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya tindakan prostitusi atau seks bebas. Lokalisasi ini seringpula dijadikan tempat untuk pemantauan persebaran virus HIV. Menurut Isabela dan Wiwin (2010)

pengadaan lingkungan lokalisasi dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif lokalisasi dari dunia luar dengan cara mengisolir kegiatan prostitusi pada suatu tempat tertentu.

Sama halnya dengan salah satu daerah di Kelurahan Semampir Kota Kediri, dimana daerah ini bertepatan pada wilayah RW 5 telah lama dijadikan sebagai tempat lokalisasi. Kegiatan prostitusi di lokalisasi Semampir ini telah menjadi rahasia umum bagi warga Kediri. Hal ini juga menuai permasalahan dikarenakan banyak dari warga sekitar yang resah akan keberadaan lokalisasi yang dapat membawa dampak negatif. Setelah beberapa lama lokalisasi Semampir ini dibiarkan oleh pemerintah, pada akhirnya pemerintah membuat kebijakan untuk menghilangkan lokalisasi ini. Kebijakan ini pun juga menjadikan masalah khususnya pada warga eks lokalisasi

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini dilandasi pada Peraturan Daerah Kota Kediri no 26 Tahun 1998 yang mengatur tentang penutupan lokalisasi di kawasan Kota Kediri. Dengan adanya aturan mengenai penutupan lokalisasi ini pada implementasinya masih belum dapat diterapkan dengan baik, hal ini terlihat ketika lokalisasi masih tetap beroperasi. Ketidakefektifan peraturan ini, membuat Pemerintah Kota Kediri saat ini membuat kebijakan baru yaitu dengan melakukan penggusuran pemukiman di Kelurahan Semampir Kota Kediri yang juga dijadikan sebagai wilayah lokalisasi. Selain berusaha menutup lokalisasi, pemerintah juga ingin membuat wilayah tersebut dijadikan sebagai wilayah ruang terbuka hijau.

Berdasarkan pada Undang Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 mengartikan ruang terbuka hijau sebagai area memanjang/jalur dan/atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Menurut Samsudi (2010) Ruang terbuka hijau memiliki fungsi bagi tata ruang;

Ruang terbuka hijau memiliki fungsi dan peran khusus pada masing-masing kawasan yang ada pada setiap perencanaan tata ruang kabupaten/kota, yang direncanakan dalam bentuk penataan tumbuhan, tanaman, dan vegetasi, agar dapat berperan dalam mendukung fungsi ekologis, sosial budaya, dan arsitektural, sehingga dapat memberi manfaat optimal bagi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pada kebijakan Pemerintah Kota Kediri juga menyatakan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokalisasi pasca penggusuran. Kebijakan ini tertera dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 mengenai pengembangan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini juga dikarenakan Kota Kediri merasa kekurangan keberadaan ruang terbuka hijau, sehingga pemerintah mulai gencar dalam memperbanyak ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Namun dalam penerapannya, kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau ini masih menuai permasalahan, khususnya oleh warga Kelurahan Semampir eks lokalisasi yang menolak lahan tempat tinggalnya dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau. Mengacu pada RTRW Kota Kediri tahun 2011-2030 telah menetapkan bahwa Kelurahan Semampir sebenarnya tidak difungsikan sebagai lahan RTH Kota, justru Kelurahan Semampir ini difungsikan sebagai daerah perkantoran, perdagangan dan jasa, industri, dan rumah susun. Sehingga kebijakan ini dianggap tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah sendiri.

2.3.2 Resistensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah

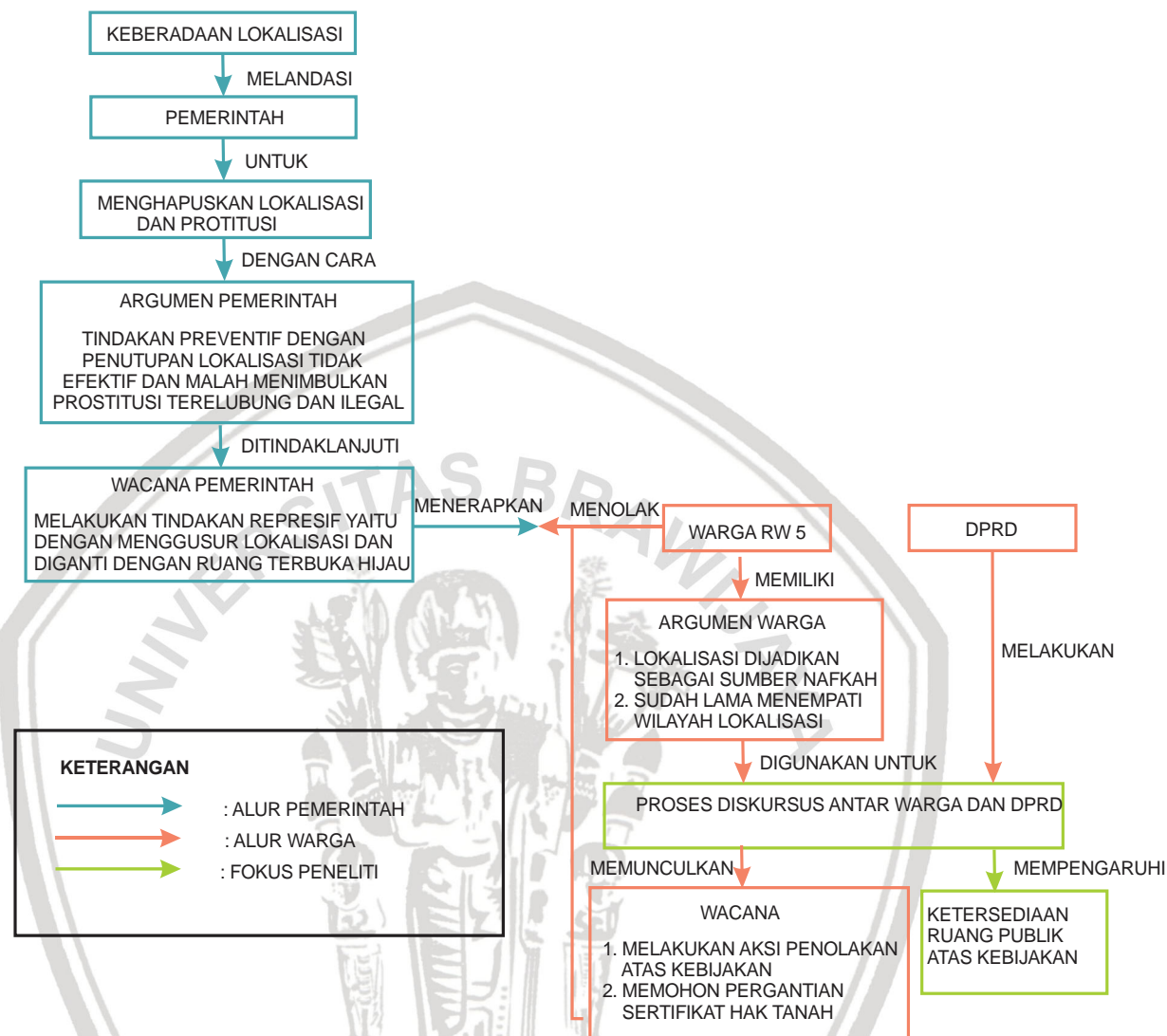
Menurut Emod (2015) menyatakan bahwa resistensi adalah posisi sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang upaya atau oposisi. Resistensi yang dilakukan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang akan diterima kedepannya. Scott dalam Andriani (2014) membagi bentuk resistensi (perlawanan) menjadi dua kategori, yaitu perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*).

Pada penelitian ini, resistensi yang dimaksud adalah bentuk pertahanan dan perlawanan warga eks lokasi Kelurahan Semampir Kota Kediri terhadap kebijakan penggusuran wilayah lokasi yang dibuat oleh pemerintah. Menurut pandangannya, James C. Scott menjelaskan pengertian resistensi atau perlawanan berdasarkan pada fenomena petani, dimana para petani yang melawan pemilik tanah akibat dalam pengelolaan sistem sewa lahan dapat merugikan petani, sedangkan pemilik tanah akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (Amiruddin, 2012). Dalam konteks lain, dalam penelitian ini resistensi yang dilakukan warga atas kebijakan pemerintah bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang akan didapatkannya, sedangkan kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau menjadi kepentingan dari pemerintah sehingga pemerintah pun secara tidak langsung mengambil keuntungan didalamnya.

Resistensi warga ini juga dikarenakan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah masih belum sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan tetap berupaya mempertahankan apa yang menjadi kepentingannya dengan melakukan perlawanan. Hal ini menyebabkan warga lebih memilih untuk mempertahankan lahannya daripada mereka akan terbengkalai jika

menerima pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut. Resistensi yang dilakukan oleh warga berupa adanya pandangan yang sama untuk mempertahankan lahan tempat tinggalnya, sehingga akan memunculkan suatu tindakan untuk melawan kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan tuntutan-tuntutan yang dianggap dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Menurut Scott dalam Amiruddin (2012) menyatakan bahwa sepanjang tujuan orang-orang yang melawan tersebut adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, makanan, tanah, atau pendapatan, dan melakukannya dalam keadaan yang relatif aman, maka mereka dapat hanya mengikuti garis perlawanan yang paling lunak. Sama halnya dengan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan penggusuran tersebut, tujuan mereka melakukan penolakan dan perlawanan yaitu untuk mempertahankan tempat tinggalnya yang juga menjadi salah satu kebutuhan utama mereka. Seperti yang dilakukan oleh warga RW 5 dimana mereka melakukan resistensi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan tempat tinggal.

2.4 Alur Pemikiran



Bagan 1 ; Alur Pemikiran
Sumber : Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan pada gambar tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut;

Adanya kegiatan prostitusi di wilayah lokalisasi di Kota Kediri ini dianggap sebagai suatu hal yang menyimpang dengan nilai dan norma yang dianut masyarakat. Hal ini juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar karena dengan adanya kegiatan prostitusi ini akan membawa dampak negatif bagi masyarakat. Adanya keresahan ini, Pemerintah Kota Kediri berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini menjadi dasar pemerintah untuk

menghapuskan keberadaan lokalisasi dan tindakan prostitusi serta membuat Kota Kediri menjadi bersih dari tindakan prostitusi. kepentingan pemerintah untuk membersihkan Kota Kediri dari lokalisasi ditandai dengan adanya tindakan dari pemerintah dengan memberikan tindakan yang bersifat preventif maupun tindakan yang bersifat represif. Pemerintah Kota Kediri membuat suatu peraturan yang mengatur tentang keberadaan lokalisasi. Peraturan ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No 26 Tahun 1998 terkait aturan penutupan lokalisasi.

Aturan mengenai penutupan lokalisasi ini pada implementasinya masih belum berjalan efektif, bahkan kegiatan prostitusi pun masih terjadi secara tersembunyi. Hal ini membuat Pemerintah Kota Kediri membuat kebijakan baru secara represif untuk menghilangkan kegiatan prostitusi ini dengan melakukan penggusuran pemukiman yang dijadikan sebagai wilayah lokalisasi. Selain berdasarkan aturan dalam Perda No 26 Tahun 1998 yang mengatur tentang penutupan lokalisasi, pemerintah melakukan penggusuran juga bertujuan untuk mengalihfungsikan tanah aset pemerintah menjadi ruang terbuka hijau. Adanya rencana pembangunan ruang terbuka hijau ini juga tercantum dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 terkait pengembangan wilayah Ruang Terbuka Hijau. Selain itu pemerintah juga merasa bahwa Kota Kediri masih kekurangan ruang terbuka hijau.

Namun dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah ini tidak berjalan dengan lancar. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat ini tidak diterima dengan baik, sehingga terjadi suatu perselisihan antara pihak pemerintah Kota Kediri dengan warga RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri. Hal ini

disebabkan karena kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan penggusuran yang dilakukan secara satu pihak tanpa adanya persetujuan dari pihak masyarakat itu sendiri menjadi alasan warga dalam melakukan penolakan. Adanya penolakan yang dilakukan oleh warga RW 5 ini juga didasari dari pemahaman warga atau yang disebut dengan *lebenswelt*. Bentuk *lebenswelt* warga ini menjadi bentuk argumentasi dalam mengutarakan aspirasinya. Dapat dijelaskan beberapa pemahaman warga yang menjadi dasar mereka melakukan penolakan yaitu warga menanggapi bahwa adanya lokalisasi dijadikan sebagai satu-satunya sumber warga dalam mencari nafkah, selain itu warga beranggapan bahwa kehidupan mereka berada di RW 5 dan mereka sudah menempati wilayah itu sejak berpuluh-puluh tahun lamanya.

Adanya pemahaman warga tersebut dijadikan sebagai landasan mereka untuk melakukan proses diskursus antara warga dan pihak DPRD. Dalam hal ini DPRD melakukan proses diskursus dengan warga karena DPRD sendiri yang menjadi pihak ketiga antara masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah. Dari adanya proses diskursus antara warga dan DPRD ini menghasilkan kesepakatan bersama yaitu warga yang dibantu oleh DPRD berupaya untuk melakukan aksi penolakan atas kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau, serta warga dapat memohonkan pergantian sertifikat hak tanah dari hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik.

Dengan adanya proses diskursus yang dilakukan oleh warga RW 5 dengan pihak DPRD ini juga akan mempengaruhi terkait ketersediaan ruang publik atas kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau. Ketika kesepakatan yang dihasilkan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan maka terbentuklah ruang publik. Namun ketika kesepakatan yang dihasilkan tidak dapat membawa perubahan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah, maka tidak terbangun suatu ruang publik atas kebijakan tersebut. Selain itu proses diskursus yang dilakukan antara warga RW 5 dan DPRD ini menjadi salah satu bentuk respon terkait adanya kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau.

Diskursus yang dibangun oleh warga dan DPRD ini dapat dijelaskan melalui teori diskursus milik Jurgen Habermas, dimana dalam teori tersebut juga akan membahas mengenai tindakan komunikatif khususnya yang dilakukan oleh warga, bentuk *lebenswelt* yang dimiliki oleh warga, kolonisasi sistem yang dilakukan pemerintah atas *lebenswelt* warga, bentuk diskursus yang dilakukan baik antar warga maupun dengan pihak pemerintah sebagai respon atas kebijakan, serta ketersediaan ruang publik. Diskursus yang terbangun juga terlihat pada adanya suatu konsensus antara warga dan pihak DPRD untuk tetap mempertahankan lahan tempat tinggalnya. Adanya konsensus ini ditunjukkan melalui adanya tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh warga terhadap pemerintah atas kebijakan yang telah dibuatnya. Salah satu tuntutan yang diajukan yaitu dengan mengganti hak tanah milik pemerintah dari hak guna pakai menjadi hak milik pribadi, tuntutan ini diminta warga dikarenakan ada beberapa warga yang telah mengganti hak tanah menjadi hak milik pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dalam konteks yang khusus serta alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012:6). Pada penelitian ini, obyek utama yang ingin dikaji oleh peneliti adalah realitas yang terjadi dalam masyarakat dengan harapan peneliti memperoleh informasi maupun data mengenai peristiwa yang dapat dipahami lebih jauh.

Secara lebih rinci jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana menurut Yin (2015) studi kasus merupakan suatu strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* dan *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini di dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini lebih fokus bertujuan deskriptif dan menggunakan jenis studi kasus instrumental, hal ini dikarenakan studi kasus instrumental dapat digunakan sebagai sarana untuk memahami data diluar kasus (Gunawan, 2015).

Tipe analisis ini digunakan oleh peneliti karena dapat menjelaskan secara lebih rinci bagaimana proses dan upaya masyarakat dalam membangun konsensus antar warga di RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri sebagai bentuk resistensi untuk mempertahankan lahan tempat tinggalnya terkait adanya kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokalisasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kediri.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada proses dan respon masyarakat atas implementasi kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokalisasi untuk mempertahankan lahan tempat tinggalnya. Respon warga dalam melakukan penolakan kebijakan ini dilakukan dengan membangun konsensus, yang mana konsensus yang terbangun ini dijadikan sebagai bentuk resistensi warga atas adanya kebijakan. Penelitian ini ingin melihat bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak selalu berjalan dengan baik dan diterima oleh warga, salah satunya kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokalisasi Kota Kediri yang pada kenyataannya justru mendapat perlawanan dan penolakan dari warga. Hal ini ditandai dengan warga RW 5 yang saling menyatukan pemikiran dan membangun suatu konsensus untuk melakukan penolakan atas kebijakan yang dibuat pemerintah dan upayanya untuk mempertahankan lahan tempat tinggalnya.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah peneliti ingin melihat fenomena yang ada pada masyarakat RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri dalam berupaya mempertahankan lahan tempat tinggalnya atas adanya kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kediri. Hal ini juga dikarenakan kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlaksana, dimana kegiatan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau ini masih akan diimplementasikan pada sebagian wilayah saja dan pada wilayah lainnya warga masih berupaya untuk mempertahankan lahan tempat tinggal mereka. Pada daerah RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri ini juga masih terdapat kasus sengketa

tanah, dimana terjadi perebutan hak tanah antara pemerintah dan warga. Warga berupaya untuk meminta hak tanah tersebut menjadi hak milik, hal ini dikarenakan terdapat beberapa warga yang sudah mengubah hak guna pakai menjadi hak milik.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dihasilkan melalui beberapa sumber data yang digunakan. Menurut Rokhmana (2012) Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data, berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu;

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini data primer didapatkan peneliti melalui hasil wawancara mendalam bersama informan yang telah ditentukan dan hasil dari observasi yang telah dilakukan

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti sebagai data pendukung untuk kegiatan analisis penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara untuk mendapatkan serta mengumpulkan informasi yang akurat mengenai penelitian yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu antara lain sebagai berikut.

3.5.1. Observasi

Observasi ialah metode yang mengamati sekitar daerah yang akan diteliti, dan metode observasi ini di gunakan untuk mengamati kondisi sosial yang ada dalam lingkup penelitian. Observasi merupakan hal yang penting untuk melihat perilaku dalam keadaan (*setting*) alamiah, melihat dinamika, melihat gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada (Black, 1992:285). Peneliti juga melakukan observasi sebelum melakukan penelitian yang bertujuan awal untuk melihat fenomena ataupun isu yang terjadi pada masyarakat RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri yang bertempat tinggal di wilayah lokalisasi. Kemudian dari hasil observasi tersebut yang menjadi pijakan awal peneliti melakukan penelitian mengenai proses atau upaya masyarakat dalam membangun konsensus sebagai bnetuk resistensi warga untuk mempertahankan lahan tempat tinggalnya atas adanya kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokalisasi Kota Kediri.

Dalam observasi ditemukan bahwa kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau yang dibuat oleh pemerintah pada nyatanya tidak dapat berjalan baik serta mendapat penolakan dari warga. Hal ini disebabkan warga merasa kebijakan pemerintah tersebut justru merugikan masyarakat. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, warga menjadi kehilangan tempat tinggal serta mata pencahariannya. Selain itu kompensasi yang diberikan oleh pemerintah masih dirasa belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. sehingga warga berupaya untuk menolak kebijakan pemerintah tersebut dan berupaya mempertahankan lahan tempat tinggalnya apapun yang terjadi.

3.5.2. Indepth Interview

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Berdasarkan strukturnya, ada dua jenis wawancara yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu; (1) wawancara relatif tertutup, di mana pertanyaan difokuskan pada topik khusus dan umum dan dibantu oleh panduan wawancara yang dibuat cukup rinci; (2) wawancara terbuka, dimana peneliti memberikan kebebasan diri untuk berbicara secara luas dan mendalam (Moleong, 2004: 186).

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terbuka, dimana peneliti memberikan kebebasan pada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam terkait dengan topik penelitian. Meskipun menggunakan wawancara terbuka peneliti juga menggunakan *guide interview* sebagai panduan dalam mengajukan pertanyaan kepada informan. Sehingga dengan demikian peneliti akan mendapatkan informasi secara lebih mendalam dan detail yang dapat membantu menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian ini.

3.5.3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu teknik mencari data-data mengenai hal-hal atau varia bel yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, legger, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 1986: 188). Metode Dokumentasi di gunakan untuk menyimpan data-data bisa berupa bentuk gambar, suara, maupun video. Peneliti menggunakan metode dokumentasi penyimpanan data berupa gambar dan suara. Gambar-gambar tersebut berupa kondisi fisik

wilayah dan rekaman suara yang merupakan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

3.6 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* dalam menentukan informan. Menurut Herdiansyah (2011:106) teknik *Purposive* merupakan teknik dalam *non-probability sampling* yang berdasar kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Dalam teknik ini peneliti sudah menentukan siapa yang akan menjadi informan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive* bertujuan agar peneliti dapat menentukan pihak-pihak yang sesuai dengan apa yang ditentukan dan pihak yang memahami proses diskursus warga RW 5 sebagai upaya mempertahankan tempat tinggalnya. Adapun pihak tersebut adalah beberapa warga RW 5, Dinas terkait, serta pejabat setempat.

Untuk menentukan informan, peneliti menentukan karakteristik informan yaitu:

1. Informan yang memahami latar belakang permasalahan terkait keberadaan lokalisasi dan kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Kediri
2. Informan yang terlibat dalam upaya pembentukan konsensus dan resistensi lahan tempat tinggal atas adanya kebijakan pengrusakan dan pembangunan ruang terbuka
3. Informan yang memahami proses implementasi kebijakan pengrusakan dan pembangunan ruang terbuka hijau di RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam bukunya (Yin, 2015:140) menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis penelitian studi kasus terdapat tiga teknik-teknik penting yaitu penjadohan pola, pembangunan penjelasan, dan deret waktu. Dalam penelitian ini untuk melihat proses diskursus yang dilakukan oleh warga RW 5 dalam mempertahankan tempat tinggalnya terkait adanya kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau, peneliti menggunakan salah satu teknik analisis studi kasus yaitu teknik penjadohan pola.

Dalam menjalankan teknik analisis data penjadohan pola dapat dilakukan dengan membandingkan pola yang didapat berdasarkan hasil empiris dengan pola yang sebelumnya telah diprediksikan, sehingga ketika kedua pola tersebut memiliki persamaan maka dapat menguatkan validitas internal (Yin, 2015:140). Untuk menerapkan teknik penjadohan pola ini, peneliti memiliki suatu prediksi awal yang dijadikan sebagai landasan dalam pencarian data. Prediksi awal ini disebut juga dengan proposisi. Menurut Yin (2015:29) proposisi dapat mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya. Dalam penelitian ini proposisi awal peneliti adalah *“Dalam menghadapi kebijakan Pemerintah Kota Kediri mengenai kebijakan penggusuran wilayah lokalisasi dan adanya wacana pembangunan ruang terbuka hijau, warga RW 5 Kelurahan Semampir dan pemerintah memberikan timbal balik dengan membangun suatu konsensus yang menghasilkan tuntutan-tuntutan melalui proses diskursus atau tindakan komunikatif reflektif sebagai bentuk penolakan dan sebagai upaya mempertahankan tempat tinggal tanpa terbangunnya ruang publik”*.

Dalam menganalisis menggunakan teknik penjadohan pola, menurut Yin (2015) terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dijadikan sebagai acuan sebagai berikut:

1. Membuat suatu pernyataan teoritis awal atau proposisi awal tentang kebijakan atau perilaku sosial
2. Membandingkan temuan-temuan kasus awal dengan pernyataan atau proposisi
3. Memperbaiki pernyataan atau proposisi
4. Membandingkan rincian-rincian kasus lainnya dalam rangka perbaikan tersebut
5. Memperbaiki lagi pernyataan atau proposisi
6. Membandingkan perbaikan tersebut dengan fakta dari kasus kedua, ketiga, atau lebih
7. Mengulangi proses ini sebanyak mungkin sebagaimana diperlukan

Teknik penjadohan pola yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan proposisi awal peneliti dengan hasil temuan-temuan yang telah didapat melalui proses perbaikan-perbaikan pernyataan atau proposisi sehingga dapat menghasilkan proposisi akhir.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian keabsahan data menjadi suatu hal yang penting khususnya dalam penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan penelitalah yang menjadi instrumen utamanya (Rahardjo, 2010). Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Dengan dilakukannya pengujian kredibilitas data, penelitian dapat disajikan sesuai dengan

fenomena dan teori. Triangulasi sendiri diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Bachri, 2012).

Menurut Rahardjo (2010) menyatakan bahwa terdapat empat hal dalam triangulasi yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti (jika penelitian dilakukan berkelompok), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori;

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur.
2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian.
3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.
4. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Menurut Sugiyono (2014) triangulasi sumber data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang didapat peneliti dideskripsikan, dikategorisasikan, dan dianalisis mana pendapat yang sama dan mana yang berbeda. Setelah data selesai dianalisis dilakukan *member check*. Menurut Shanti (2012) *member check* adalah proses pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek penelitian atau narasumber dengan cara mengkonsultasikan data yang diperoleh pada narasumber.



4.1 Kondisi Geografis dan Demografis



Barat : Kecamatan Mojoagung yang berbatasan dengan aliran sungai Brantas

Timur : Kelurahan Balowerti

Utara : Kelurahan Jongbiru Kabupaten Kediri

Selatan : Kelurahan Pocanan

Letak Kelurahan Semampir ini cukup strategis yang juga berdekatan dengan pabrik rokok terbesar di Asia yaitu pabrik rokok Gudang Garam. Letak geografis RW 5 yang strategis ini juga memudahkan warga untuk aksesibilitas dan menjadi aset kepemilikan lahan yang baik. Selain itu Kelurahan Semampir juga dilewati jalur utama antar kota. Sedangkan untuk letak RW 5 yang juga bertepatan sebagai wilayah eks lokalisasi berada di bawah jembatan baru Kota Kediri dan berada tepat di pinggir aliran sungai Brantas. Secara geografis RW 5 Kelurahan Semampir ini memiliki luas wilayah $\pm 1,5$ Ha dengan jumlah penduduk sebelum pengusuran ± 549 KK dan total rumah ± 400 bangunan, selain itu bangunan yang ditargetkan untuk digusur sebanyak ± 227 . Sehingga pasca pengusuran lokalisasi jumlah penduduk hanya sebanyak 288 KK yang terbagi 200 KK warga RT 31 dan 88 KK warga RT 32. Selain itu RT 29 dan RT 30 yang telah tergusur saat ini sudah dianggap tidak ada, sehingga RW 5 hanya memiliki 2 RT saja yaitu RT 31 dan RT 32. Wilayah RW 5 juga memiliki beberapa sarana bagi masyarakat seperti adanya mushola dan sekolah TK/PAUD.

Secara administratif tanah di daerah RW 5 merupakan tanah aset milik pemerintah atau yang juga disebut dengan tanah gendom. Hal ini juga dipaparkan oleh pejabat setempat sebagai berikut:

“Tanah itu hak pakai pemerintah kota. Dulu itu statusnya...mereka nyewa. Terus syarat-syaratnya tidak boleh membangun secara permanen dulu perjanjiannya seperti itu.” (Wawancara 18 Desember 2017).

Pada awalnya daerah RW 5 adalah wilayah kuburan cina yang sengaja disewakan oleh pemerintah kepada masyarakat pendatang untuk dijadikan tempat pemukiman. Hal ini dikarenakan warga RW 5 adalah mayoritas masyarakat pendatang dari berbagai daerah. Hal ini juga berkaitan dengan pemaparan Pak G sebagai berikut:

“Ndak ada, pendatang semua. Yang mbak-mbak e (PSK) to? Pendatang semua. Dulu ini kan tanah kuburan cino bong, terus dulu pak lurah e sopo dibuatkan kapling kapling mboso wes dadi ketok ngene digusur. Akeh seng ninggal kok mbak. Biasane iso ngopeni anak e sekolah, nyangoni

anak e sekolah saiki kan gak iso. wong gelem kerjo neng lokalisasi kan wong kepepet to.”

(tidak ada, pendatang semua. Yang mbak-mbaknya (PSK) kan? Pendatang semua. Dulu ini kan tanah kuburan cina, terus dulu pak lurahnya siapa dibuatkan kapling-kapling. Setelah sudah jadi kelihatan gini digusur. Banyak yang meninggal kok mbak. Biasanya bisa ngurusin anaknya sekolah, memberi uang saku anaknya sekolah, sekarang kan nggak bisa. Orang mau kerja di lokalisasi kan orang terdesak kan) (Wawancara 16 Desember 2017)

RW 5 Kelurahan Semampir khususnya di RT 29 dan RT 30 yang terletak di pinggir aliran sungai Brantas ini sejak tahun 1970-an sudah menjadi wilayah lokalisasi di Kota Kediri. Wilayah yang awalnya adalah kuburan cina ini oleh pihak pemerintah memang dijadikan sebagai wilayah khusus untuk lokalisasi. Hal ini dikarenakan pada saat itu kegiatan prostitusi masih tersebar di berbagai daerah khususnya Kota Kediri, sehingga pemerintah berupaya untuk menyediakan lahan yang tujuannya dapat melokalisir tindakan prostitusi sehingga akan memudahkan pihak pemerintah untuk memantaunya. Hingga pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menyewakan lahan tersebut kepada warga yang mayoritas pendatang itu dengan memberikan tanggungan biaya sewa serta tanggungan pajak bangunan.

Di dalam kawasan lokalisasi Semampir ini tidak hanya RT 29 dan RT 30 saja yang menjadikan lokalisasi sebagai lahan mencari nafkah, tetapi hal ini juga berlaku bagi RT 31 dan RT 32 yang juga ikut serta memanfaatkan peluang usaha seperti membuka warung ataupun toko-toko kecil diluar adanya tindak prostitusi. Di wilayah RW 5 juga terdapat berbagai macam usaha seperti penyewaan wisma, karaoke, bahkan warung-warung yang menjual berbagai macam makanan dan minuman. Hampir seluruh warga RW 5 mendapatkan penghasilan dari usahanya di dalam lokalisasi tersebut. Dengan kata lain adanya lokalisasi ini yang menghidupi mayoritas warga RW 5. Dari penghasilan yang didapatkan oleh warga ketika lokalisasi masih berjalan dapat dikatakan tingkat ekonomi warga RW 5 ini cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Hal ini dijelaskan oleh pejabat setempat Kelurahan Semampir sebagai berikut:

“yaa karena ada usaha yang disinyalir ada usaha ilegal ya pastilah mereka perputaran uang disana kan besar, kalau sekarang warga yang bekas pembongkaran itu apa istilahnya pada keluar domisili diluar” (Wawancara 18 Desember 2017).

Namun karena adanya tindak prostitusi ini tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku pada zaman kepemimpinan Presiden Gus Dur, pemerintah Kota Kediri mulai menutup berbagai kegiatan di wilayah lokalisasi ini khususnya kegiatan prostitusi. Hal ini juga dijelaskan oleh Pak G sebagai berikut:

“Jamane presiden Gus Dur ki ditutup mbak kene, tahun ...”
(Jamannya presiden Gus Dur sini ditutup mbak, tahun...) (Wawancara 16 Desember 2017)

Dikarenakan adanya lokalisasi ini menjadi satu-satunya tempat mayoritas warga RW 5 mencari nafkah, maka kegiatan prostitusi ini tetap berjalan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan warga RW 5.

“Ya pada kenyataannya seperti itu sebelum dibongkar, memang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial agama dan seterusnya cuma kan disana prakteknya kan tidak artian tidak terbuka begitu ada razia yasudah tidak ada kegiatan. Kalo razia dan oprasi kan sering dilakukan Satpol PP. Cuma kegiatan mereka itu kalo dibilang ada ya disinyalir ada Cuma kan nggak begitu anu..kalo di razia otomatis ya kayak gitu lah kucing-kucingan sembunyi-sembunyi” (Wawancara pejabat setempat Kelurahan Semampir 18 Desember 2017).

Dengan adanya tindak prostitusi yang tetap berlangsung secara sembunyi-sembunyi meski telah mendapat kebijakan penutupan oleh pihak Pemerintah Kota Kediri dan juga didukung dengan adanya peraturan nasional untuk menghilangkan keberadaan lokalisasi, hal ini yang menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk bertindak tegas dengan melakukan pengusuran di wilayah lokalisasi Semampir. Dengan adanya kebijakan pengusuran lokalisasi ini pastinya membawa dampak yang sangat besar bagi warga RW 5 yang pada dasarnya lokalisasi tersebut dijadikan sebagai tempat mereka mencari nafkah.

Dampak yang tampak jelas salah satunya yaitu dampak perekonomian. Keadaan ekonomi warga RW 5 dapat dikatakan menurun drastis pasca pengusuran lokalisasi.

“ekonomi ne sudah..sudah gimana yo mbak 90 derajat menurun.. Ini kan kebanyakan banyak yang buruh-buruh masak, buruh - buruh nyuci nyetrika, banyak yang nganggur. Kan dulu kan kehidupannya kalo ada lokalisasi dulu kan ada yang jualan, jualan apa kan bisa, sekarang kan nggak. sini kampung rw 5 ini kayak kampung mati.” (Wawancara Pak G, 16 Desember 2017)

Selain dampak ekonomi yang dirasakan oleh warga RW 5 pasca pengusuran, juga terdapat dampak sosial yang dirasakan masyarakat. Dengan adanya kebijakan pengusuran tersebut yang dirasa warga terlalu mendadak membuat banyak warga yang merasa belum siap menghadapi eksekusi pengusuran. Sehingga ketika pengusuran tersebut telah dilaksanakan banyak warga RW 5 khususnya warga lokalisasi yang “*shock*” dengan keadaannya, bahkan banyak warga yang mendadak sakit bahkan meninggal dunia. Banyak warga yang merasa kebingungan pasca pengusuran lokalisasi. Mereka yang sebelumnya sanggup menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi, namun saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka harus berpikir.

“ndak ada, pendatang semua. Yang mbak-mbak e to? Pendatang semua. Dulu ini kan tanah kuburan cino bong, terus dulu pak lurah e sopo dibuatkan kapling kapling mboso wes dadi ketok ngene digusur. Akeh seng ninggal kok mbak. Biasane iso ngopeni anak e sekolah, nyangoni anak e sekolah saiki kan gak iso. Wong gelem kerjo neng lokalisasi kan wong kepepet to.” (Wawancara Pak G, 16 Desember 2017)

Bagi warga RW 5 diluar lokalisasi yang dulunya juga bekerja di lokalisasi pun merasa kebingungan karena mereka kehilangan pekerjaan. Warga yang berdagang, penghasilan mereka menurun drastis akibat adanya pengusuran lokalisasi. Bahkan saat ini banyak warga yang bekerja serabutan seperti buruh-buruh atau kuli bangunan dan beberapa menjadi pengangguran. Selain itu warga RW 5 khususnya RT 31 dan RT 32 saat ini pun memiliki

kecemasan tersendiri terkait adanya wacana penggusuran susulan yang akan dilakukan pemerintah untuk perluasan ruang terbuka hijau yang telah direncanakan.

4.2 Awal Mula Kebijakan Penggusuran dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Lokalisasi Semampir yang sudah berjalan kurang lebih selama 47 tahun ini mulai aktif sekitar tahun 1969-1970 an hingga tahun 2016. Dengan berjalannya lokalisasi ini juga tidak lepas dari pantauan-pantauan pemerintah, seperti halnya pantauan dari pihak Satpol PP maupun dari Dinas Kesehatan. Dikarenakan keberadaan lokalisasi ini dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma, maka pada masa kepemimpinan Presiden Gus Dur pada tahun 1999 wilayah lokalisasi ini mendapat kebijakan penutupan. Untuk beberapa saat warga menerima kebijakan penutupan tersebut, namun karena adanya dorongan ekonomi yang dirasakan oleh warga hal itu yang membuat warga menjalankan kembali tindakan prostitusi di wilayah lokalisasi secara diam-diam. Hal ini sudah menjadi rahasia umum masyarakat Kota Kediri dimana mayoritas masyarakat meyakini bahwa di lokalisasi Semampir itu masih melakukan tindakan prostitusi, namun ketika pihak aparat melakukan razia atau operasi di wilayah lokalisasi mereka tidak menemukan adanya tindak prostitusi. Hal ini yang juga menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota Kediri untuk membuat kebijakan yang nantinya dapat menghapus secara bersih dari adanya tindak prostitusi dengan cara mengambil hak tanah milik pemerintah.

Selain itu adanya kebijakan penggusuran lokalisasi ini tidak dijalankan oleh pihak pemerintah secara mendadak. Pemerintah Kota Kediri mendapatkan anjuran atau himbauan dari pusat dengan adanya program nasional yang mengharuskan untuk bersih dari prostitusi, yang juga diteruskan melalui surat perintah dari Gubernur Provinsi. Pemerintah Kota Kediri sudah mulai merencanakan untuk melakukan pembersihan tindak prostitusi khususnya di lokalisasi Semampir sejak tahun 2012-2013, namun dikarenakan banyak kendala pro dan kontra yang menyebabkan kebijakan ini baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2016.

Sebelum adanya eksekusi penggusuran, Pemerintah Kota Kediri sudah mulai memberikan bantuan-bantuan seperti pelatihan – pelatihan bagi warga untuk alih profesi, maupun bantuan dana per-bulannya. Namun bantuan-bantuan tersebut tidak berjalan dengan baik. Selain itu pihak pemerintah juga telah memberikan beberapa pilihan kepada masyarakat seperti dengan tinggal di Rusunawa, tetapi pada akhirnya tidak ada warga yang tinggal di Rusunawa. Hal ini juga dikarenakan faktor pro dan kontra.

“yaa ee aliansi apa ya masyarakat apa itu ya LSM itu sempat menggugat kita, namun kita sudah jelas. Karena sejak awal kita mau menggusur itu kita berikan semacam opsi ee penghuninya itu kita berikan modal kita berikan apapun pelatihan dan sebagainya, tapi pada akhirnya tetep dia nggak mau sampai batas akhir dari program itu, kita opsinya kita berikan tempat di rusunawa dandangan itu, itupun tidak mereka ambil. Karena apa sebenarnya yang harus sampeyan tau orang-orang yang menempati itu bukan orang Kediri sebenarnya, orang luar yang punya uang yang masang orang disini..yaa jadi orang-orang luar kota yang punya duit yang beli disitu yang kerja orang sini.. sebenarnya itu, sebenarnya itu dibongkar itu nggak masalah sebenarnya karena memang yang menempati bukan orang kediri sebenarnya itu. Itu upaya pemerintah sendiri sebenarnya sudah maksimal dari ee pemberian bantuan dari apapun lah sampek mesin jahit, apapun sudah kita berikan tapi tidak pernah dimaksimalkan oleh mereka, dijual..kita buat pelatihan ini dijual, kita berikan alat dan pelatihan montir itu juga terjual semua..karena dia sudah terbiasa dengan pola hidup yang enak kan jadi untuk kerja nggak mau. Hari H pas jam 2 malem pas pagi mau dibongkar itu kalau sampek jam 2 malem jam 2 dini hari itu nggak ada yang mau ikuti aturan itu ya tetep kita bongkar. Sampek jam 2 malem nggak ada yang mau tetep pengen tinggal disitu. Padahal kita opsi sudah banyak, diberi uang 5 juta plus penempatan di rusunawa itupun nggak ada yang mau ambil” (Wawancara Staff DLHK Kota Kediri, 8 Februari 2018)

Setelah adanya berbagai bantuan yang dirasa tidak dijalankan dengan baik, maka pemerintah tetap melakukan eksekusi penggusuran pada tanggal 15 Desember 2016. Sebelum dilakukan eksekusi penggusuran pihak pemerintah telah memberikan surat peringatan bagi warga untuk mengosongkan bangunan namun banyak dari warga yang menolak penggusuran tersebut, ada yang menggunakan cara berdemo di kantor DPRD Kota Kediri dan di Kantor



Walikota dan bahkan ada yang menyiapkan senjata-senjata untuk melawan aparat yang akan melakukan pembongkaran seperti bambu runcing dan bom molotov.

*Gambar 2 : persediaan bambu runcing dan bom molotov yang disediakan warga
Sumber : Arsip warga*

Adanya penggusuran wilayah lokalisasi ini tidak semata-mata pemerintah hanya ingin menghilangkan situs prostitusi yang ada, tetapi Pemerintah Kota Kediri juga memiliki rencana untuk menjadikan wilayah eks lokalisasi tersebut menjadi kawasan wisata atau ruang terbuka hijau. Karena memang saat ini Kota Kediri yang pernah dinilai tidak memiliki ruang terbuka hijau yang cukup sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan ruang terbuka hijau



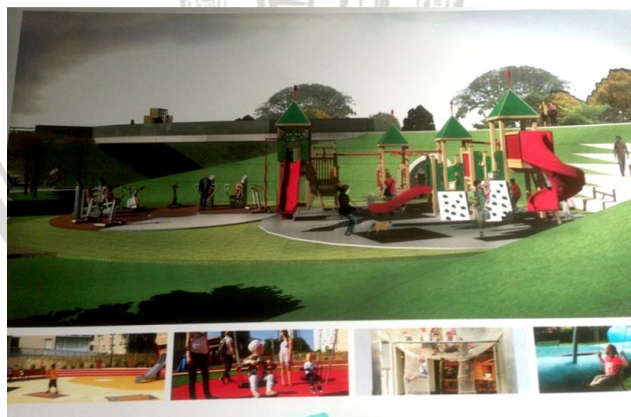
*Gambar 3 : Kondisi lahan pasca penggusuran
Sumber : Dokumentasi Peneliti*

Selain untuk menambah jumlah ruang terbuka hijau di Kota Kediri, pemerintah juga bertujuan untuk memperbaiki sistem perekonomian warga RW 5 (eks lokalisasi). Dengan adanya ruang terbuka hijau diharapkan nantinya dapat menjadi lahan untuk mencari nafkah

bagi warga RW 5 dengan cara berdagang maupun menjadi tukang parkir di area ruang terbuka hijau.

Penerapan pembangunan ruang terbuka hijau ini sudah diawali oleh pemerintah dengan menanam beberapa pohon dengan tujuan pemerintah ingin membuat suatu hutan kota, namun Pemerintah Kota Kediri khususnya Walikota berencana untuk menjadikan lahan tersebut menjadi kawasan tempat bermain anak. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu staff DLHK Kota Kediri sebagai berikut:

“ wes anu ya apal ya jadi untuk melakukan itu karena memang ada himbauan istilahnya bukan himbauan tapi anjuran dari pusat terus ditangani provinsi terus ke kita. Itu malah kebijakan itu kalo nggak salah sudah ada 5 tahun yang lalu. Kita baru menyelesaikan baru tahun kemaren ini karean memang sulit ada faktor X banyak yang tidak mau pindah dari situ. Pada tahun 2015 kita mencoba lagi untuk membongkar dan akhirnya berhasil. Itupun juga banyak memakan energi untuk kita karena memang banyak faktor yang kita sebernya kita karena banyak di tempat-tempat lain yang belum berhasil, hanya di Kota Kediri yang sudah berhasil. Setelah itu kita tanam pohon itu dengan mindset kita buat hutan dulu hutan kota, ternyata dari pihak walikota bapak walikota ada semacam kemauan untuk membuat semacam tempat bermain anak, ini pra designnya ini..nanti bangunnya seperti ini “ (Wawancara 8 Februari 2018)



Gambar 4 : Pra Design ruang terbuka hijau di wilayah eks lokalisasi

Sumber : Dokumentasi Peneliti dari arsip DLHK

Setelah adanya pengusuran lokalisasi dan adanya rencana pembangunan ruang terbuka hijau ini, terdapat satu wacana yang menjadi kegelisahan warga RW 5 eks lokalisasi

yaitu adanya penggusuran tambahan yang dilakukan di seluruh wilayah RW 5 Kelurahan Semampir. Adanya wacana penggusuran ini tujuannya untuk perluasan wilayah dalam membangun ruang terbuka hijau. Namun berdasarkan data yang telah didapat dari staff DLHK yang menyatakan bahwa penggusuran lanjutan untuk perluasan wilayah ruang terbuka hijau tersebut tidak dilanjutkan oleh pemerintah. Pernyataan ini dijelaskan sebagai berikut:

“eee kemaren kita dari DLKP itu rapat dengan beliaunya Bapak Walikota bahwa Pak Wali menghimbau tidak ada lagi penggusuran, jadi tempat itu akan tetap seperti itu dengan luas seperti itu karena itu udah memang memang gini ya sebelah selatan sebelah utara itu tanah negara yang ditempati warga, tapi itu tidak akan ada penggusuran karena itu sudah cukup, pokoknya intinya beliaunya menghendaki tempat itu tidak lagi menjadi tempat maksiat gitu lo intinya. Makanya orang-orang yang masih menyewa disitu nggak papa selama itu tidak digunakan untuk maksiat ndak papa ndak masalah” (Wawancara Staff DLHK, 8 Februari 2018).

4.3 Gambaran Informan

Berdasarkan teknik penentuan informan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu teknik *purposive*, dalam menggali data mengenai upaya warga dalam mempertahankan lahan tempat tinggalnya atas adanya kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokalisasi, peneliti membagi informan sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini terdapat 8 informan yang dijadikan sebagai sumber informasi bagi kelengkapan data penelitian. Gambaran informan digambarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan karakteristik informan yang pertama yaitu informan yang dapat memahami latar belakang permasalahan terkait keberadaan lokalisasi dan kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Kediri ini peneliti menentukan dua informan yaitu :
 - a. Pejabat setempat

Bapak A yang menjadi salah satu pejabat setempat di Kelurahan Semampir. Bapak A ini merupakan pejabat pilihan dari Pemerintah Kota Kediri. Beliau memang bukan asli warga Semampir. Pak A ini yang menangani segala bentuk perizinan dan yang menyediakan segala data mengenai warga khususnya RW 5 sebelum adanya penggusuran. Dalam hal ini Pak A sedikit banyak mengetahui mengenai bagaimana latar belakang warga RW 5 baik sebelum penggusuran maupun pasca penggusuran. Terkait kebijakan penggusuran ini Pak A hanya membantu secara teknis di lapangan saja. Pak A ini tidak ikut serta dalam pembuatan kebijakan, namun hanya lokasinya saja yang berada di Kelurahan Semampir sehingga Pak A memiliki tanggung jawab terhadap Pemerintah dan warganya.

b. Pak B

Bapak B yang merupakan salah satu warga ini adalah warga asli Semampir yang sudah menetap di RW 5 sejak beliau kecil. Bahkan adanya lokalisasi ini sudah ada sebelum beliau lahir. Hal ini yang membuat Pak B ini memahami bagaimana latar belakang dan bagaimana kondisi warga RW 5 sebelum penggusuran dan pasca penggusuran. Namun Pak B ini tidak bekerja dikawasan lokalisasi, beliau bekerja di luar Kelurahan Semampir. Pak B ini menjadi salah satu warga yang juga memahami bagaimana kebijakan penggusuran tersebut mulai dihimbaungkan kepada warga melalui surat peringatan yang diberikan pemerintah hingga adanya rencana pemerintah untuk membangun ruang terbuka hijau. Melalui Pak B ini peneliti mendapatkan bagaimana gambaran latar belakang dan kondisi warga RW 5 serta gambaran mengenai awal mula kebijakan penggusuran itu disampaikan kepada masyarakat hingga kondisi masyarakat pasca penggusuran.

c. Pak C

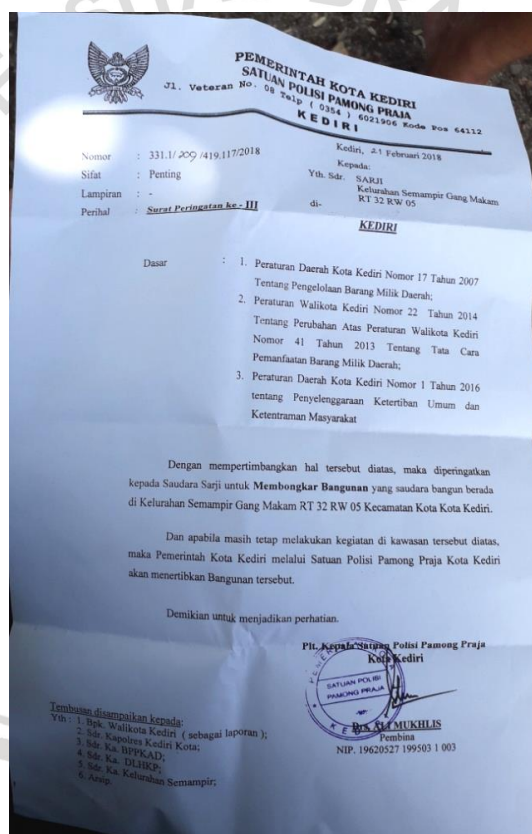
Pak C adalah salah satu warga diluar RW 5 yang mana lokasinya sangat berdekatan dengan lokasi RW 5. Hal ini yang membuat Pak C ini memahami bagaimana latar belakang adanya lokalisasi hingga adanya kebijakan penggusuran. Sebagai RW yang tidak terdampak dengan adanya kebijakan penggusuran tersebut, Pak C ini tidak hanya berdiam diri, namun juga membantu warga RW 5 dalam upayanya menolak kebijakan penggusura tersebut. Sehingga melalui Pak C ini peneliti mendapatkan data mengenai gambaran awal mula berdirinya lokalisasi hingga kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau.

2. Berdasarkan karakteristik informan kedua yaitu Informan yang terlibat dalam upaya pembentukan konsensus dan resistensi lahan tempat tinggal atas adanya kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka, peneliti menentukan 5 orang yang dijadikan sebagai informan yaitu:

- a. Bapak D

Pak D ini adalah warga RW 5 sekaligus mantan ketua RT di wilayah tergusur. Jika tidak ada penggusuran ini besar kemungkinan jika Pak D menjadi Ketua RT seumur hidup. Pak D adalah warga asli Semampir yang juga mengalami masa kecilnya di kawasan lokalisasi tersebut dan telah tinggal di RW 5 selama berpuluh-puluh tahun. Pak D juga memiliki rumah di kawasan komplek (sebutan lokalisasi Semampir), sehingga ketika adanya kebijakan penggusuran ini Pak D pun merasa kebingungan karena menganggap bahwa adanya kebijakan ini dirasa sangat mendadak dan tidak mengerti jika ada kebijakan penggusuran. Pada masa sebelum penggusuran, Pak D ini mencari nafkah dengan membuka warung di wilayah lokalisasi. Pada saat sebelum penggusuran Pak D ini juga ikut serta dalam upaya warga mempertahankan tempat tinggalnya dengan cara memohon kepada

pemerintah agar tidak digusur dan sebagainya. Pak D ini juga menjadi salah satu warga yang mendapat uang kompensasi dari pemerintah sebanyak 7,5 juta. Dengan dana kompensasi yang diterima tersebut Pak D ini tinggal di kontrakan rumah / kos di Kelurahan Semampir tetapi diluar RW 5. Selain itu Pak D ini juga memiliki bangunan yang cukup kecil di RT 32, untuk beberapa saat Pak D tinggal di bangunan tersebut selama 1-2 bulan, namun beliau mendapat tekanan dari pihak pemerintah khususnya Satpol PP untuk meninggalkan bangunan tersebut. PakD mendapatkan surat peringatan dari Satpol PP untuk membongkar bangunannya tersebut.



Gambar 5 : Surat Peringatan pembongkaran bangunan
Sumber : Dokumentasi Peneliti

Melalui Pak D ini peneliti mendapatkan data mengenai upaya warga dalam melakukan penolakan kebijakan penggusuran dan upayanya dalam mempertahankan lahan tempat tinggalnya.

b. Pak E

Pak E adalah warga asli Sulawesi yang datang dan menetap di RW 5 khususnya di wilayah kompleks sejak 22 tahun yang lalu. Sebelum menetap di dalam kompleks, Pak E menetap di Kecamatan Bandar Kota Kediri. Pak Edulu memiliki rumah di dalam kompleks khususnya di RT 30. Pak Mansur dan istrinya berprofesi sebagai “*orang tua*” bagi para PSK atau yang biasa disebut juga sebagai mucikari atau germo. Didalam rumahnya Pak E juga menyediakan sarana seperti karaoke dan penyewaan wisma. Selain itu Pak E juga menjadi salah satu pihak keamanan yang menjaga wilayah lokasi tersebut. Pada saat sebelum pengusuran, Pak E ini juga turut serta dalam aksi demo-demo dan menentang adanya pengusuran. Pak E ini memiliki seorang putra yang baru saja lulus dari Perguruan Tinggi, selain itu istri Pak E pun sudah meninggal dunia. Sehingga pada pasca pengusuran Pak E hanya tinggal berdua saja dengan putranya dan menetap di kos-kosan di Kelurahan Semampir juga. Sebelum putranya mendapatkan pekerjaan, pasca pengusuran Pak E pun merasa kebingungan karena tidak memiliki sumber untuk mendapatkan nafkah karena pada awalnya Pak E menggantungkan pendapatannya dari adanya lokasi tersebut. Sehingga Pak E akhirnya bekerja apa adanya seperti menjadi tukang parkir di salah satu rumah makan yang ada di Kelurahan Semampir. Hal ini sangat berat dirasakan oleh Pak E dimana ia sudah tidak muda lagi. Namun setelah putranya mendapatkan pekerjaan, kehidupan Pak E ditanggung oleh anaknya. Dikarenakan Pak E ini juga salah satu warga yang merasakan langsung dampak dari adanya kebijakan pengusuran serta turut langsung dalam mengupayakan tempat tinggalnya, peneliti mendapatkan gambaran yang cukup dari informan Pak Mansur.

c. Pak F

Pak F adalah warga asli Kabupaten Malang yang menjadi pendatang dan menetap di wilayah RW 5. Pak F ini pun sudah sejak lama tinggal dan menjabat sebagai ketua RT . Pak F menetap di RW 5 hanya dengan putrinya saja. Kesehariannya Pak F ini hanya bekerja serabutan dan tidak menentu. Pak F ini adalah salah satu warga yang memiliki semangat paling kuat untuk menolak kebijakan penggusuran di wilayah lokalisasi. Beliau juga yang berada di barisan depan saat adanya penolakan pada hari H eksekusi penggusuran. Namun saat ini Pak F juga beserta warga lainnya merasa cemas akan adanya wacana penggusuran lanjutan untuk perluasan ruang terbuka hijau. Tetapi di sisi lain, Pak F sudah memikirkan bagaimana dan apa tindakan kedepannya jika memang wacana penggusuran lanjutan tersebut terjadi.

d. Pak G

Pak G kebetulan juga seorang pendatang dari kecamatan Doko Kota Kediri. Beliau pindah dan menetap di wilayah RW 5 dikarenakan telah menikahi istrinya yang memang asli Semampir. Pak G ini juga menjadi salah satu warga yang berjuang untuk mempertahankan hak-hak warganya. Apapun yang dirasa tidak menguntungkan bagi warganya, beliaulah yang berusaha memperjuangkannya. Seperti halnya dana kompensasi yang diberikan pemerintah kepada warga, lalu jaminan kesehatan warga, dan sebagainya. Pak G juga pada saat lokalisasi masih berjalan, beliau menjadi salah satu pihak keamanan di lokalisasi. kesehariannya disibukkan dengan mencari nafkah serta menjalankan kelompok jaranan miliknya. Beliau sangat berperan bagi warga RW 5 sehingga sedikit banyak beliau memahami betul bagaimana kondisi warganya yang sesungguhnya.

e. Pak H

Pak H ini menjadi salah satu warga eks lokasi yang rumahnya terkena gusuran. Pak H ini pun sudah tinggal di wilayah tersebut sejak tahun 1970-an. Pada saat lokasi masih berjalan, Pak H ini bekerja sebagai salah satu “germo” disana. Namun pada saat ini pasca penggusuran, Pak H hanya bekerja serabutan dan seadanya saja. Saat ini Pak H tinggal di daerah RT 31 yang “numpang” dengan warga lainnya.

3. Berdasarkan karakteristik ketiga yaitu Informan yang memahami proses implementasi kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri yaitu:

a. Bapak I

Bapak I adalah salah satu pegawai Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Kota Kediri. Beliau adalah yang salah satunya menjadi penanggungjawab atas kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokasi tersebut. Selain itu dari pihak pemerintah, beliau adalah yang memahami betul bagaimana pandangan pemerintah sehingga memutuskan untuk menetapkan kebijakan penggusuran dan bagaimana rencana pembangunan ruang terbuka hijau nantinya. Sehingga melalui Bapak I ini peneliti mendapatkan informasi mengenai proses implementasi kebijakan penggusuran serta rencana Pemerintah Kota Kediri dalam membangun ruang terbuka hijau.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan lokalisasi di Kota Kediri yang telah berjalan selama ± 47 tahun ini menjadi sasaran Pemerintah Kota Kediri dalam menerapkan kebijakan pengrusakan lokalisasi dan pembangunan ruang terbuka hijau. Penerapan kebijakan ini juga menuai kontroversi antara pemerintah dengan warga. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah mengenai pembubaran wilayah lokalisasi dengan kepentingan warga RW 5 baik di wilayah lokalisasi maupun wilayah luar lokalisasi di Kelurahan Semampir Kota Kediri. Berdasarkan hasil temuan lapang yang telah didapatkan menunjukkan bahwa kebijakan pengrusakan dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokalisasi RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri ini menyisakan suatu permasalahan tersendiri bagi warga, baik dampak secara ekonomi maupun dampak sosial. Kebijakan pengrusakan dan pembangunan ruang terbuka hijau ini awalnya mendapat perlawanan yang cukup kuat dari warga yang ditandai dengan adanya tindakan-tindakan pemberontakan kepada pihak pemerintah secara langsung, seperti halnya melakukan demo dan perlawanan ketika hari eksekusi. Perlawanan yang dilakukan warga ini dilakukan karena adanya ketidaksesuaian antara kepentingan pemerintah dalam melakukan pembubaran wilayah lokalisasi dengan kepentingan warga yang berusaha untuk mempertahankan tempat tinggalnya.

Adanya perlawanan yang dilakukan warga ini pun melalui beberapa proses sehingga harapannya warga dengan pemerintah dapat menghasilkan suatu

kesepakatan bersama. Jika berdasarkan teori Habermas mengenai tindakan komunikasi menyatakan bahwa tindakan komunikatif merupakan suatu cara dalam berkomunikasi yang digunakan untuk mencapai suatu kesepakatan secara bersama. Salah satu jenis tindakan komunikatif juga terdapat sifat kritis atau argumentatif di dalamnya, hal ini yang disebut Habermas sebagai diskursus. Dalam bab ini, peneliti akan lebih rinci menjelaskan mengenai pembentukan ruang publik serta respon warga RW 5 dengan pemerintah dalam implementasi kebijakan pengusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokalisasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kediri untuk mempertahankan tempat tinggalnya. Baik dari *lebenswelt* atau pandangan Pemerintah Kota Kediri dalam menerapkan kebijakan yang bertolak belakang dengan *lebenswelt* warga, bentuk kolonisasi sistem yang dilakukan pemerintah terhadap *lebenswelt* warga, proses diskursus yang dilakukan warga dengan pemerintah sebagai salah satu bentuk responnya atas kebijakan, hingga ketersediaan ruang publik terkait kebijakan pengusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau.

5.1 Proses dan Tindakan Pemerintah Kota Kediri dalam menerapkan Kebijakan Pengusuran dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri

Kebijakan pemerintah Kota Kediri dalam melakukan pengusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau ini pada awalnya adalah program nasional yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pembubaran wilayah lokalisasi di seluruh Indonesia yang kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Kediri untuk mengubah lahan eks lokalisasi menjadi ruang terbuka hijau. Melalui program nasional tersebut selanjutnya dihimbaukan kepada

pemerintah daerah provinsi dan dilanjutkan dengan pemerintah daerah kota dan kabupaten. Alur peraturan pembubaran lokalisasi dapat digambarkan sebagai berikut

ALUR ATURAN PEMBUBARAN LOKALISASI



Bagan 2 : Alur peraturan pembubaran lokalisasi
Sumber : Dokumentasi Peneliti

Dengan adanya peraturan pembubaran lokalisasi ini Pemerintah Kota Kediri telah berupaya banyak hal dalam melakukan pembubaran lokalisasi, seperti pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur pada tahun 1999 yang membuat kebijakan untuk menutup wilayah lokalisasi termasuk lokalisasi di Kelurahan Semampir Kota Kediri. Pada awalnya, penutupan wilayah lokalisasi ini dilakukan pada saat bulan puasa yang tujuannya untuk menghormati bulan suci, namun pada akhirnya penutupan lokalisasi dilanjutkan agar wilayah lokalisasi dapat ditiadakan. Namun pada kenyataannya kebijakan penutupan lokalisasi tersebut tidak terlaksana dengan baik, banyak dari warga eks lokalisasi yang secara diam-diam masih tetap menjalankan tindakan prostitusi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah Kota Kediri melakukan tindakan lanjutan yaitu dengan melakukan penggusuran di wilayah lokalisasi tersebut. Sama halnya seperti yang dipaparkan oleh salah satu staff DLHK sebagai berikut:

“....kan disitu kan setelah kita tutup eks lokalisasi kan untuk rumah karaoke to itu jadi rumah-rumah itu karaoke semua itu, jadi kosong tapi kalo malem untuk karaokean dan karena waktu itu arahnya ke prostitusi lagi itu soalnya tu, mau nggak mau kita bongkar” (Wawancara Staff DLHK Kota Kediri, 8 Februari 2018).

Dari penjelasan staff DLHK dapat dijelaskan bahwa pemerintah melakukan pembongkaran atau penggusuran wilayah lokalisasi ini dilakukan secara terpaksa karena kebijakan penutupan lokalisasi tersebut tidak dijalankan dengan baik, bahkan untuk menutupi adanya tindakan prostitusi warga lokalisasi mengaku bahwa mereka hanya membuka rumah untuk karaoke saja, namun pada nyatanya wilayah tersebut sudah menjadi rahasia umum bahwa wilayah RW 5 khususnya di RT 29 dan RT 30 terindikasi adanya kegiatan prostitusi. Selain itu Pemerintah Kota Kediri melakukan penggusuran juga karena adanya aturan yang “memaksa” Pemkot untuk membongkar bangunan-bangunan yang pada awalnya Pemkot hanya menghimbau untuk menutup kegiatan di lokalisasi dan tetap mewajibkan warga untuk membayar sewa lahan. Selain itu pemerintah juga menganggap bahwa adanya penggusuran ini tidak menjadi masalah yang besar karena pemerintah beranggapan bahwa warga lokalisasi merupakan warga diluar Kota Kediri atau pendatang yang memiliki ekonomi yang cukup.

Berjalannya kebijakan ini juga tidak terlepas dari adanya permasalahan, seperti adanya penolakan dari sebagian besar warga RW 5. Namun secara tegas Pemerintah Kota Kediri tetap berupaya untuk menjalankan proses kebijakan penggusuran tersebut. Proses kebijakan penggusuran wilayah lokalisasi ini diawali pada tahun 2012-2013 dengan melakukan tindakan sosialisasi dan memberikan pembinaan serta pelatihan yang tujuannya dapat menjadi sarana

untuk alih profesi bagi warga lokalisasi di RT 29 dan RT 30, namun tidak ada respon yang baik dari warga. Dalam hal ini warga menolak kegiatan sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah karena warga menginginkan secara tidak langsung dapat menolak kebijakan penggusuran. Setelah berbagai upaya pemerintah telah dilakukan, hingga pada akhir tahun 2016 pemerintah mulai memunculkan surat peringatan 1 hingga surat peringatan 3 sebagai bentuk peringatan kepada warga bahwa akan dilakukan penggusuran di wilayah lokalisasi dan juga meminta warga untuk segera mengosongkan bangunan. Hal ini juga dipaparkan oleh Pak C sebagai berikut:

“iyaa yang aset pemerintah kan ada banyak. Ada yang aset pertanian ada yang aset untuk hunian karyawan pemerintah. Awale november itu sudah sosialisasi, jadi akhire dimunculkan SP 1 SP2 SP3. surat peringatan surat pemberitahuan surat peringatan dan yang terakhir batasannya tanggal 10 ternyata mundur sampek tanggal 15. SK kotanya karena kan hunian penduduk belum selesai. 10 november mulaine awal november. jadi agustusan kae wes mulai rame, karena akhire desember terjadi” (Wawancara Pak C, 19 Desember 2017)

Dalam menjalankan kebijakan ini pemerintah tidak melakukan secara mendadak melainkan juga melewati berbagai tindakan. Seperti yang diawali pada tahun 2012-2013 Pemerintah Kota Kediri memberikan pembinaan – pembinaan berupa pembinaan keterampilan tata boga, menjahit atau tata rias yang tujuannya untuk alih profesi bagi warga lokalisasi agar dapat lebih mandiri dan mendapatkan jenis pekerjaan yang baru. Tidak hanya pembinaan keterampilan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri namun Pemkot juga memberikan bantuan – bantuan dana tiap bulannya yang diberikan kepada warga tiap KK khusus warga RT 29 dan RT 30. Selain itu Pemerintah Kota Kediri juga memberikan sosialisasi atau

himbauan bagi warga jika akan ada kebijakan pembubaran lokalisasi. Adanya sosialisasi ini dilakukan pemerintah secara langsung dengan mengumpulkan masyarakat dan juga melalui himbauan yang diberikan kepada ketua RT dan ketua RW, namun mayoritas warga tidak menghiraukan himbauan ini dan hanya beberapa warga yang memang menerima adanya kebijakan ini karena mereka sudah memahami jika Pemerintah ingin mengambil hak tanahnya.

Hingga pada akhirnya Pemerintah Kota Kediri menurunkan surat peringatan 1 pada bulan November 2016 hingga surat peringatan 3 pada awal Desember 2016 bagi warga RT 29 dan RT 30 sebelum hari eksekusi. Dengan diturunkannya surat peringatan untuk mengosongkan bangunan ini tidak membuat warga mentaati peraturan Pemerintah Kota Kediri, warga eks lokalisasi pun tetap berupaya melakukan perlawanan dengan salah satunya tidak meninggalkan rumahnya sampai pada hari eksekusi. Dalam mengatasi sikap warga yang terus menentang kebijakan ini, Pemerintah melakukan berbagai upaya seperti adanya penjagaan wilayah lokalisasi oleh kepolisian dan Satpol PP serta melakukan pemadaman listrik di wilayah lokalisasi tersebut.

Pada dasarnya sebelum dilakukan eksekusi pengusuran lokalisasi ini, pemerintah telah memberikan berbagai macam tindakan, seperti pada tahun 2012-2013 dimana pemerintah mulai memberikan pelatihan dan pendampingan bagi warga lokalisasi agar mereka memiliki keterampilan lain yang dapat digunakan sebagai alih profesi. Namun kegiatan pelatihan ini tidak direspon baik oleh warga karena berbagai alasan seperti pendamping yang diberikan tidak memiliki keahlian khusus, kemudian keahlian yang diajarkan tidak dapat diandalkan oleh warga untuk alih profesi. Selain itu pemerintah juga memberikan opsi kepada

warga di awal tahun 2016 saat melakukan sosialisasi, yang salah satunya yaitu dengan menyediakan dan mengarahkan warga yang tidak memiliki tempat tinggal untuk menetap di rusunawa Kota Kediri, namun beberapa warga mengeluhkan jika penghuni rusunawa menolak kedatangan warga eks lokalisasi. Seperti yang dipaparkan oleh staff DLHK sebagai berikut:

“itu sebenarnya satu dua oknum dari penghuni rusunawa, sebenarnya kan mereka nggak punya hak buat itu, itu memang ada satu dua oknum yang menempati situ bilang oo eks itu wong kurang ajar, lho sebenarnya kan nggak boleh gitu. Kita kan manusia sama manusianya..itu hanya oknum dari rusunawanya saja. kalo dari pemerintah kita anjurkan kalo mereka nggak punya tempat kita arahkan ke rusunawa, itu sudah opsi yang paling bagus itu sebenarnya, karena di jakartapun Ahok juga begitu, ketika itu digusur mereka ada tempat tinggal. kalo dia nggak mau tinggal di rusunawa itu masalahnya sendiri bukan pemerintah sebenarnya....”(Wawancara staff DLHK, 8 Februari 2018)

Setelah Pemkot menjalani proses yang cukup panjang dan menerima berbagai penolakan dari warga, pada tanggal 15 Desember 2016 pihak Pemerintah Kota Kediri yang dibantu dengan satuan gabungan kepolisian, satpol PP, serta TNI berupaya memaksa warga untuk segera mengosongkan bangunan karena akan segera dilakukan penggusuran. Hingga pada akhirnya Pemerintah Kota Kediri berhasil membongkar seluruh bangunan di wilayah lokalisasi RW 5 khususnya di RT 29 dan RT 30 dan menghilangkan situs prostitusi di Kota Kediri.

Pasca penggusuran, Pemerintah Kota Kediri juga dikhawatirkan dengan adanya isu nasional yaitu adanya penyebaran tindak prostitusi. Hal ini juga menjadi salah satu resiko Pemerintah ketika mereka melakukan pembubaran lokalisasi, namun Pemerintah Kota Kediri juga telah mengantisipasi terjadinya

penyebaran tindakan prostitusi dengan melakukan razia rutin di tempat-tempat yang memiliki peluang menjadi tempat prostitusi seperti di cafe dan tempat karaoke. Selain itu Pemerintah juga merencanakan kawasan yang telah ditertibkan tersebut menjadi ruang terbuka hijau dengan memberikan batasan pagar serta menanami pohon-pohon yang nantinya dapat menjadi hutan kota. Namun rencana Pemerintah untuk menjadikan wilayah eks lokalisasi menjadi hutan kota dialihkan menjadi salah satu taman bermain anak. Rencana Pemerintah Kota Kediri ini akan diaplikasikan pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan pihak Pemerintah Kota Kediri menggunakan sistem lelang dalam penggarapan ruang terbuka hijau tersebut. Hal ini dipaparkan oleh staff DLHK sebagai berikut:

“bukan, yang memperkerjakan itu di lelang jadi dalam membuat taman itu sistemnya di lelang karena nanti 10 milyar, jadi penggarapan sesuatu pekerjaan kalo lebih dari 200 juta itu akan dibuat lelang, jadi aku ndue pekerjaan 1 M sopo seng wani ngenyang luweh rendah itungan speknya yang standart nah ada 5 orang, enek seng ngenyang 97 enek seng ngenyang 98 enek seng ngenyang 9 lha berarti seng menang 9, itu namanya. lha itu nanti tahun 2019 itu kita adakan lelang pekerjaannya nanti juga dari kontraktor sendiri dengan tidak melibatkan warga tapi nanti setelah jadi kita akan melibatkan karang taruna kelurahan semampir” (Wawancara staff DLHK, 8 Februari 2018)

Adanya rencana pemerintah untuk membangun ruang terbuka hijau selain tujuannya untuk meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau di Kota Kediri, pihak pemerintah juga ingin adanya ruang terbuka hijau ini nantinya dapat menjadi sarana bagi warga RW 5 eks lokalisasi khususnya bagi warga RT 31 dan RT 32 sebagai wilayah terdampak akibat penggusuran untuk pemulihan ekonomi. Seperti halnya bagi warga eks lokalisasi yang terdampak dapat menjadikan ruang terbuka hijau menjadi sarananya untuk bekerja baik untuk berjualan makanan atau menjadi tukang parkir di area ruang terbuka hijau tersebut.

Selain itu seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dalam wacana pembangunan ruang terbuka hijau ini pada awalnya terdapat isu bahwa pemerintah akan melakukan penggusuran lanjutan di RT 31 dan RT 32 di wilayah RW 5 yang bertujuan untuk memperluas area pembangunan ruang terbuka hijau. Adanya isu penggusuran ini pada dasarnya hanyalah pemberitaan dari salah satu fraksi DPRD pihak LSM yang menaungi warga dan pemerintah hanya berfokus pada penggusuran wilayah lokalisasi saja. Hal ini dikarenakan dalam merumuskan kebijakan pihak pemerintah yang berdiskusi dengan DPRD tidak lepas dari pro dan kontra seperti yang dijelaskan oleh Staff DLHK sebagai berikut:

“Sebenarnya gini, statement dari..ini sebenarnya ceritanya panjang..sebenarnya gini jadi walikota itu kalau melaksanakan kebijakan apapun itu biasanya anggota DPR itu yang nggak se..yang oposisi maaf ya itu akan menentang akan menghalang-halangi itu biasanya..seandainya walikota berangkat dari PAN dan Golkar gitu ya nanti yang dari PDI atau yang dari mana pasti nggak begitu setuju untuk mengganjal itu, biasanya gitu biasanya..jadi statement yang dari DPR itu ya jangan dipercaya 100%, kebanyakan gitu biasanya..koyok pusat ngono kuwi lo Gubernur Ahok nyapo iku mesti enek seng menentang, gitu contohnya” (Wawancara Staff DLHK, 6 April 2018)

Dari pemaparan tersebut dapat dijelaskan bahwa isu wacana penggusuran lanjutan di RT 31 dan RT 32 sebenarnya hanya menjadi berita untuk mengacaukan suasana warga saja, dan sebenarnya bukan berasal dari Pemerintah Kota Kediri. Adanya isu penggusuran lanjutan ini juga ditegaskan oleh Walikota Kediri bahwa tidak akan ada penggusuran lagi. Hal ini juga dijelaskan oleh staff DLHK sebagai berikut:

“itu kan kebijakan himbauannya walikota itu yang sebelah utara itu masih ada sekitar 5 rumah itu tidak akan digusur..karena itu kan juga sewa di pemkot tanahnya rumahnya itu, jadi itu masih punya pemkot..saya nggak tau juga itu kebijakane walikota, soale waktu

mau ada bangunan taman itu walikotanya bilang gini 'itu sek enek beberapa rumah gak usah digusur ngko timbang rame' katanya gitu..apakah itu nanti ada unsur politiknya saya nggak tau..kan mau ada pilkada to mungkin ya nggak mau ada rame-rame itu walikotanya, tapi mungkin nanti sesudah pilkada yo nggak tau berubah kebijakannya yo nggak tau" (Wawancara Staff DLHK, 6 April 2018)

Dari pemaparan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa penegasan Walikota dalam pembatalan penggusuran lanjutan ini juga salah satunya dikarenakan saat ini sedang mendekati masa-masa Pilkada sehingga Walikota menghindari adanya aksi dari warga yang dapat menimbulkan keramaian lagi seperti kegiatan demo yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu pihak pemerintah tidak melanjutkan penggusuran lanjutan ini dikarenakan wilayah RW 5 saat ini hanya menjadi kampung rumah tangga biasa dan bukan lagi menjadi tempat lokalisasi, selama RW 5 bersih dari tindak prostitusi maka pemerintah tetap membolehkan warga untuk tinggal. Hal ini dapat dikatakan bahwa pembatalan penggusuran lanjutan di RW 5 ini selain dikarenakan RW 5 merupakan kampung rumah tangga biasa, pemerintah membatalkan penggusuran lanjutan dikarenakan adanya keberhasilan dari upaya warga melakukan penolakan kebijakan penggusuran yang salah satunya dengan melakukan demo tersebut. Dengan adanya upaya warga melakukan penolakan ini membuat pemerintah berpikir ulang jika memang ingin melakukan penggusuran lanjutan.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Kediri dalam melaksanakan kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau juga memiliki suatu pemahaman tersendiri yang menjadi suatu pengetahuan latar belakangnya pemerintah untuk menentukan suatu hal yang dianggap benar. Hal ini disebut

Habermas sebagai *lebenswelt*. Menurut Habermas (Habermas, 89-90:2006)

lebenswelt diartikan sebagai berikut:

“Subjek yang bertindak komunikatif selalu sampai pada pemahaman dunia kehidupan, dimana latar belakang sosial ini berfungsi sebagai sumber definisi situasi dengan klaim validitasnya yang digunakan subjek dalam berakting (bertindak) secara komunikatif dalam mengatur konteks-konteks situasi yang juga memerlukan kesepakatan di dunia kehidupan mereka.”

Alasan Pemerintah Kota Kediri melakukan pengusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau menjadi salah satu bentuk *lebenswelt*, dimana Pemerintah Kota Kediri menganggap bahwa adanya tindak prostitusi ini dianggap menyalahi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga dengan melakukan pengusuran wilayah lokalisasi ini diharapkan dapat menghilangkan kegiatan prostitusi di Kota Kediri. Namun *lebenswelt* atau pemahaman Pemerintah Kota Kediri ini tidak dipahami oleh warga RW 5, dimana pemerintah yang beranggapan bahwa wilayah lokalisasi harus dibubarkan sedangkan warga beranggapan bahwa lokalisasi menjadi satu-satunya lapangan pekerjaan yang mereka punya. Selain itu warga RW 5 diluar lokalisasi juga merasa terancam dengan adanya isu kebijakan pengusuran lanjutan, sehingga adanya ketidakpahaman *lebenswelt* antara pemerintah dan warga dapat menimbulkan adanya perbedaan pendapat dan memicu perseteruan.

Adanya perbedaan pemahaman ini pada dasarnya telah diupayakan pemerintah dengan melakukan tindakan sosialisasi agar warga dapat memahami tujuan Pemerintah Kota Kediri melakukan pengusuran. Namun kegiatan sosialisasi ini hanya berlaku satu arah. Sehingga warga tidak bisa mengutarakan kepentingannya terkait pelaksanaan kebijakan pengusuran dan pembangunan

ruang terbuka hijau dan warga cenderung menerima informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri. Hal ini juga disebutkan Habermas sebagai tindakan komunikasi, namun bentuk komunikasi satu arah ini termasuk dalam tindakan komunikasi naif dimana didalamnya tidak ada sifat kritis dan argumentatif dalam menerima suatu kebenaran.

Seperti yang dijelaskan oleh Habermas bahwa komunikasi naif merupakan bentuk komunikasi dimana subjek tidak berupaya mempertanyakan tentang suatu alasan, kejelasan atau pernyataan dan kebenaran terhadap pernyataan tersebut hanya diandaikan saja (Hardiman, 2009:43). Dalam tindakan komunikatif yang terjadi, warga tidak memiliki peluang untuk mengutarakan pemikirannya sehingga warga cenderung menerima apa yang dipaparkan oleh pihak pemerintah. Selain itu warga juga tidak memiliki kekuatan untuk mengutarakan pendapatnya. Warga berpikiran bahwa pemerintah tidak akan bisa ditentang, sehingga beberapa warga cenderung menerima keputusan pemerintah. Pada dasarnya warga juga memiliki sifat kritisnya terhadap kebijakan tersebut, namun kekritisannya tersebut tidak disuarakan dan bahkan mereka hanya mengandaikan saja dan cenderung mengalah dengan pihak pemerintah. Dalam tindakan komunikasi satu arah ini juga terlihat perbedaan antara dominasi pemerintah dengan warga.

Selain tindakan komunikatif naif, hal ini juga termasuk dalam tindakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah dimana bentuk sosialisasi yang disampaikan ini bukan berupa media untuk memberi pemahaman bagi warga tetapi cenderung memaksa warga untuk menerima *lebenswelt* pemerintah. Hal ini dikarenakan warga tidak diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya dan berargumentasi, sehingga warga cenderung dipaksa untuk diam dan menerima apa

yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Tindakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu bentuk konkrit dari adanya kolonisasi sistem atas *lebenswelt* warga. Sehingga adanya kolonisasi ini membuat warga beranggapan bahwa mereka tidak akan bisa untuk melawan pemerintah dan kebijakannya hingga warga akan cenderung memaksa diri mereka untuk menyetujui adanya kebijakan penggusuran tersebut.

Pada dasarnya adanya kolonisasi sistem atas *lebenswelt* masyarakat ini sudah dilakukan oleh pemerintah sejak awal menjalankan kebijakan penutupan lokalisasi. Dalam menerapkan kebijakan penutupan lokalisasi ini yang pada awalnya hanya diterapkan ketika bulan puasa saja pada akhirnya pemerintah juga cenderung memaksa warga agar menutup lokalisasi selamanya. Hal ini menjadi kolonisasi sistem karena pemerintah yang memang lebih memiliki kuasa justru memaksa warga lokalisasi agar menutup lokalisasi selamanya. Di sisi lain pemerintah tidak memahami kepentingan masyarakat dimana lokalisasi tersebut justru menjadi tempat mereka untuk mencari nafkah.

Kemudian bentuk kolonisasi sistem atas *lebenswelt* selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu ketika pemerintah memberikan pelatihan atau pembinaan kepada warga lokalisasi. Di sini pemerintah juga memaksakan warga untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan tersebut sehingga nantinya warga lokalisasi dapat beralih profesi. Namun di sisi lain warga beranggapan bahwa ketika pelatihan yang diberikan kepada warga tidak bervariasi, hanya pelatihan salon, menjahit, dan tata boga saja maka hal ini tidak akan memajukan warga itu sendiri. Seperti yang dipaparkan oleh Pak G sebagai berikut:

“.... Yo di kek i, di kek i usaha opo jenenge salon, rias kuwi di dol i dewe-dewe sebab e dinggo urip. **Lha kabeh kon ngurus salon terus**

seng arep neng salon sopo? Yo dana ne kuwi mbak, di kek i rombongan, di kek i rias manten tapi sebagian, gak kuabeh . tapi yo dingge hidup yo piye”

(...ya dikasih, dikasih usaha apa namanya salon, rias itu dijual sendiri-sendiri soalnya dibuat hidup. **Lah semua disuruh ngurus salon terus yang mau ke salonnya siapa?** Ya dananya itu mbak, dikasih gerobak, dikasih rias manten tapi sebagian, nggak semua. Tapi ya dibuat hidup ya gimana) (Wawancara Pak G, 16 Desember 2017)

Dalam hal ini tidak dilihat oleh pemerintah bagaimana penerapan pelatihan tersebut bagi warga. Hal ini dikarenakan pemerintah hanya memberikan pelatihan tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan warga terkait apa yang dibutuhkan warga, sehingga pelatihan yang diberikan dapat lebih bervariasi sesuai dengan kemampuan warga. Paksaan sistem yang diciptakan pemerintah kepada warga ini menjadi bentuk bagaimana kolonisasi sistem atas *lebenswelt*.

Selain itu dengan pemerintah memberikan surat peringatan kepada warga agar mengosongkan bangunan juga menjadi bentuk dari kolonisasi sistem atas *lebenswelt*. Hal ini dikarenakan kepentingan pemerintah yang segera menginginkan adanya pengusuran di wilayah lokalisasi justru memaksa warga agar mengosongkan bangunan yang pada saat itu sebenarnya warga dan pemerintah masih belum memiliki kesepakatan bersama, sehingga hal ini dirasa sangat merugikan warga.

Dalam menerapkan kebijakan, pemerintah yang memiliki kuasa justru memaksakan *lebenswelt* masyarakat agar mereka mentaati kebijakan yang telah dibuat. Dari sini terlihat bahwa sistem negara yang mendesak *lebenswelt* masyarakat agar kebijakan pengusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau dapat tetap berjalan tanpa hambatan. Hal ini lah yang sebenarnya dikritik oleh Habermas, bahwa adanya kolonisasi sistem atas *lebenswelt* dapat dihilangkan

dengan tindakan komunikasi, khususnya antara masyarakat dan pemerintah. Namun dalam hal ini, warga RW 5 dan pemerintah justru tidak melakukan tindakan komunikasi yang bersifat dua arah, dan tindakan komunikasi yang dilakukan hanya dalam bentuk sosialisasi yang bersifat satu arah saja. Selain itu pemerintah juga menganggap bahwa lahan yang dijadikan sebagai sasaran kebijakan merupakan tanah aset negara, sehingga pemerintahpun melupakan bahwa warga juga mempunyai hak atas bangunan yang seharusnya dapat dikomunikasikan kepada pemerintah terkait hak ganti rugi bangunan yang sesuai.

Adanya tindakan komunikasi naif, tindakan strategis, dan kolonisasi sistem atas *lebenswelt* ini pada dasarnya tidak menjadi tindakan komunikasi yang ideal bagi Habermas, hal ini dikarenakan dengan adanya tindakan komunikasi naif ini tidak menimbulkan sifat kritis dan seseorang cenderung menerima suatu pernyataan tanpa adanya argumentasi sehingga akan menyebabkan adanya penindasan dan dominasi dari salah satu pihak saja. Sedangkan tindakan strategis dan kolonisasi sistem atas *lebenswelt* justru memaksa warga dalam menerapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Serta kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan proses deliberatif yang dilakukan antara pemerintah dan warga itu sendiri. Secara tidak langsung Habermas juga mengemukakan bahwa dalam sistem pemerintahan seharusnya ada bentuk komunikasi yang berasal dari masyarakat dan diterima oleh pemerintah serta diolah menjadi suatu kebijakan yang tepat.

5.2 Respon Warga RW 5 Dengan Pemerintah Terhadap Kebijakan Penggusuran dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

5.2.1 Penolakan Kebijakan Penggusuran Warga RW 5 Sebagai *Lebenswelt*

Dalam menerapkan kebijakan, pemerintah tidak melakukan dialog dengan warga dan cenderung mengarah pada bentuk kolonisasi pemerintah terhadap masyarakat. Tindakan komunikasi naif dan tindakan strategis yang terjadi menyebabkan warga tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kebutuhan atau kepentingannya serta warga hanya menerima kepentingan pemerintah saja. Hal ini yang menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik antara pemerintah dan warga.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa warga yang menempati wilayah RW 5 khususnya wilayah lokalisasi tidak lepas dari adanya campur tangan pemerintah pada tahun 1970-an yang sengaja menempatkan lokalisasi di Kelurahan Semampir. Pada saat itu warga hanya memiliki hak guna pakai lahan saja atau hak guna bangunan (HGB) sejak tahun 1990-an, dan ketika warga memiliki hak guna pakai sebenarnya warga dianjurkan untuk membangun rumah yang bersifat tidak permanen dan semi permanen saja. Namun hampir keseluruhan bangunan di RW 5 baik wilayah lokalisasi maupun di luar lokalisasi adalah bangunan yang permanen. Menanggapi hal ini, warga memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada beberapa warga yang memang menerima kebijakan penggusuran dan dana kompensasinya. Hal ini dikarenakan warga memahami bahwa pemerintah mengambil hak tanahnya serta pemerintah tidak mengganti bangunan tempat tinggal mereka yang bersifat permanen dengan nominal yang tinggi.

Di sisi lain juga terdapat warga yang menolak kebijakan penggusuran khususnya warga RT 29 dan 30 yang menjadi pusat wilayah lokalisasi. Hal ini dikarenakan warga lokalisasi yang meskipun mereka mendapatkan pelatihan keterampilan dari pemerintah, namun mereka tidak menjalankan keterampilan tersebut dengan baik karena warga merasa bahwa keterampilan yang diberikan tidak dapat menjamin kehidupannya di masa yang akan datang. Selain itu warga juga merasa bahwa mereka telah menempati tanah negara tersebut juga dikarenakan adanya andil dan himbauan dari pemerintah agar tindakan prostitusi yang tersebar di Kota Kediri dapat terpusat menjadi satu di wilayah Semampir, dan juga warga telah menempati lahan tersebut selama berpuluh-puluh tahun dan telah membangun tempat tinggal yang cukup mewah, namun adanya andil pemerintah yang menempatkan warga di Semampir ini menjadi berbalik ketika Pemerintah Kota Kediri saat ini justru ingin menggusur wilayah tersebut. Selain itu dana kerohiman atau ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada warga dianggap terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan harapan warga. Hal ini yang membuat warga melakukan penolakan kebijakan penggusuran. Hal ini dipaparkan oleh Pak H sebagai berikut:

“wong duit 5 juta kuwi opo lek ngarani kerohiman iku kan untuk dingge kontrak, lha misale sampeyan dewe lek nduwe omah magrong-magrong ngene terus diganti gak sesuai gimana punyanya hanya itu”

(orang uang 5 juta itu apa istilahnya kerohiman itu kan untuk dibuat kontrak, lha misalnya kamu sendiri kalau punya rumah besar gini terus diganti nggak sesuai gimana, punyanya hanya itu) (Wawancara Pak H, 23 Februari 2018)

Dari pemaparan Pak H dapat dijelaskan bahwa warga merasa kecewa dengan dana kerohiman yang diberikan pemerintah. Bahkan untuk biaya

membangun tempat tinggal, warga mengeluarkan biaya yang cukup banyak namun hanya diganti dana kerohiman sebesar 7,5 juta. Dana kompensasi yang diberikan Pemerintah Kota Kediri sebesar 7,5 juta dianggap sangat tidak cukup bagi warga. Hal ini dikarenakan dana 7,5 juta tersebut dibagi menjadi 2 yaitu 2,5 juta untuk biaya hidup dan 5 juta untuk biaya kontrak sementara. Warga beranggapan bahwa dana 2,5 juta tidak akan cukup untuk biaya hidup dikarenakan biaya tersebut digunakan warga untuk transportasi angkut barang-barang rumah tangga.

Selain itu dana 5 juta yang ditujukan untuk biaya kontrak tidak diberikan kepada seluruh warga RT 29 dan RT 30, namun hanya kepada warga yang memang benar-benar tidak memiliki tempat tinggal lagi dan dana tersebut diberikan langsung kepada pemilik kontrakan. Hal ini membuat warga lokalisasi merasa kebingungan karena tidak memiliki tempat tinggal, pekerjaan serta biaya hidup untuk masa depan. Dengan adanya kebijakan penggusuran ini tidak hanya warga lokalisasi di RT 29 dan RT 30 saja yang merasakan dampaknya, tetapi bagi warga RT 31 dan RT 32 diluar lokalisasi juga merasakan dampaknya khususnya dibidang ekonomi. Hal ini diakibatkan warga RT 31 dan RT 32 juga menjadikan lokalisasi sebagai sumber mereka mencari nafkah. Sehingga warga mengalami kerugian yang tidak sedikit dan bagi warga lokalisasi, mereka juga tidak memiliki tempat tinggal lainnya. Sehingga seluruh warga RW 5, baik RT 29 dan RT 30 yang juga mendapatkan bantuan dari warga RT 31 dan RT 32 dengan tegas menolak adanya kebijakan penggusuran tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Pak B sebagai berikut:

“uang kerohiman kan hanya 2 juta setengah dan yang 5 juta buat kontrak, kerohiman 2 juta setengah kan untuk biaya transport biaya

usung-usung dan untuk otomatis kalo mau kontrak kan mesti benah-benah apa itu kan uang 2 juta setengah kan nggak mencukupi, sedangkan yang 5 juta yang nerima yang punya kontrakan, yang buat makan setiap harinya?” (Wawancara Pak B, 18 Desember 2018)

Selain adanya ketidaksesuaian dana kompensasi yang diberikan pemerintah kepada warga, alasan warga menolak kebijakan penggusuran ini yaitu karena warga telah menempati lahan RW 5 sejak berpuluh-puluh tahun lalu dan bahkan warga juga telah membayar pajak bangunan serta biaya sewa lahan, seakan-akan pemerintah melegalkan adanya lokalisasi. Namun ketika warga mengupayakan untuk mensertifikat lahan tersebut dengan alasan telah menempati wilayah tersebut lebih dari 25 tahun, tetap saja upaya tersebut tidak berhasil. Seperti yang diapaparkan oleh Pak F sebagai berikut:

“...sama kayak kabupaten situ sama sini kan sama. Yang disamping itu. Itu kan ikut kabupaten. Bedanya kan ini kenapa disini nggak bisa sertifikat disana kok bisa, padahal sama nempati minimal 15-20 tahun, hampir 20 tahun lah itu” (Wawancara Pak F, 23 Februari 2018)

Penjelasan warga diatas menjelaskan bahwa warga RW 5 juga menginginkan sertifikat lahan seperti tanah yang lokasinya di Kabupaten Kediri yang juga bersebelahan dengan RW 5. Pada dasarnya tanah kabupaten itu sedang tidak digunakan dan penduduknya tidak terlibat tindakan prostitusi, sehingga ketika warga berupaya mensertifikat hak milik hal itu dapat disetujui oleh pemerintah. Upaya warga untuk mensertifikat lahan dilakukan hingga pada tingkat Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena di tingkat daerah warga tidak berhasil mendapatkan hak sertifikat. Dalam hal ini warga berupaya untuk mensertifikat lahan dengan alasan mereka telah menempati wilayah RW 5 lebih dari 25 tahun. Pada dasarnya berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertahanan Negara Nasional No 9 Tahun 1999, seorang individu ataupun badan usaha dapat memohonkan hak milik atas tanah negara dengan ketentuan adanya perizinan peralihan hak dan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan tanpa adanya ketentuan berapa lama seseorang menetap di tanah aset tersebut. Namun dikarenakan warga tidak mendapat persetujuan dari pemerintah maka upaya warga memohon hak milik tidak berhasil. Selain itu banyak dari warga yang tidak memahami bagaimana prosedur untuk memohonkan hak milik tanah negara, bahkan warga cenderung menunggu adanya pihak yang dapat memfasilitasi mereka untuk memohonkan hak milik atas tanah tersebut, seperti yang dikatakan oleh Pak D sebagai berikut:

“ya itu pasti yang pertama ini kan tanah egendom, terus aturannya perpres atau kepres itu tahun 79 itu kalo warga sudah menempati lebih dari 25 tahun itu warga kan berhak mengajukan sertifikat, yang kedua yang paling penting warga itu nggak punya tempat tinggal mbak soale itu selaine tempat itu nggak punya tempat tinggal, lek ndue nyapo dipermaslahne. terus aturannya warga bisa mensertifikasi tanah gendom itu seperti apa to mbak” (Wawancara Pak D, 21 Februari 2018)

Seperti yang dipaparkan oleh salah satu informan peneliti yaitu Pak D yang menyatakan meski mereka tinggal di wilayah RW 5 yang merupakan aset pemerintah, namun ketika warga telah menempati dan tinggal selama lebih dari 25 tahun maka lahan tersebut dapat disertifikat menjadi hak milik. Namun hal ini tidak terjadi di RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri, berbeda dengan Kelurahan Jongbiru yang pada dasarnya lahan disana adalah aset pemerintah, namun warganya berhasil mensertifikat lahan. Hal ini yang diperjuangkan oleh warga eks lokalisasi hingga menempuh jalur hukum dan menjadi salah satu alasan melakukan penolakan kebijakan penggusuran wilayah lokalisasi. Namun disisi

lain pemerintah menyatakan bahwa lahan aset negara tersebut memang tidak bisa disertifikatkan karena memang pemerintah sedang membutuhkan lahan tersebut untuk dijadikan sebagai sarana bagi warga Kota Kediri, kecuali jika terdapat lahan aset negara yang tidak digunakan maka warga dapat memohonkan sertifikat lahan tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh staff DLHK sebagai berikut:

“itu gini, pemohon itu sebenarnya dia punya tanah bersebelahan dengan tanah Pemkot..jadi gini kalo tanah itu sudah dikuasai oleh pemerintah dan digunakan oleh pemerintah ituyo tidak akan pernah di acc oleh pemerintah untuk dimohon oleh masyarakat. tapi apabila tanah itu tanah yang tidak dimanfaatkan ada beberapa puluh tahun ya nanti akan diacc untuk pemindahan nama itu.. lah ini kan jelas akan digunakan untuk sarana prasarana kebutuhan masyarakat jadi ya nggak bakalan diacc nggak boleh gitu..memang ada warga yang mengajukan permohonan sertifikat itu memang ada tapi kan memang nggak diperbolehkan”(Wawancara staff DLHK, 6 April 2018)

Selain adanya penolakan kebijakan penggusuran wilayah lokalisasi, warga RW 5 juga merasa sangat kecewa kepada pihak pemerintah terkait wacana pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan eks lokalisasi. Pada dasarnya warga tidak menolak jika akan dibangun ruang terbuka hijau, namun warga tidak mendapat kepastian dari pihak pemerintah mengenai kapan akan diadakan pembangunan ruang terbuka hijau. Sehingga warga merasa bahwa pemerintah sangatlah kejam karena telah merobohkan tempat tinggal warga dan hanya diganti dengan ditanami pohon-pohon kecil saja selama 1 tahun lebih tanpa adanya tindakan selanjutnya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak E sebagai berikut:

“Ya kalau kita kita kena musibah gusuran ini itu kita nggak bisa ngomong apa-apa, terima rumah mewah mewah ditanduri kayu itu apa.. Dulu rumah di sini mewah mbak nggak ada yang jelek.. Andaikata rumah tuh disini ya maaf lokalisasi kalau di kampung itu 300 juta itu nggak cukup mbak.. Mewah dulu semua rumah di sini.. Itupun ada yang dikasih dulu pasarannya uang kontrak itu nggak semuanya nerima, ada yang nggak nerima juga kan gitu. Di sini

mbak selama tempat ini digusur banyak isu-isu Nggak tahu tuh dari mana katanya katanya begini tapi nyatanya kan sudah 1 tahun ini aja waktu digusur itu ada 2 bulan baru ditanduri kayu.. Baru 2 bulan mbak ditanduri kayu” (Wawancara Pak E, 22 Februari 2018)



Gambar 6: Kondisi lahan eks lokalisasi pasca pengusuran

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan warga RW 5 juga menginginkan adanya realisasi dari pemerintah terkait adanya wacana pembangunan ruang terbuka hijau. Warga juga menaruh harapan bahwa dengan dibangunnya ruang terbuka hijau ini dapat menjadi lahan mereka untuk mencari nafkah. Beberapa warga juga menginginkan pemerintah untuk mengikutsertakan warga RW 5 untuk diberi tempat untuk bekerja, seperti menjual makanan atau menjadi tukang parkir. Sehingga adanya pembangunan ruang terbuka hijau ini tidak hanya seolah menyengsarakan warga tetapi juga membawa dampak positif bagi warga. Seperti yang diutarakan oleh Pak G sebagai berikut:

“kalo permintaane warga ki ngene mbak, umpomo dibangun dingge wisata anu tempat wisata wi lek iso yo warga kene di kon kerjo, mboh kuwi tukang parkir mboh...sok mben ki aku rapat arep enek rumah sakit mbak etan ki. Rumah sakit karo lapangan futsal”

(kalau permintaannya warga itu gini mbak, misalnya dibangun dibuat wisata anu tempat wisata itu kalau bisa ya warga sini disuruh kerja, entah tukang parkir atau apa..besok lusa ini aku rapat mau ada rumah

sakit mbak di sebelah timur ini. Rumah sakit sama lapangan futsal)
(Wawancara Pak G, 16 Desember 2017)

Dalam hal ini pengalaman dan alasan-alasan warga yang berbeda-beda terkait penolakan kebijakan penggusuran wilayah lokalisasi ini menjadi salah satu bentuk *lebenswelt* warga yang mendasari mereka dalam bertindak atas adanya kebijakan tersebut. Berdasarkan penjelasan Habermas, *lebenswelt* diartikan sebagai pemahaman dunia kehidupan, dimana latar belakang sosial ini berfungsi sebagai sumber definisi situasi dengan klaim validitasnya yang digunakan subjek dalam berakting (bertindak) secara komunikatif dalam mengatur konteks-konteks situasi yang juga memerlukan kesepakatan di dunia kehidupan mereka (Habermas, 89-90:2006). *Lebenswelt* yang terbentuk pada tiap warga mengenai kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau menjadi sarana warga untuk saling memahami kebutuhan dan kepentingan satu sama lain. Dengan adanya keinginan untuk melakukan penolakan kebijakan penggusuran dari seluruh warga RW 5 diartikan bahwa *lebenswelt* tiap warga telah disepakati secara intersubjektif sehingga warga RW 5 memiliki pemahaman dan kepentingan yang sama yaitu untuk mempertahankan tempat tinggalnya.

Lebenswelt warga yang telah disepakati secara intersubjektif ini menghasilkan berbagai tuntutan dari warga dalam menolak kebijakan pemerintah untuk menggusur wilayah RW 5. Tuntutan warga meliputi dana kompensasi yang sesuai, diberikan tempat tinggal, diberikan lapangan pekerjaan, dan dapat mensertifikat tanah menjadi hak milik. Adanya tuntutan tersebut yang dijadikan warga RW 5 sebagai latar belakang mereka melakukan penolakan kebijakan penggusuran. Selain itu *lebenswelt* warga dalam melihat kebijakan penggusuran

ini tidak hanya bersifat secara ekonomi saja, namun juga secara sosial. Seperti halnya beberapa kegiatan-kegiatan warga yang pada masa sebelum penggusuran sering dilakukan, namun pada pasca penggusuran kegiatan tersebut akan cenderung terpecah, seperti kegiatan pengajian yang dilakukan oleh seluruh warga RW 5, kegiatan posyandu, dan bahkan kelompok bermain anak-anak yang terpecah karena adanya kebijakan penggusuran ini. Hal ini yang tidak dilihat oleh pemerintah dimana pihak pemerintah sendiri tidak bisa untuk menyediakan keadaan yang sama seperti masa sebelum penggusuran.

5.2.2 Tindakan Komunikatif dan Diskursus Atas Kebijakan Penggusuran dan Pembangunan RTH

Konsensus yang terbangun antar warga terkait penolakan kebijakan penggusuran untuk mempertahankan tempat tinggalnya yang bertolak belakang dengan konsensus pemerintah sendiri tidak dilakukan dengan mudah, melainkan warga juga menempuh berbagai proses yang tujuannya dapat menghasilkan suatu kesepakatan dengan pihak pemerintah. Adanya kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah lokasi ini direspon oleh warga dengan melakukan suatu penolakan. Namun dalam menjalankan penolakan ini warga melalui berbagai proses untuk menghasilkan suatu kesepakatan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, salah satunya dilakukan dengan membangun suatu tindakan komunikasi antar warga seperti melakukan kegiatan rapat bersama.

Seperti yang dijelaskan oleh Pak G sebagai berikut:

“yo menolak e ngene mbak sok aku yo ngrapatne neng warga barang. Penak e iki piye lek aku ngomong ngene gung koordinasi mbek warga gak wani aku mbak. Makane koordinasi sek kan ngene ngene sok dadi RW sok ngatasi kan ngoten to makane dirapatne.”

(ya menolaknya gini mbak besok aku juga merapatkan ke warga juga. Enaknya ini gimana kalo aku bilang gini belum koordinasi sama warga nggak berani aku mbak. Makanya koordinasi dulu kan gini gini nanti sok jadi RW sok mengatasi kan gitu makanya dirapatin) (Wawancara Pak G, 16 desember 2017)



Gambar 7 : Proses diskusi warga RW 5

Sumber : Arsip Warga RW 5

Dengan dilakukannya kegiatan rapat atau diskusi antar warga ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kesepakatan bersama mengenai kepentingan atau kebutuhan warga yang nantinya dapat disampaikan kepada pemerintah. Namun dalam melakukan kegiatan diskusi ini tidak semua warga ikut serta, ada sebagian kecil warga yang memang tidak mengikuti kegiatan diskusi dan tidak mengutarakan apa yang menjadi kebutuhannya tetapi hanya mengikuti hasil akhirnya saja. Selain itu juga terdapat beberapa warga yang justru berbeda pendapat dengan warga lainnya. Ada beberapa warga yang bahkan dianggap sebagai “musuh dalam selimut” yang justru berpihak pada pemerintah dan membantu pemerintah dalam proses pelaksanaan kebijakan penggusuran di wilayah lokalisasi. Hal ini juga dipaparkan oleh Pak G sebagai berikut:

“...pas arep digusur kene ki kumpul bendino kumpul kumpul mecahne masalah melawan golek jalur hukum panggah kalah, wes kene ki modele kurang peh nganti ko ndi ndi mbak warga ditarik i 600 ewuan kabeh biyen urunan ngge ngurus nyewo pengacara.

pengacarane nggugat neng PTUN nggugat neng suroboyo lewat jalur hukum yo kalah ndisek sak durunge digusur rapat neng musola, rapate ndelek mbak. ngko samar lek eroh uwong. uwong i ojo meneh lek sak RW, sak lingkungan keluarga lo enek seng mbelik sitik, sitok loro mesti enek..makane rapat ndisek wonge kene ki akeh seng dadi sok pengarep, golek wah pengen di wah. dadine akeh seng mbelo pemkot. dadi wes uler i mesti enek”

(pas mau digusur sini ini ngumpul setiap hari ngumpul ngumpul memecahkan masalah melawan cari jalur hukum tetap kalah, dah sini ini modelnya duh sampek mana mana mbak warga ditarikin 600 ribuan semua dulu patungan untuk ngurus nyewa pengacara. Pengaaranya menggugat di PTUN menggugat di Surabaya lewat jalur hukum juga kalah dulu sebelumnya digusur rapat di mushola, rapatnya sembunyi mbak. Nanti takutnya ketauan orang. Orang itu jangankan satu RW, satu lingkungan keluarga lo ada yang menyimpang sedikit, satu dua pasti ada.. makanya rapat dulu orangnya sini banyak yang jadi pahlawan, cari pujian pengen dipuji. Jadinya banyak yang membela Pemkot. Jadi ular itu pasti ada) (Wawancara Pak G, 16 Desember 2017)

Selain warga yang tidak aktif dalam membangun kesepakatan antar warga melalui proses diskusi, mayoritas warga RW 5 memiliki antusias yang tinggi jika melakukan kegiatan diskusi atau rapat, terlebih jika diskusi tersebut membicarakan mengenai tempat tinggal. Hal ini dijelaskan oleh Pak G sebagai berikut:

“woo dulu to banyak yang pomone aqua warga panganan warga wes rapat, akeh seng mbantu. Rapat kok mementingkan rumah wes akeh seng perhatian. Iki ra enek balai yo ra tau rapat. Balai ne neng musola”

(woo dulu ya banyak yang misalnya aqua warga makanan warga dah rapat, banyak yang membantu. Rapat kok mementingkan rumah dah banyak yang perhatian. Ini nggak ada balai ya nggak pernah rapat. Balainya di mushola) (Wawancara Pak G, 16 Desember 2017)

Pada masa sebelum dilakukannya penggusuran, warga RW 5 dapat dikatakan hampir setiap hari melakukan proses diskusi yang juga melibatkan seluruh warga termasuk Ketua RT dan Ketua RW serta sesepuh-sesepuh RW 5.

Dalam hal ini warga berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan lahan tempat tinggalnya, namun di sisi lain warga juga memiliki kendala yaitu berupa kekurangan dana untuk melanjutkan sidang gugatan tersebut karena dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Seperti yang dijelaskan oleh Pak G sebagai berikut:

“gak ada, dibiarin. Tanggapan e wes awak dewe mlayu sampek warga kene ki nggugat nang PTUN Suroboyo. Sidang kalah neng PTUN kalah neng kediri kalah wes akhire pasrah. Seng diharpno sidang kuwi gek iso menang tapi kan butuh dana. Danae ko ndi”

(gak ada, dibiarin. Tanggapannya dah kita lari sampek warga sini ini menggugat di PTUN Surabaya. Sidang kalah di PTUN kalah di kediri kalah dah akhirnya pasrah. Yang diharapkan sidang itu bisa menang tapi kan butuh dana. Dananya dari mana) (Wawancara Pak G, 16 Desember 2017)

Dalam hal ini warga dengan segala *lebenswelt* yang dimilikinya berupaya untuk melakukan suatu tindakan komunikatif dengan pihak pemerintah yang didalamnya juga terdapat kesempatan-kesempatan bagi warga dan pemerintah dapat bebas mengutarakan pendapatnya atau yang disebut Habermas sebagai proses diskursus. Secara lebih rinci Habermas mengartikan diskursus sebagai lanjutan dari tindakan komunikatif, dengan caranya argumentatif dalam komunikasi yang menuntut penjelasan rasional dan akan menjadi kritis (Hardiman, 2009:45). Dalam kegiatan diskusi yang dilakukan warga RW 5 lebih tepatnya dilakukan dengan DPRD, dimana DPRD sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. dalam proses diskusi antara warga dan DPRD ini tiap anggota berkesempatan untuk menyatakan kepentingannya dan juga menolak pendapat anggota lain yang dianggap tidak sesuai terkait adanya kebijakan penggusuran. Kegiatan ini juga terdapat sifat kritis didalamnya dimana warga dan DPRD saling berargumen mengenai kebijakan

penggusuran tersebut serta memutuskan langkah apa yang akan dilakukan untuk menolak kebijakan penggusuran. Dalam proses diskursus ini, warga RW 5 memiliki wacana tersendiri yaitu dengan membuat beberapa tuntutan-tuntutan yang harapannya dapat tersampaikan kepada pemerintah. Beberapa argumen warga yang disampaikan kepada pihak DPRD yaitu:

1. Seluruh warga RW 5 dengan tegas menolak adanya kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah eks lokalisasi
2. Warga RW 5 berupaya untuk memohonkan pergantian sertifikat hak tanah dari hak guna pakai menjadi sertifikat hak milik

Dari beberapa argumen warga diatas yang diupayakan untuk disampaikan kepada DPRD ini juga didasari karena adanya ketidaksesuaian antara kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau dengan kepentingan warga. Warga merasa bahwa kebijakan tersebut sangat merugikan bagi warga RW 5 khususnya warga lokalisasi itu sendiri. Proses diskusi antara warga dengan DPRD ini dilakukan agar kepentingan warga dapat tersampaikan kepada pihak pemerintah dan warga dapat meminta kejelasan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Proses diskusi antara warga dan pihak DPRD ini juga menghasilkan suatu kesepakatan bersama terkait langkah atau tindakan yang dilakukan oleh warga RW 5, pihak DPRD menjanjikan jika mereka akan membantu warga dalam proses penolakan pembubaran lokalisasi.

Namun pada hari eksekusi tidak ada satupun dari pihak DPRD yang membantu warga dalam menyampaikan kepentingannya kepada pemerintah. Hal ini dipaparkan oleh Pak G sebagai berikut:

“yo ada dulu, dulu pihak komisi C komisi A dulu kan seng mbelani kene iki pak Z wong dewan. Ketua DPRD Kediri iku nggeh omong-omongan neng kono yo mbelani, tapi pas deng tanggal 15 yo gak enek kabeh. Alasane ditugasne ditugasne pak wali kota neng luar kota kabeh, dadine snag mbelani gak enek” (yo ada dulu, dulu pihak komisi C komisi A dulu kan yang membela sini in pak Z orang dewan. Ketua DPRD Kediri itu ya omong-omongan disana itu membela, tapi pas tepat tanggal 15 ya nggak ada semua. Alasannya ditugasin Pak Walikota ke luar kota semuanya, jadinya yang membela nggak ada) (Wawancara Pak G, 16 Desember 2017)

Hal ini terlihat bahwa diskursus yang dilakukan antara warga RW 5 dengan pihak DPRD hanya sebatas pada proses diskusi saja. Bahkan kesepakatan yang terbentuk antara warga dan DPRD tidak dapat merubah kebijakan pemerintah. Keberpihakan DPRD berada diantara warga dan pemerintah, di satu sisi DPRD menjalankan tugasnya untuk menjembatani warga dengan pemerintah, namun di sisi lain juga tidak bisa lepas dari dominasi pemerintah. Dikarenakan pihak DPRD tidak membantu warga untuk melakukan penolakan, hal ini membuat warga merasa kecewa dan bahkan sebagian besar warga melakukan aksi protes atau demo di kantor DPRD Kota Kediri. Pada dasarnya aksi protes atau demo ini tidak hanya sebagai salah satu tindakan ekstrim yang dilakukan warga, tetapi juga sebagai bentuk argumentatif warga terhadap kebijakan yang berupaya menyuarakan kepentingannya kepada pihak pemerintah. Hal ini juga dipaparkan oleh Pak E sebagai berikut:

“Dua kali mbak itu demo terakhir di anggota dewan tapi nggak ada tanggapan sama sekali malah setiap itu misalnya hari ini kita berunjuk rasa di balai Walikota malamnya itu di sini Satpol PP tentara polisi tekanan lah jadi otomatis kan orang itu mau ke sini takut dengan sendirinya Oh di sana ada penjagaan ketat pertama mbak-mbak yaitu yang mengadu nasib di sini cari nafkah istilahnya pergi semua Mbak begitu pergi semua” (Wawancara Pak E, 22 Februari 2018)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh pemaparan Pak B sebagai berikut:

“ya sebelum penggusuran itu juga ada demo menyatakan aspirasi dan orasi tapi nggak ada tanggapan terus gimana alternatifnya dihimbauan dari ee ibarat gimana ya tokoh masyarakat menghimbau ke warganya kalo bisa ya nggak keluar rumah sebab kan posisinya listrik sudah padam” (Wawancara Pak B, 18 Desember 2017)

Tidak hanya pihak DPRD yang melakukan proses diskusi dengan warga RW 5, pihak pemerintah khususnya Walikota Kediri juga sempat mengundang beberapa perwakilan dari warga RW 5 yaitu 4 orang RT, 4 orang sesepuh dan 2 orang warga untuk datang ke kantor walikota dan membahas mengenai kebijakan penggusuran. Namun ketika warga mendatangi balai walikota, tidak ada tanggapan dari pihak pemerintah bahkan proses diskusi dengan pemerintah yang memang diharapkan warga ini tidak terjadi. Hal ini juga membuat warga sangat kecewa, sehingga warga juga melakukan aksi protes atau demo di kantor Walikota Kediri. Aksi warga melakukan protes ini bertujuan untuk meminta pihak pemerintah menepati janjinya untuk melakukan diskusi dengan warga agar apa yang sebenarnya diinginkan oleh warga dapat tersampaikan, namun hal ini tidak terjadi sehingga warga mengutarakan aspirasinya dengan cara berdemo. Hal ini juga diungkapkan oleh Pak G sebagai berikut:

“ya penjelasan katanya mau apa itu ngomong secara pribadi tapi kenyataane pak wali gak sido nyeluk. Sak durunge disgusur kan arep di jak omong-omongan RT 4 RW karo sesepuh 4 wong 10. biyen arep dijak omong-omongan neng kantor walikota tapi kenyataane gak enek blas. akhire penolakane demo nang DPRD demo neng.. wes pokok demo-demo”

(ya penjelasan katanya mau apa itu ngomong secara pribadi tapi kenyataannya pak wali nggak jadi manggil. Sebelumnya digusur kan mau diajak omong-omongan RT 4 sama sesepuh 4 orang 10. Dulu mau diajak omong-omongan di kantor walikota tapi kenyataannya

nggak ada sama sekali. Akhirnya penolakannya demo di DPRD demo di..dah pokoknya demo-demo) (Wawancara Pak G, 16 Desember 2017)

Penjelasan mengenai upaya warga dalam melakukan orasi juga diperkuat dengan pemaparan dari B sebagai berikut:

“ya sebelum penggusuran itu juga ada demo menyatakan aspirasi dan orasi tapi nggak ada tanggapan terus gimana alternatifnya dihimbauan dari ee ibarat gimana ya tokoh masyarakat menghimbau ke warganya kalo bisa ya nggak keluar rumah sebab kan posisinya listrik sudah padam” (Wawancara B, 18 Desember 2017)

Keresahan warga RW 5 tidak hanya terjadi pada masa sebelum penggusuran wilayah lokalisasi, namun warga juga meresahkan adanya pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah untuk melakukan penggusuran lanjutan di seluruh wilayah RW 5 dan berupaya untuk memperluas lahan untuk dibangun ruang terbuka hijau. Seperti yang dipaparkan oleh Pak F sebagai berikut:

“sebelum, yang ditakuti warga cuma itu masalahnya kalo udah itu nggak ditarik, pokok e pajak sama PBB itu udah nggak ditarik gitu lo mbayar ndak boleh..yang kita takuti itu ada pelebaran lagi, makanya ada pelebaran lagi apa ndak itu ya belum tau Cuma yang kita takuti itu lo mbak” (Wawancara Pak F, 23 Februari 2018)

Dalam hal ini respon warga atas kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau dengan melakukan penolakan kepada pemerintah yang pada awalnya dilakukan dengan membangun kesepakatan antara warga dengan DPRD, yang kemudian ditambah ajakan pemerintah khususnya Walikota untuk berdiskusi bersama yang pada akhirnya proses diskursus tersebut tidak terlaksana. Berdasarkan penjelasan Habermas mengenai tindakan komunikasi ini terbagi menjadi dua yaitu tindakan komunikasi naif dan tindakan komunikasi reflektif.

Komunikasi naif ini juga terjadi antara warga RW 5 dengan pihak pemerintah, dimana pemerintah yang telah memberikan sosialisasi tetapi cenderung bersifat satu arah dan warga tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingannya. Hingga pada sebagian warga RW 5 yang justru menerima dan memahami maksud dan tujuan program pemerintah cenderung pasrah adanya kebijakan tersebut sehingga mereka tidak melakukan perlawanan secara langsung. Hal ini dijelaskan oleh B sebagai berikut:

“menerimanya itu gini, ya mau nggak mau kalo sudah kebijakan ya mengacu dari tanah yang ditempati itu kan tanah pemkot dan sesuai di SK itu bunyinya kan satu tidak boleh di jual belikan dan bilamana pemerintah kota membutuhkan ya harus diberikan. itu yang memahami. kalo bisa tanah kan milik pemkot bangunan kan milik warga, paling tidak itu harus ada ganti bangunan kan seperti itu. soalnya ndek sini kan sudah terbit pajak sewa, macam kayak PBB warga juga aktif sewa tanah juga aktif”
(Wawancara B, 18 desember 2017)

Selain tindakan komunikasi naif yang terjadi, juga terdapat tindakan komunikasi reflektif atau yang disebut Habermas dengan Diskursus. Proses Diskursus ini terjadi dalam bentuk kegiatan diskusi yang dilakukan oleh warga RW 5 khususnya warga lokalisasi pada masa sebelum eksekusi penggusuran dengan pihak DPRD. Kegiatan diskusi atau rapat yang dilakukan warga dengan DPRD ini dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menolak kebijakan penggusuran serta menetapkan tuntutan-tuntutan yang akan disampaikan kepada pihak pemerintah. Dalam kegiatan ini juga tidak lepas dari adanya penyampaian pendapat tiap warga sehingga dalam proses diskursus ini lebih bersifat terbuka tanpa adanya dominasi dari pihak manapun. Dalam proses diskursus ini warga memiliki hak untuk mengungkapkan kepentingannya, berhak menolak dan menerima dari pendapat

lain, dan tanpa adanya halangan untuk beraspirasi. Sama halnya dengan pendapat Habermas (Hardiman, 2009) bahwa seseorang yang berpartisipasi dalam proses diskursus ini pada dasarnya dipengaruhi oleh kepentingannya dan kebutuhannya yang nantinya dapat dicapai melalui konsensus.

Selain itu Habermas juga membedakan diskursus menjadi dua yaitu diskursus praktis dan diskursus teoritis. Berdasarkan penjelasan Habermas diskursus praktis lebih mempersoalkan klaim ketepatan pernyataan-pernyataan normatif (Hardiman, 2009:45). Dalam proses diskursus praktis ini warga RW 5 dan pihak DPRD saling berargumentasi mengenai ketepatan kebijakan penggusuran wilayah eks lokasi yang dianggap pemerintah menjadi salah satu cara yang benar untuk meniadakan kegiatan prostitusi di Kota Kediri. Namun disisi lain berdasarkan pengalaman warga RW 5 dengan kebijakan penggusuran tersebut dirasa tidak tepat karena sangat merugikan masyarakat, karena warga juga memiliki pandangan bahwa tugas pemerintah adalah untuk mengayomi masyarakat bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Hal ini terus menjadi perdebatan antara warga dan DPRD dimana warga yang merasa dirugikan oleh pemerintah dan menyatakan bahwa kebijakan penggusuran eks lokasi dirasa sangat tidak tepat. Bagi Habermas diskursus praktis ini menjadi sebuah prosedur komunikasi yang ideal karena dapat menguji ketepatan dari suatu aturan atau khususnya pada kebijakan penggusuran ini melalui proses komunikasi sehingga menghasilkan kesepakatan intersubjektif. Di sisi lain warga tidak mengatur apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah agar kebijakan yang dibuat dapat dianggap benar, namun warga hanya menilai bahwa kebijakan penggusuran tersebut dirasa sangat tidak tepat karena sangat merugikan warga.

Tidak hanya diskursus praktis yang terjadi, namun warga RW 5 dan DPRD juga melakukan proses diskursus teoritis. Bagi Habermas dalam diskursus teoritis orang lebih mempermasalahkan klaim kebenaran pernyataan-pernyataan teoritis-empiris (Hardiman, 2009:45). Dalam hal ini warga dan DPRD saling berargumentasi mengenai adanya isu kebijakan penggusuran lanjutan. Warga mempermasalahkan mengenai adanya isu kebijakan penggusuran lanjutan ini dikarenakan warga menganggap bahwa ketika Pemerintah melakukan penggusuran di wilayah lokalisasi, pemerintah memiliki undang-undang terkait pembubaran lokalisasi yang dijadikan sebagai landasan. Namun ketika terdapat isu kebijakan penggusuran lanjutan di RW 5 diluar wilayah lokalisasi, inilah yang menjadi pertanyaan warga karena pada dasarnya pemerintah tidak memiliki alasan yang cukup dan tidak adanya landasan yang membenarkan adanya penggusuran lanjutan di wilayah rumah tangga RW 5.

Sebagai bentuk respon atas kebijakan penggusuran, warga RW 5 dan DPRD telah melakukan proses diskursus untuk mendapatkan kesepakatan bersama terkait tuntutan-tuntutan yang diajukan kepada pihak pemerintah. Namun kesepakatan yang telah terbangun antar warga melalui proses diskursus ini tidak tersampaikan kepada pemerintah. Bahkan proses diskursus yang dilakukan hanya menjadi syarat agar aspirasi warga dapat tersampaikan tanpa mengubah kebijakan pemerintah yang telah dibuat. Pada dasarnya pihak DPRD yang telah berdiskusi terkait tuntutan-tuntutan warga terhadap kebijakan penggusuran bersedia untuk membantu warga, namun pada akhirnya pihak DPRD tidak dapat membantu banyak karena memang DPRD bukan sebagai penentu dan pembuat kebijakan. Hal ini yang membuat warga RW 5 merasa kecewa dengan pihak

DPRD karena tidak bisa menjembatani kepentingan warga dan kepentingan pemerintah.

Tidak hanya terhenti pada proses diskusi warga dengan DPRD, tetapi juga warga berupaya untuk melakukan proses diskusi dengan pihak pemerintah melalui undangan Walikota Kediri dengan tujuan agar kedua pihak dapat memahami kepentingan satu sama lain sehingga dihasilkan suatu kesepakatan bersama. Namun ajakan pemerintah tersebut tidak terlaksana. Seperti yang dipaparkan oleh Pak G sebagai berikut:

“ya penjelasan katanya mau apa itu ngomong secara pribadi tapi kenyataane pak wali gak sido nyeluk. Sak durunge disgusur kan arep di jak omong-omongan RT 4 RW karo sesepuh 4 wong 10. biyen arep dijak omong-omongan neng kantor walikota tapi kenyataane gak enek blas. akhire penolakane demo nang DPRD demo neng.. wes pokok demo-demo”

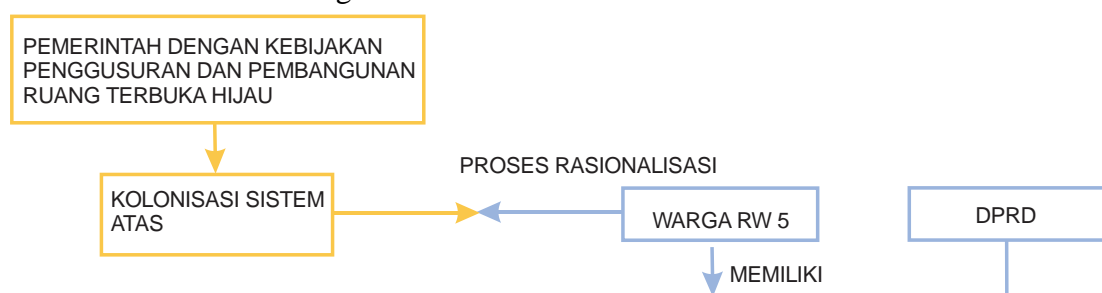
(ya penjelasan katanya mau apa itu ngomong secara pribadi tapi kenyataannya pak wali nggak jadi manggil. Sebelumnya digusur kan mau diajak omong-omongan RT 4 sama sesepuh 4 orang 10. Dulu mau diajak omong-omongan di kantor walikota tapi kenyataannya nggak ada sama sekali. Akhirnya penolakannya demo di DPRD demo di..dah pokoknya demo-demo) (Wawancara Pak G, 16 Desember 2017)


Berdasarkan penjelasan Pak G diatas, tidak adanya tanggapan pemerintah terkait proses diskusi yang dijanjikan hal ini yang melandasi warga melakukan aksi demo. Warga beranggapan bahwa bagaimanapun caranya pemerintah harus mendengarkan aspirasi warga. Dalam hal ini pemerintah cenderung menerapkan kebijakan ini secara satu arah saja tanpa memberikan kesempatan warga mengutarakan apa yang menjadi keinginannya.

Menurut Habermas mengenai ruang publik yaitu ruang diantara masyarakat sipil dan negara, dimana diskusi publik kritis mengenai persoalan-

persoalan kepentingan umum dilindungi secara institusional (Habermas, 2007). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa ruang publik terkait kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau masih belum terjadi. Hal ini dikarenakan kesepakatan yang dihasilkan dari proses diskursus yang terjadi antara warga dan DPRD tidak tersampaikan kepada pihak pemerintah, sehingga kesepakatan tersebut tidak dapat merubah implementasi kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau. Meskipun dalam implementasi kebijakan tersebut warga telah berupaya melakukan penolakan, namun ketika kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau tetap terlaksana dengan pola pikir pemerintah maka dikatakan bahwa ruang publik tidak terbangun. Hal ini juga dikarenakan *lebenswelt* pemerintah yang masih dominan sehingga memaksa *lebenswelt* warga agar mentaati kebijakan tersebut atau yang disebut Habermas dengan kolonisasi sistem atas *lebenswelt* masyarakat. Sedangkan di sisi lain Habermas mengartikan ruang publik adalah ruang diantara masyarakat dengan pemerintah melakukan diskusi kritis. Ruang publik tidak akan ada ketika konsensus warga tidak didiskusikan dengan pihak pemerintah, karena pemerintah memiliki kuasa yang lebih tinggi dibandingkan warga. Dalam ruang publik juga terdapat unsur dominasi didalamnya, namun dominasi tersebut telah menyatu dengan adanya proses diskursus sehingga apa yang menjadi kepentingan pemerintah dan warga dapat disepakati dalam ruang publik tersebut.

Berdasarkan runtutan penjelasan terkait proses pemerintah dalam menerapkan kebijakan penggusuran hingga *lebenswelt*nya serta respon warga dan pemerintah atas kebijakan yang dilakukan melalui proses diskursus dapat diilustrasikan sebagai berikut:





Bagan 3 : Bagan Penjelasan Respon Warga dan Pemerintah atas Kebijakan
Sumber : Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan bagan diatas menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri memiliki *lebenswelt* yang juga dilandasi oleh Perda Kota Kediri untuk menghilangkan lokalisasi dan berupaya membangun ruang terbuka hijau dengan cara melakukan penggusuran, justru menjalankan kebijakannya dengan melakukan kolonisasi sistem atas *lebenswelt* masyarakat. dimana kolonisasi ini memaksa masyarakat agar mentaati kebijakan yang telah mapan. Namun hal ini bertolak belakang dengan kondisi warga RW 5 yang justru memiliki pemikiran yang rasional, dimana mereka tidak ingin adanya kolonisasi sistem tersebut dapat merugikan mereka. Sehingga dari sini warga memberikan respon dengan menentang dan menolak adanya kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau yang implementasinya cenderung dipaksakan. Dalam melakukan penolakan, warga RW 5 juga dilandasi dengan *lebenswelt* sebagai bentuk

argumen mereka dalam penolakan yaitu (1) lokasi ini dijadikan sebagai satu-satunya sarana mereka dalam mencari nafkah, (2) warga beranggapan bahwa mereka sudah tinggal di lahan tersebut sudah lama. Argument tersebutlah yang dijadikan landasan warga dalam melakukan diskursus khususnya dengan pihak DPRD selaku pihak ketiga antara pemerintah dan masyarakat. dalam proses diskursus antara masyarakat dan DPRD, warga berupaya mensuarakan kepentingannya agar dapat tersampaikan kepada pihak pemerintah.

Dari adanya proses diskursus yang dilakukan antara masyarakat dan pemerintah ini juga menghasilkan kesepakatan berupa wacana, dimana pihak DPRD menjanjikan untuk membantu warga dalam melakukan penolakan serta mendukung warga untuk memohonkan sertifikat hak milik atas lahan. Namun disisi lain janji DPRD untuk membantu warga hanyalah menjadi tindakan DPRD untuk meredakan amarah warga, selain itu proses diskursus yang dilakukan hanya menjadi bentuk formalitas dan DPRD hanya cenderung mendengarkan saja tanpa menyalurkan aspirasi warga. Dari sini terlihat bahwa proses diskursus yang dilakukan ini juga mempengaruhi ketersediaan ruang publik atas kebijakan tersebut. Dimana dalam hal ini ruang publik yang diharapkan Habermas sebagai sarana melawan kolonisasi masih belum terbangun. Hal ini dikarenakan kesepakatan yang dihasilkan dari proses diskursus tidak sampai pada pemerintah sebagai pemegang kuasa. Sehingga kesepakatan tersebut tidak dapat merubah implementasi kebijakan, dan kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau masih tetap dilaksanakan dengan pola pikir pemerintah yang cenderung memaksa kehendak warga. Dari sini juga terlihat bahwa dengan tidak

terbangunnya ruang publik maka dapat menggambarkan bahwa demokrasi deliberatif disini tidak terlaksana.

5.2.3 Strategi Baru Warga RW 5 Menanggapi Kebijakan Penggusuran

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak hanya kebijakan penggusuran wilayah lokalisasi saja yang meresahkan warga tetapi juga adanya wacana kebijakan penggusuran lanjutan di seluruh wilayah RW 5 yang menjadi ketakutan warga saat ini. Warga RW 5 khususnya RT 31 dan RT 32 merasa bahwa kebijakan penggusuran lanjutan ini dirasa tidak tepat. Adanya wacana kebijakan penggusuran lanjutan ini belum diketahui oleh seluruh warga. Selain itu bagi beberapa warga yang telah menerima wacana kebijakan ini memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Ada sebagian warga yang menanggapi dengan melakukan penolakan lagi dan ada yang menanggapi dengan memikirkan langkah yang tepat agar adanya kebijakan tersebut tidak menyengsarakan masyarakat dan bahkan ada warga yang hanya pasrah dengan kebijakan pemerintah.

Adanya keinginan beberapa warga untuk melakukan penolakan ini dikarenakan warga merasa kecewa karena seakan-akan pemerintah menyengsarakan warga RW 5 khususnya warga terdampak. Selain itu warga berasumsi bahwa kebijakan penggusuran lanjutan ini dirasa tidak tepat karena wilayah RW 5 saat ini hanya menjadi wilayah kampung rumah tangga dan tidak ada kegiatan prostitusi, sehingga alasan pemerintah untuk melakukan penggusuran lanjutan ini dirasa sangat tidak tepat. Hal ini juga dijelaskan oleh Pak B sebagai berikut:

“ya jelas ya menolak lah, warga RW 5 sebagian diluar lingkungan RT yang kena dampak penggusuran itu kan kita - kita ini berada di luar lokasi to, ya mendukungnya itu ya karena tempat praktek prostitusi. Lha kalo sesuai yang mbak dengar atau baca di media mau di bangun RTH seluas RW 5 ya itu nanti kaji ulangnya kan penolakannya kan ya kalo dalem kan tempat prostitusi sedangkan ini kan kampung.” (Wawancara Pak B, 18 Desember 2017)

Namun adanya semangat warga untuk menolak kebijakan penggusuran ini masih belum diterapkan, hal ini dikarenakan masih banyak warga yang belum menerima wacana kebijakan tersebut dan warga juga masih belum mengetahui kepastian dari kebijakan tersebut. Tetapi di sisi lain warga telah mengambil sikap waspada jika benar kebijakan penggusuran lanjutan akan dilakukan.

Selain itu beberapa warga justru lebih pasrah dengan adanya kebijakan penggusuran lanjutan ini. Hal ini dikarenakan warga merasa takut untuk menolak dan melawan pemerintah. Seperti yang terjadi pada masa penggusuran lokalisasi, warga yang menolak sempat dianggap sebagai provokator sehingga pemerintah bersikap tegas dengan menciduknya dan memasukkannya ke penjara. Hal ini menjadi ketakutan dan trauma tersendiri bagi warga jika nantinya warga menolak akan terjadi hal yang sama. Seperti yang dijelaskan oleh Pak G sebagai berikut:

“yo ape berontak ngko salah..enek mbak dari LKK ku ranah ku RW, seksi keamanan ku jenenge pak X, iku tau dipenjara mbak. Gara garanya yo mbelo ben gak digusur langsung dilebokne sel. Warga i banyak yang pasrah arepe berontak ra wani ngko arepe ngene salah. hidup ndek RW 5 iki intene koyok ancik ancik pucuk e duri. tarikan pajek yo wes gak enek, kene yo wes diumbar ne mbar”

(ya mau berontak nanti salah..ada mbak dari LKK ku ranah ku RW, seksi keamananku namanya pak X, itu pernah dipenjara mbaj. Gara-garanya ya membela biar nggak digusur langsung dimasukkan sel. Warga itu banyak yang pasrah mau berontak nggak berani nanti mau gini sala. Hidup di RW 5 ini intinya kayak berdiri di ujung duri. Tarikan pajak ya udah nggak ada, sini ya udah dibiarkan) (Wawancara Pak G, 16 Desember 2017)

Tindakan pemerintah untuk memaksa agar masyarakat “diam” atas kebijakan penggusuran ini dengan caranya yang menciduk warga yang dianggap provokator ke dalam penjara ini juga menjadi bentuk kolonisasi sistem negara atas *lebenswelt* masyarakat. Adanya dominasi pemerintah (*sistem*) atas *lebenswelt* membuat proses diskursus tidak berjalan secara seimbang, karena sistem lebih memaksa masyarakat dalam mentaati kebijakan. Ketika terjadi kolonisasi dan tidak terbangun ruang publik, maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau ini pemerintah tidak menjalankan demokrasi deliberatif. Hal ini dikarenakan tidak ada tindakan komunikasi dua arah atau proses diskursus antara pemerintah dan masyarakat dalam menetapkan kebijakan. Warga RW 5 khususnya warga RT 31 dan RT 32 merasa bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk melawan pihak pemerintah karena warga menyadari perbedaan kekuatan dan kuasa dengan pemerintah. Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan Pak H sebagai berikut:

“ya mbela tapi lawan pemerintah yo panggah kalah wes titik, kene senjatane omongan kono senjatane di kek i air gas yo bongko kabeh gak sah senjata mati yo to di kek i air gas i lo glagepan kabeh arep ngalawan piye wong sak dumil ae. sebenere ora nglawan tapi mempertahankan, tapi pemerintah dilawan personil e ae jelas kalah to mbak wong sak deso musuh kono nekakne sak indonesia yo iso ae lhaa kasarane kan ngono”

(ya membela tapi melawan pemerintah ya tetep kalah udah titik, sini senjatanya omongan sana senjatanya dikasih air gas ya mati semua gak usah senjata mati ya kan dikasih air gas lo sesak nafas semua mau melawan gimana orang sedikit aja. Sebenarnya bukan melawan tapi mempertahankan, tapi pemerintah dilawan personilnya aja jelas kalah mbak, orang satu desa musuh sana mendatangkan se-Indonesia ya bisa aja lo kasarannya kan gitu”(Wawancara Pak H, 23 februari 2018)

Dengan adanya hal ini tidak membuat warga untuk berdiam diri saja tetapi sebagian warga berusaha mencari cara baru agar ketika kebijakan penggusuran lanjutan ini dilaksanakan, warga tidak merasa kerugian yang besar. Dalam hal ini warga tidak berupaya melawan pemerintah tetapi warga akan memohon kepada pemerintah agar kebijakan penggusuran ini tidak merugikan masyarakat. hal ini juga dijelaskan oleh Pak C sebagai berikut:

“awak e dewe memohon, jangan menentang pemerintah tp pemerintah itu dimohon” (Wawancara Pak C, 19 Desember 2017)

Adanya upaya ini dilakukan warga dengan cara meminta untuk berunding dengan pihak pemerintah sehingga apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang diinginkan pemerintah dapat disepakati bersama. Dari pengalaman eksekusi penggusuran lokalisasi, dimana warga menentang dan menolak kebijakan justru pemerintah tidak memberikan apa yang diinginkan warga. Dari sini warga membuat strategi baru agar pemerintah luluh dengan adanya permohonan dari warga yang dilakukan baik-baik. Seperti yang dijelaskan oleh Pak F sebagai berikut:

“belum yo itu kan Cuma kan yang kita takuti, jangan sampai kedua kalinya.. Kalo sampek kedua kalinya nglawan kayak dalem itu kan dapetnya dikit ndak tau kalo kita ndak nglawan bisa dinego kan kita nggk tau yo mudah mudahan yo nggk, kasian orang-orang ini lo yo aku juga hehehe” (Wawancara Pak F, 23 Februari 2018)

Pada dasarnya beberapa warga RW 5 khususnya warga terdampak tidak keberatan jika kebijakan penggusuran lanjutan ini dilakukan, karena mereka juga menyadari bahwa mereka tinggal di tanah aset milik negara dan ketika pemerintah membutuhkan wargapun berkewajiban untuk menyerahkan lahan tersebut. Namun warga merasa tidak keberatan selama kebutuhan warga dapat terpenuhi seperti

ganti rugi bangunan yang sesuai, disiapkan tempat tinggal, dan diberikan lapangan pekerjaan baru. Hal ini juga dijelaskan oleh Pak F sebagai berikut:

“ya yang penting ganti rugi, misalkan ini diperlukan sama pemerintah wes tak ganti selawe juta bangunanmu we tak kek i rusunawa yo ndak papa, nglawano percuma to mbak nglawan pemerintah ayo po ndak, musuhe pemerintah..nanti dikira provokasi diambil dipenjara wes mati aku hehehe”

(ya yang penting ganti rugi, misalkan ini diperlukan sama pemerintah dah tak gantu 25 juta bangunanmu kamu tak kasih di rusunawa ya nggak papa, melawanpun percuma kan mbak melawan pemerintah iya apa nggak, musuhnya pemerintah. nanti dikira provokasi diambil dipenjara dah mati aku) (Wawancara Pak F, 23 Februari 2018)

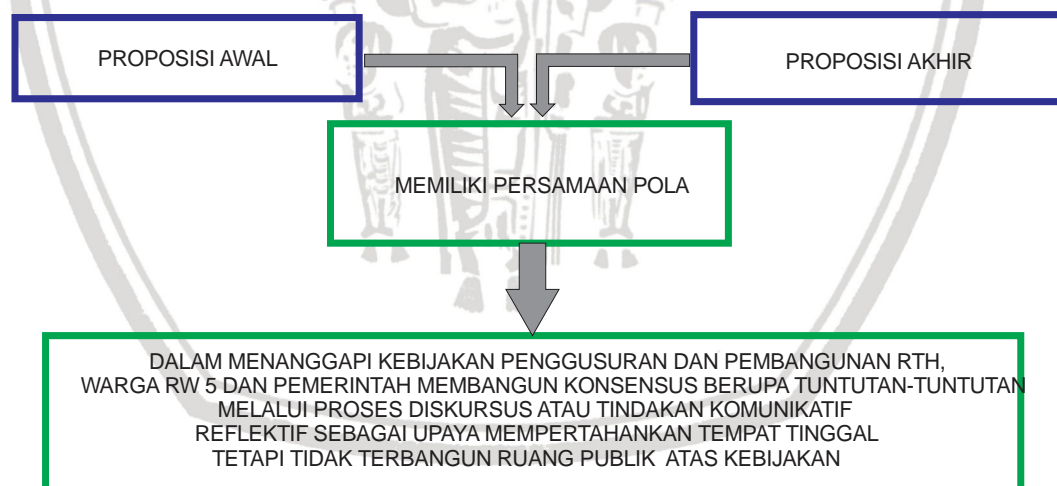
Dalam hal ini warga cukup optimis untuk melakukan proses diskusi dengan pemerintah meskipun berdasarkan pengalaman penggusuran sebelumnya pemerintah tidak menanggapi bagaimana permintaan warga. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Pak F sebagai berikut:

“Pasti ada solusinya kan pasti ada nanti” (Wawancara Pak F, 23 Februari 2018)

Dalam menanggapi adanya isu kebijakan penggusuran lanjutan yang tujuannya untuk memperluas area pembangunan ruang terbuka hijau ini warga RW 5 cenderung menginginkan adanya proses diskursus antara warga dan pihak Pemerintah Kota Kediri. Warga RW 5 sangat mengharapkan adanya proses diskursus karena pada kebijakan penggusuran sebelumnya hal ini tidak terjadi antara warga dan pemerintah, sehingga terjadi ketimpangan antara kepentingan masing-masing pihak. Hal ini yang berusaha dihindari warga RW 5 saat ini, dimana mereka menginginkan agar kebutuhannya dapat dimengerti oleh pemerintah dan juga sebaliknya, sehingga nantinya jika kebijakan penggusuran lanjutan tersebut benar terjadi maka tidak ada salah paham antara warga dan pemerintah.

Dalam menanggapi strategi baru warga RW 5 khususnya warga RT 31 dan RT 32 yang memiliki strategi baru terkait isu penggusuran lanjutan, pemerintah masih belum memberikan tanggapan apapun dan bahkan adanya pemberitaan penggusuran lanjutan juga tidak dipertegas oleh pemerintah sendiri. Hal ini dikarenakan pemerintah khususnya Walikota Kediri sudah tidak berkeinginan untuk menggusur wilayah RW 5 karena memang sudah tidak terindikasi adanya prostitusi, dan juga pemerintah menghindari adanya aksi protes warga karena saat ini pemerintah tengah disibukkan dengan adanya pilkada.

Dari fenomena yang telah digambarkan, bahwa warga RW 5 berupaya membangun proses diskursus sebagai upayanya dalam mempertahankan tempat tinggal jika dilihat berdasarkan proposisi awal yang telah ditentukan peneliti, hal ini memiliki kesamaan pola antara proposisi awal dengan hasil akhir dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Bagan 4 : Persamaan Pola Proposisi

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Dalam proposisi awal dikatakan bahwa dalam menanggapi kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau, warga RW 5 baik di wilayah lokalisasi maupun di luar lokalisasi memberikan timbal balik dengan melakukan

penolakan, dimana penolakan ini diawali warga RW 5 dan pihak DPRD sebagai pen jembatan antara masyarakat dan pemerintah dengan membangun konsensus yang juga menghasilkan kesepakatan melalui proses diskursus sebagai bentuk upayanya dalam mempertahankan tempat tinggal. Namun disini lain kesepakatan yang terbnetak tidak dapat mempengaruhi kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau, dan kebijakan tersebut tetap dilakukan dengan pola pikir pemerintah, sehingga dalam hal ini ruang publik masih belum terbangun. Hal ini sama dengan hasil penelitian dimana respon warga dan pemerintah khususnya pihak DPRD atas kebijakan tersebut dilakukan melalui proses diskursus baik dari menyatukan *lebenswelt* masing-masing warga, lalu membangun tindakan komunikatif yang juga terdapat sifat argumentatif didalamnya sehingga memunculkan kesepakatan bersama berupa tuntutan-tuntutan kepada pemerintah. Namun kesepakatan warga ini tidak sampai kepada pihak pemerintah sehingga tidak terdapat ruang publik antara warga dan pemerintah. Tidak terbangunnya ruang publik ini dikarenakan adanya kolonisasi sistem atas *lebenswelt* dan dominasi pemerintah yang lebih kuat, maka tidak terbangun pula suatu demokrasi deliberatif seperti yang digagas oleh Habermas.

Dalam proposisi awal dapat dilihat pola yang terbentuk yaitu respon yang dilakukan warga dan pemerintah khususnya DPRD yaitu dengan melakukan proses diskursus untuk menghasilkan kesepakatan bersama antar warga. Pola ini juga terlihat dalam proposisi akhir dimana dalam menghadapi kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau ini warga yang memiliki masing-masing *lebenswelt* saling bertukar pikiran dan berargumentasi dengan pihak DPRD sebagai pen jembatan antara masyarakat dan pemerintah melalui

tindakan komunikasi reflektif atau proses diskursus, yang kemudian dari adanya proses diskursus tersebut warga dan DPRD menghasilkan suatu konsensus yang berupa tuntutan-tuntutan warga terhadap pemerintah. Dengan adanya persamaan pola antara pola yang terdapat dalam proposisi awal dengan pola yang terdapat dalam proposisi akhir dapat dijadikan sebagai penguat validitas data internal penelitian. Selain itu dalam menyikapi isu penggusuran lanjutan, warga juga mengupayakan untuk melakukan proses diskursus dengan pemerintah agar apa yang diinginkan warga dengan apa yang diinginkan pemerintah dapat dipahami satu sama lain.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, dalam menggambarkan respon warga RW 5 terhadap kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau dalam mempertahankan tempat tinggalnya melalui proses diskursus ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, terkait dengan proses dan tindakan Pemerintah Kota Kediri dalam menerapkan kebijakan penggusuran wilayah lokalisasi dan pembangunan ruang terbuka hijau ini, dengan dilandasi adanya aturan nasional untuk menghilangkan lokalisasi pemerintah melakukan berbagai proses seperti melakukan penutupan lokalisasi yang dilakukan pada tahun 1999. Namun adanya penutupan ini justru membuat kegiatan prostitusi menjadi sembunyi-sembunyi. Hingga pada akhirnya Pemerintah Kota Kediri berupaya untuk melakukan pembongkaran wilayah lokalisasi guna untuk menghilangkan kegiatan prostitusi disana.

Namun dalam menerapkan kebijakan penggusuran ini, pemerintah justru melakukan tindakan strategis didalamnya yang juga menjadi bentuk kolonisasi sistem atas *lebenswelt* dimana pemerintah menjalankan kebijakan ini tanpa adanya komunikasi dua arah dengan masyarakat dan cenderung memaksa masyarakat agar mentaati kebijakan tersebut. Sehingga pemerintah mendapat penolakan dari warga RW 5, dimana hal ini dikarenakan tidak adanya proses diskursus dengan warga dan Pemerintah hanya melakukan proses sosialisasi saja.

Kedua, adanya bentuk komunikasi satu arah yang terjadi antara Pemerintah dan warga menimbulkan adanya perbedaan pandangan yang membuat

warga berupaya untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan penggusuran tersebut. Adanya penolakan ini dikarenakan apa yang menjadi *lebenswelt* warga tidak dipahami oleh pemerintah. Sehingga *lebenswelt* warga ini yang menjadi landasan warga untuk melakukan penolakan. Seperti halnya dana kompensasi yang dirasa tidak mencukupi kebutuhan warga pasca penggusuran, kemudian upaya permohonan sertifikasi hak milik, serta realisasi pembangunan ruang terbuka hijau. Selain itu dalam melakukan penolakan atas kebijakan penggusuran ini warga mengupayakan dengan melakukan tindakan komunikatif dan proses diskursus dengan pihak DPRD. Hal ini dilakukan warga guna dapat menyuarakan aspirasi warga kepada DPRD agar nantinya dapat tersampaikan kepada pihak pemerintah. Dalam menjalankan proses ini, juga menghasilkan kesepakatan berupa dukungan DPRD untuk membantu warga dalam melakukan penolakan serta mendukung warga untuk memohonkan sertifikat hak milik.

Namun kesepakatan yang telah dibentuk melalui proses diskursus ini masih belum tersampaikan kepada pemerintah. Sehingga ruang publik atas kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau masih belum terjadi. Kesepakatan yang hanya menjadi bentuk formalitas saja tidak disalurkan kepada pihak pemerintah secara baik, sehingga kebijakan ini tetap berjalan sesuai dengan pola pikir atau *lebenswelt* pemerintah yang cenderung memaksakan masyarakat.

Ketiga, dalam menyikapi isu penggusuran lanjutan warga memiliki strategi baru yaitu adanya keinginan warga untuk melakukan proses diskursus dengan pihak pemerintah dan tidak melakukan penolakan seperti pada penggusuran sebelumnya. Keinginan warga melakukan proses diskursus dengan pemerintah ini

bertujuan agar apa yang diinginkan warga dapat dipenuhi oleh pemerintah begitupun sebaliknya. Namun berdasarkan penjelasan pihak pemerintah menyatakan bahwa tidak akan ada lagi penggusuran lanjutan karena Walikota Kediri sendiri yang meminta tidak menggusur wilayah RW 5 karena menghindari adanya penolakan warga lagi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan memiliki kesamaan pola dengan proposisi yang telah ditentukan sebelumnya, dimana warga melakukan proses diskursus atau tindakan komunikatif reflektif yang didalamnya tidak hanya memberikan alasan dan penjelasan terhadap suatu pernyataan tetapi juga terdapat unsur argumentatif dan menghasilkan suatu konsensus berupa tuntutan-tuntutan sebagai bentuk upayanya mempertahankan tempat tinggal.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Dalam penelitian ini tidak luput dari adanya kekurangan. Salah satunya yaitu dalam penelitian ini masih memiliki kekurangan berupa data atau gambaran secara rinci mengenai proses diskursus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam membuat kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau. Hal ini dikarenakan peneliti hanya berfokus pada upaya penolakan yang dilakukan oleh warga RW 5. Selain itu kekurangan dalam penelitian ini yaitu dari segi dokumentasi yang masih belum mencukupi untuk menggambarkan kondisi RW 5 sebelum penggusuran. Peneliti mengharapkan bagi penelitian selanjutnya yang juga membahas mengenai kebijakan penggusuran dan pembangunan ruang terbuka hijau di RW 5 Kelurahan Semampir Kota Kediri dapat memberikan tambahan – tambahan data seperti yang telah dipaparkan.

6.2.1 Saran Praktis

1. **Bagi Pemerintah** : Dalam membuat suatu kebijakan, diharapkan pemerintah tidak melupakan kebutuhan warga yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Sehingga dalam merumuskan suatu kebijakan seharusnya dilakukan dengan proses diskursus antara pihak pemerintah dan warga sehingga akan timbul kesepakatan bersama tanpa adanya kondisi yang timpang dan tanpa adanya paksaan kepada masyarakat. Seperti yang terjadi oleh warga RW 5, dimana tidak terjadi proses diskursus antara pemerintah dengan warga sehingga hal ini memicu timbulnya konflik.

Selain itu dalam merumuskan suatu kebijakan seperti pengusuran sebaiknya juga mempertimbangkan dan mengatur kondisi warga yang terdampak kedepannya, sehingga warga tidak merasa dibuang dan dibedakan dengan warga yang lain. Seperti disediakan lapangan pekerjaan baru, disediakan tempat tinggal yang layak, dan sebagainya.

2. **Bagi warga** : sebaiknya ketika ingin mengutarakan pendapatnya sebaiknya dengan cara berdiskusi dan berdialog dengan pihak pemerintah secara baik, sehingga penyampaian aspirasi dapat tersampaikan secara keseluruhan tanpa adanya kegiatan *ekstrim* seperti demo dan berbagai upaya pemberontakan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, Wiku. 2012. *Kekuasaan & Proses Pembuatan Kebijakan*. Diunduh dari <https://staff.blog.ui.ac.id/wiku-a/files/2012/09/power+pemerintah1.pdf> pada 27 Oktober 2017
- Amiruddin, Lutfi. 2014. *Lingkar Kuasa Kehidupan Komunitas Pemulung Pandesari Kota Malang*. Diunduh dari http://sosiologi.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/11/Lingkar-Kuasa-Kehidupan-Komunitas-Pemulung-Pandesari-Kota-Malang-Lutfi-AmiruddinS.Sos_.M.Si_1.pdf pada 8 November 2017
- Andriani, Vivitri Endah dkk. 2014. *Resistensi Terhadap Konstruksi Dominan Homoseksual Dalam Film Coklat Stroberi*. Diunduh dari <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/6523> pada 8 November 2017
- Bachri, Bachtiar S. 2012. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Diunduh dari <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> pada 19 November 2017
- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies : Teori dan Praktik*. Bantul : Kreasi Wacana
- Black, James A., Champion, Dean J. 1992. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung : Eresco.
- Emod, Lela Rochmatin. 2015. *Resistensi Dalam Menjalankan Perubahan*. Diunduh dari <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/316-resistensi-dalam-menjalankan-perubahan> pada 4 November 2017
- Eni, Laela Destri Endri. 2016. *Tindakan Ekonomi Masyarakat Pasca Kebijakan Penutupan Lokalisasi Moro Seneng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang*. Malang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang
- Fantoko, Fajar Dwi Setyo. 2016. *Pilihan Rasional Pekerja Seks Komersial dan Mucikari di Dolly-Jarak Dalam Menanggapi Dana Kompensasi Atas Penutupan Lokalisasi (Studi Kasus Penutupan Lokalisasi Oleh Pemerintah Kota Surabaya Dengan Landasan Peraturan Daerah No.7*

- Tahun 1999). Malang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang
- Fauzi, Risma Nur. 2012. *Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Perubahan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2001-2009*. Jember : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember
- Gunawan, Imam. 2015. Studi Kasus (Case Study). Diunduh dari http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/7.3_Studi-Kasus.pdf pada 27 Februari 2018
- Habermas, Jurgen. 2007. *Ruang Publik Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Habermas, Jurgen. 2007. *Teori Tindakan Komunikatif 1 Rasio Dan Rasionalitas Masyarakat*. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Handayani, Maulida Sri. 2016. *Penutupan Lokalisasi : Selamat Datang Prostitusi Online*. Diunduh dari <https://tirto.id/penutupan-lokalisasi-selamat-datang-prostitusi-online-bkkF> pada 4 Oktober 2017
- Hardiman, F. Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta : Kanisius
- Haryanto, Andry. 2016. *4 Alasan Kawasan Kalijodo Perlu Ditertibkan*. Diunduh dari <http://news.liputan6.com/read/2438811/4-alasan-kawasan-kalijodo-perlu-ditertibkan> pada 3 Januari 2018
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Isabella, Nida dan Wiwin Hendriani. 2010. *Resiliensi Pada Keluarga Yang Tinggal di Lingkungan Lokalisasi Dupak, Bangunsari*. Diunduh dari http://journal.unair.ac.id/filerPDF/6-12_3.pdf pada 2 Oktober 2017
- Kartika, Unoviana. 2014. *Dolly Ditutup, Kontrol Penularan HIV Makin Sulit*. Diunduh dari <http://lifestyle.kompas.com/read/2014/06/18/0916079/Dolly.Ditutup.Kontrol.Penularan.HIV.Makin.Sulit> pada 4 Oktober 2017
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 296. Diunduh dari [www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesio_\(Bahasa_Indonesia\).pdf](http://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesio_(Bahasa_Indonesia).pdf) pada 2 September 2017

- Masyhary, Nanang. 2016. *Eks Lokalisasi Semampir Kediri Akan Disulap Jadi RTH?*. Diunduh dari beritajatim.com pada 3 September 2017
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ketiga belas. Bandung: Remaja Rosada Karya
- Peraturan Daerah Kota Kediri No 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Kediri. Diunduh dari <http://bappeda.kedirikota.go.id/wp-content/uploads/2013/06/PERDA-RTRW-KOTA-KEDIRI-2011-2030.pdf> pada 25 Desember 2017
- Peraturan Daerah Kota Kediri No 1 Tahun 2012. Diunduh dari <http://bappeda.kedirikota.go.id/wp-content/uploads/2013/06/PERDA-RTRW-KOTA-KEDIRI-2011-2030.pdf> pada 5 November 2017
- Peraturan Daerah Kota Kediri no 26 Tahun 1998. Diunduh dari <http://jdih.kedirikota.go.id/home/download/263> pada 4 November 2017
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Negara Nasional berdasarkan pemaparan No 9 Tahun 1999. Diunduh dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-Negara/peraturan-menteri-negara-agraria-nomor-9-tahun-1999-782> pada 3 April 2018
- Peta wilayah Kecamatan Kota, Kota Kediri. Diunduh dari <http://kec-kota.kedirikota.go.id/read/24/1/peta%20wilayah.html> pada 26 Februari 2018
- Prasetyo, Antonius Galih. 2012. *Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Purbani, Widyastuti. 2005. *Analisis Wacana / Discourse Analysis*. Diunduh dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiypqbqgsPXAhXGS7wKHU8iDGcQFghRMAU&url=http%3A%2F%2Fstaff.uny.ac.id%2Fsystem%2Ffiles%2Fpengabdian%2Fdr-widyastuti-purbani-ma%2Fdiscourse-analysis.pdf&usg=AOvVaw0lihF6DdSWetssMQOaaYVe> pada 23 Oktober 2017
- Rahardjo, Mudjia. 2010. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Diunduh dari

- <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triagulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> pada 18 November 2017
- Ratnasari, Dian. 2017. *Tindakan Politik Basuka Tjahaja Purnama Dalam Membangun Good Governance Provinsi DKI Jakarta*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Remaja Rosda Karya.
- Rokhmana, Siti Nila. 2012. *Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas*. Semarang : IAIN Walisongo. Diunduh dari http://eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129_Bab3.pdf pada 18 November 2017
- Rozikun, Rozikin. 2017. *Pondok Pesantren Lirboyo, Pesantren Salaf Terbesar di Jawa Timur*. Diunduh dari <http://www.ppmaswaja.org/index.php/2017/01/02/pondok-pesantren-lirboyo/> Di unduh pada 2 Oktober 2017
- Samsudi. 2010. *Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta*. Diunduh dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjgpsyOtYjXAhVBQY8KHecDBzcQFghJMAQ&url=http%3A%2F%2Fjurnal.uns.ac.id%2Fjurnal-and-development%2Farticle%2Fdownload%2F1836%2F1744&usg=AOvVaw394KNc84DHQz0jbhrWRMdh> pada 4 November 2017
- Simanungkalit, David Jones. 2014. *Kajian Filosofis Atas Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Surabaya : Widya Mandala Catholic University Surabaya
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Ulfiani, Ismiasih Wahyu. 2015. *Post Dolly (Studi Dinamika Peran, Respon, dan Proses Adaptasi Masyarakat Lokalisasi Setelah Kebijakan Penutupan di*

Surabaya). Malang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang

Undang Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007. Diunduh pada

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjJl63a5uPXAhUDGZQKHx6TCQ4QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fpusatdata%2Fdownloadfile%2Ff152198%2Fparent%2F26897&usg=AOvVaw3UDTnAHGyJgHs15Zma_kueL pada 4 November 2017

Wirawan, Ida Bagus. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama

